



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI**



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

AUDITED



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI**



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2022.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bali, 15 Mei 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali,



Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721216 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	7
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD	9
2.1 Ekonomi Makro	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	21
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	21
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	22
3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD	23
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	24
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	27
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	28
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	65
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	65
5.2 Neraca	76
5.3 Laporan Operasional	80
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	82
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
KEPALA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI**

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 31 Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali,



Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721216 199803 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas Menyusun dan melaporkan laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2023 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 43.693.481.519, atau mencapai 97,83% dari anggarannya sebesar Rp. 44.660.448.129.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 43.370.909.269,00 atau 97,85%, digunakan untuk pembayaran belanja Pegawai sebesar Rp. 19.053.376.513, atau 97,12% dari anggaran sebesar Rp. 19.619.254.547; Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 24.317.532.756, atau 98,42% dari anggarannya sebesar Rp. 24.706.667.082; Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pembayaran belanja Modal sebesar Rp. 322.572.250 atau 96,43% dari anggarannya sebesar Rp. 334.526.500.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2023 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 7.218.460.760 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 1.571.600, dan aset tetap sebesar Rp. 7.216.889.160. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 815.618.925 dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.401.941.835, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana menjadi Rp. 7.217.560.760.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2023. Realisasi Beban Tahun 2023 sebesar Rp. 40.857.551.250,00. Realisasi Surplus/Defisit Operasional (LO) Tahun 2023 sebesar Rp.(40.815.223.750,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 6.790.801.808,00, defisit -LO sebesar Rp. (44.106.448.732,00) dan RK PPKD Sebesar Rp. 43.693.481.519,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 6.401.941.835,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian kinerja. Ikhtiar pencapaian target, kinerja, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan kinerja dan informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun 2023 Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

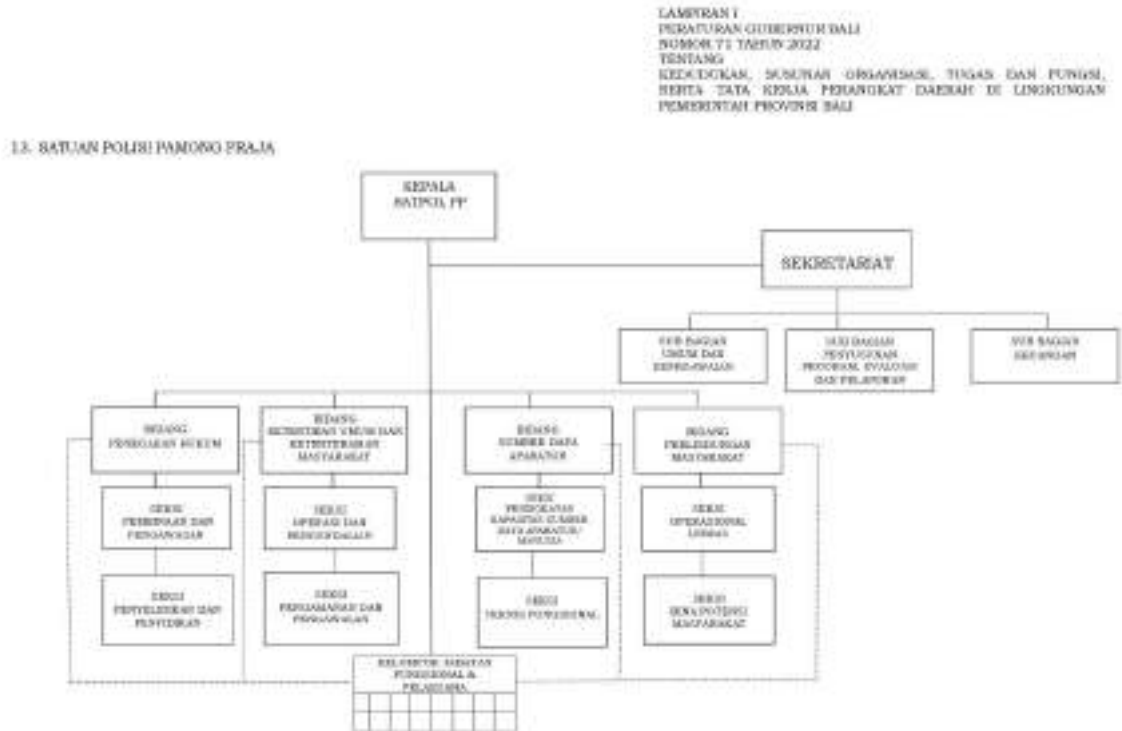
- Nomor 1781);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - m. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; dan
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10)

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

- **Tugas Pokok:** Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan subbidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- **Fungsi:** Dalam menyelenggarakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan;
 - d. Perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat dan sub bidang kebakaran;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali



1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan catatan atas laporan keuangan
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standarakuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Neraca
- 5.3. Laporan Operasional
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah**Bab VII Penutup**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2023 sudah mulai membaik seiring pulihnya pariwisata Bali. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,25%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,69%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,362.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.01.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,54%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp274,36 triliun;

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2022-2023
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,53	4,57	4,25	Turun 0,32
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	201,97	205,68	193,78	Turun 11,9
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	Turun 0,18
4	Peringkat Provinsi	1	3	1	Naik 2

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2023 (keadaan Maret 2023) sebesar 4,25% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat 4,57%. Peningkatan kinerja pariwisata pada tahun 2023 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,682	0,625	0,553	Turun 0,072
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,714	1,586	1,528	Turun 0,058
3	Peringkat Provinsi	4	2	1	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali*

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,154	0,129	0,102	Turun 0,027
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,424	0,395	0,377	Turun 0,018
3	Peringkat Provinsi	4	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 2,69%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	Turun 2,11
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	Turun 0,54
3	Peringkat Provinsi	19	20	3	Naik 17

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Bali Agustus 2021, 2022, dan 2023*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,80% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

2.1.3 **Indek Gini (Gini Ratio)**

Indek **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 0,362 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1 Gini Ratio Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Gini Ratio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	Turun 0,001
2	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	Naik 0,004
3	Peringkat Provinsi	25	21	21	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan

dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Pada tahun 2023, BPS melakukan update angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup dilakukan update menyusul telah selesainya penghitungan UHH berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Jembrana	73,57	74,38	74,80	Naik 0,42
2	Tabanan	76,95	77,22	77,87	Naik 0,65
3	Badung	81,84	82,13	83,00	Naik 0,87
4	Gianyar	78,21	78,87	79,69	Naik 0,82
5	Klungkung	72,98	73,77	74,18	Naik 0,41
6	Bangli	70,60	71,47	71,99	Naik 0,52
7	Karangasem	68,58	69,48	70,09	Naik 0,61
8	Buleleng	73,60	74,48	74,87	Naik 0,39
9	Denpasar	84,04	84,39	84,68	Naik 0,29
10	Provinsi Bali	76,69	77,40	78,01	Naik 0,61
11	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	Naik 0,62
12	Peringkat Provinsi	5	4	5	Turun 1

Catatan: penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023*

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 77,40 mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,88 tahun pada Tahun

2023, lebih Panjang 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,45 tahun dengan harapan lama sekolah 13,58 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp14.382 ribu atau meningkat Rp440 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	8,89	9,16	9,49
	Tabanan	14,52	14,94	15,47
	Badung	29,05	31,95	35,55
	Gianyar	17,26	17,96	18,87
	Klungkung	5,60	5,77	6,04
	Bangli	4,38	4,51	4,67
	Karangasem	10,57	10,84	11,18
	Buleleng	21,79	22,46	23,28
	Denpasar	32,44	34,07	36,00
	Provinsi Bali	143,87	150,83	159,45
	Indonesia	11.120,06	11.710,25	12.301,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-0,65	2,98	3,66
	Tabanan	-1,98	2,93	3,56
	Badung	-6,74	9,97	11,29
	Gianyar	-1,05	4,04	5,06
	Klungkung	-0,23	3,12	4,70
	Bangli	-0,33	2,80	3,50
	Karangasem	-0,56	2,58	3,10
	Buleleng	-1,27	3,11	3,64
	Denpasar	-0,92	5,02	5,69
	Provinsi Bali	-2,46	4,84	5,71

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Indonesia	3,70	5,31	5,05
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	4	6	5
	Tabanan	8	7	7
	Badung	9	1	1
	Gianyar	6	3	3
	Klungkung	1	4	4
	Bangli	2	8	8
	Karangasem	3	9	9
	Buleleng	7	5	6
	Denpasar	5	2	2
4	Peringkat Nasional	34	22	5

Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 5,71 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, baru pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalami percepatan kembali pada tahun 2023. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kategori D (pengadaan listrik dan gas). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 25,29 persen, diikuti kategori I yang tumbuh sebesar 16,16 persen, serta kategori D tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% untuk Kota Denpasar dan

4,31% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6.1 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,01	6,44	2,54	Turun 3,90
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	Turun 0,32
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	Turun 2,90
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1	2	Turun 1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	48	26	57	Turun 31

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, 2022, dan 2023*

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.070.582,96	3.189.288,61	3.383.130,98
	2. Pertambangan dan Penggalan	119.317,96	123.082,36	130.296,98
	3. Industri Pengolahan	716.617,94	775.281,70	826.377,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.752,65	21.388,48	23.839,96
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.839,67	11.085,03	11.363,43
	6. Konstruksi	1.458.174,00	1.560.610,00	1.590.389,71
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.376.928,59	1.515.979,77	1.647.699,89
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.832.219,19	1.992.432,14	2.281.484,63
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.488.190,25	1.725.726,48	1.913.853,52
	10. Informasi dan Komunikasi	932.303,72	920.103,44	962.912,12
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	466.840,86	564.164,82	642.046,66
	12. Real Estate	646.295,81	686.321,83	711.528,20
	13. Jasa Perusahaan	107.653,88	121.414,09	131.173,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393.766,62	408.829,98	407.500,36
	15. Jasa Pendidikan	325.998,71	329.302,20	326.228,55

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346.488,60	359.633,80	375.560,11
	17. Jasa lainnya	198.663,54	227.611,00	247.491,35
	PDRB ADH Berlaku	13.510.634,96	14.532.255,74	15.612.876,95
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.189.685,00	5.423.615,00	5.730.945,40
	2. Pertambangan dan Penggalian	255.255,70	268.642,56	280.999,77
	3. Industri Pengolahan	1.307.413,40	1.420.241,95	1.518.608,39
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.403,50	27.812,16	31.261,63
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.266,10	37.610,48	39.832,49
	6. Konstruksi	2.271.017,70	2.416.304,08	2.501.179,21
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.250,90	2.133.918,14	2.316.325,21
	8. Transportasi dan Pergudangan	319.072,80	361.380,95	424.495,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.446.784,40	4.051.051,59	4.739.339,60
	10. Informasi dan Komunikasi	1.435.394,70	1.437.157,09	1.480.998,95
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	857.344,10	1.012.001,46	1.158.586,29
	12. Real Estate	1.175.116,00	1.243.819,43	1.290.459,70
	13. Jasa Perusahaan	235.148,20	261.980,08	283.012,53
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.930.091,80	1.903.670,09	1.964.653,99
	15. Jasa Pendidikan	466.050,00	472.511,89	470.255,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.802,20	664.021,58	693.729,77
	17. Jasa lainnya	479.045,60	545.559,37	606.245,20
	PDRB ADH Berlaku	22.021.142,10	23.681.297,92	25.530.928,95
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.979,06	3.958.842,15	4.160.349,32
	2. Pertambangan dan Penggalian	162.834,67	173.454,78	176.424,08
	3. Industri Pengolahan	2.149.637,85	2.340.266,80	2.447.355,08
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	69.460,68	86.470,56	98.010,62
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.318,12	126.000,66	133.721,84
	6. Konstruksi	5.225.361,78	5.682.997,77	5.831.279,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.838.160,37	4.320.982,49	4.738.448,09
	8. Transportasi dan Pergudangan	5.734.099,42	11.477.866,06	19.131.742,25
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.415.394,46	13.034.218,24	16.870.404,33
	10. Informasi dan Komunikasi	4.073.862,12	4.133.369,68	4.216.549,63
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487.860,16	1.753.186,88	2.043.883,80
	12. Real Estate	2.064.844,15	2.204.535,95	2.278.749,26
	13. Jasa Perusahaan	402.669,59	458.276,24	508.423,39
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.229,44	2.086.235,78	2.184.119,45

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	15. Jasa Pendidikan	1.946.425,97	1.965.509,23	1.980.372,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	905.962,18	942.239,86	986.583,93
	17. Jasa lainnya	463.980,15	545.547,02	611.145,40
	PDRB ADH Berlaku	44.882.080,18	55.290.000,16	68.397.561,91
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.471.186,95	3.510.636,94	3.678.039,89
	2. Pertambangan dan Penggalian	368.119,17	391.638,87	400.329,48
	3. Industri Pengolahan	3.144.587,50	3.435.572,11	3.702.588,93
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	26.068,24	31.302,85	35.993,58
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.394,36	34.784,60	36.914,45
	6. Konstruksi	3.393.155,41	3.622.140,00	3.748.697,89
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.113.841,94	2.315.521,87	2.518.946,62
	8. Transportasi dan Pergudangan	211.261,08	239.273,09	278.927,26
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.669.744,42	5.511.589,61	6.807.742,28
	10. Informasi dan Komunikasi	1.926.282,61	1.934.235,55	2.022.467,54
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.099.702,95	1.306.803,62	1.470.144,23
	12. Real Estate	1.237.177,72	1.302.343,47	1.348.206,25
	13. Jasa Perusahaan	324.094,10	368.103,38	407.992,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.545.599,71	1.594.599,03	1.603.134,89
	15. Jasa Pendidikan	688.812,66	698.609,27	694.994,47
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.037.936,36	1.074.711,90	1.127.533,03
	17. Jasa lainnya	496.261,86	572.339,60	646.762,67
	PDRB ADH Berlaku	25.788.227,04	27.944.205,76	30.529.416,26
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.941.865,17	2.026.791,81	2.195.486,74
	2. Pertambangan dan Penggalian	257.303,63	279.591,68	295.100,51
	3. Industri Pengolahan	831.797,37	903.301,57	951.253,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.453,77	10.932,89	12.862,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.663,81	17.998,95	19.316,40
	6. Konstruksi	910.109,32	979.637,48	1.007.661,23
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713.517,95	804.462,79	873.010,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.018,76	200.723,00	255.309,30
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	751.304,82	923.819,00	1.207.561,79
	10. Informasi dan Komunikasi	874.940,80	876.961,00	913.977,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	351.455,38	417.685,00	474.210,75
	12. Real Estate	210.352,77	223.019,00	232.428,12
	13. Jasa Perusahaan	84.122,06	94.768,00	103.802,93

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.140,49	527.576,00	553.753,78
	15. Jasa Pendidikan	224.908,84	229.617,00	230.940,31
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	440.604,63	459.000,00	484.075,44
	17. Jasa lainnya	199.873,34	234.324,00	269.463,75
	PDRB ADH Berlaku	8.529.432,93	9.210.209,00	10.080.215,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.928.381,09	2.035.006,00	2.159.562,75
	2. Pertambangan dan Penggalian	125.207,55	131.510,24	139.860,70
	3. Industri Pengolahan	603.798,52	641.512,30	681.839,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.875,69	3.059,12	3.481,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.733,26	4.773,48	4.879,57
	6. Konstruksi	613.097,08	654.650,77	675.513,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672.881,83	738.882,07	807.988,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	72.459,32	79.728,61	89.153,81
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	704.725,08	821.596,16	964.549,92
	10. Informasi dan Komunikasi	329.754,70	338.265,01	354.235,97
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	189.423,47	222.152,25	257.966,62
	12. Real Estate	220.625,91	232.396,17	241.140,91
	13. Jasa Perusahaan	36.887,17	40.360,77	42.964,87
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	811.021,28	843.307,07	895.256,27
	15. Jasa Pendidikan	177.016,51	179.632,29	181.363,75
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.037,49	119.671,79	124.989,83
	17. Jasa lainnya	219.632,41	251.486,23	283.561,43
	PDRB ADH Berlaku	6.825.558,37	7.337.990,33	7.908.309,50
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.521.819,64	4.692.140,04	4.888.232,90
	2. Pertambangan dan Penggalian	554.412,55	614.611,50	676.062,20
	3. Industri Pengolahan	684.233,95	740.475,76	774.052,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.350,51	17.178,66	19.350,10
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.951,57	22.691,01	24.557,10
	6. Konstruksi	1.180.143,24	1.270.811,10	1.318.015,90
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906.871,86	1.005.922,35	1.077.719,70
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.591.359,50	2.789.763,23	3.070.993,40
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.222.597,98	1.427.387,30	1.739.410,30
	10. Informasi dan Komunikasi	622.129,03	634.616,08	653.175,20
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	749.128,47	901.446,44	1.062.929,80

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	12. Real Estate	687.830,33	721.175,79	754.932,90
	13. Jasa Perusahaan	128.621,81	142.518,15	152.030,40
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.501,78	1.365.652,50	1.365.395,50
	15. Jasa Pendidikan	456.813,96	464.023,50	467.122,00
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	403.183,08	420.578,37	442.879,10
	17. Jasa lainnya	383.675,62	438.499,58	487.816,80
	PDRB ADH Berlaku	16.506.624,87	17.669.491,36	18.974.675,40
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.520.875,91	7.713.940,52	8.016.353,88
	2. Pertambangan dan Penggalian	301.179,51	316.017,83	327.936,72
	3. Industri Pengolahan	2.030.754,00	2.202.415,92	2.364.120,60
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	55.482,06	60.525,06	67.514,94
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.754,73	39.269,31	42.908,86
	6. Konstruksi	3.199.938,74	3.450.497,17	3.541.541,69
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.963.925,12	4.332.078,71	4.721.116,99
	8. Transportasi dan Pergudangan	353.101,78	389.627,59	454.042,28
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.398.861,06	5.209.229,73	6.193.370,94
	10. Informasi dan Komunikasi	2.119.345,35	2.141.119,70	2.198.163,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.820,58	1.657.123,69	1.931.174,90
	12. Real Estate	1.614.750,34	1.697.749,64	1.763.266,42
	13. Jasa Perusahaan	227.301,45	255.125,00	281.872,31
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.958.299,81	1.998.931,25	2.001.994,79
	15. Jasa Pendidikan	2.713.608,64	2.741.409,33	2.726.839,41
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	857.362,87	888.702,34	927.592,07
	17. Jasa lainnya	622.926,34	711.521,40	791.295,42
	PDRB ADH Berlaku	33.363.288,29	35.805.284,19	38.351.106,10
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.666.116,48	3.787.130,03	3.949.625,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.310.754,44	3.653.694,27	3.875.731,94
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	246.822,80	294.961,88	347.657,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	134.003,59	133.996,87	136.499,25
	6. Konstruksi	6.012.565,41	6.520.700,87	6.689.585,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.897.543,85	5.468.721,49	6.041.481,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.242.527,75	1.453.809,78	1.773.632,76
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.426.092,65	11.432.033,63	14.328.513,00

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	10. Informasi dan Komunikasi	2.740.925,13	2.765.656,56	2.844.638,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.115.594,91	3.654.675,52	4.210.391,02
	12. Real Estate	2.239.723,84	2.372.487,01	2.457.089,19
	13. Jasa Perusahaan	966.740,93	1.106.931,48	1.225.422,18
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.956.508,25	2.978.879,20	2.997.349,63
	15. Jasa Pendidikan	6.460.636,23	6.562.279,44	6.587.509,19
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.490.848,25	1.552.815,68	1.636.171,17
	17. Jasa lainnya	779.222,35	895.053,48	999.003,56
	PDRB ADH Berlaku	49.686.626,87	54.633.827,19	60.100.301,66
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.766.739,70	35.994.540,86	37.677.683,01
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.147.972,67	2.312.139,37	2.436.619,10
	3. Industri Pengolahan	14.724.275,85	16.143.831,20	17.106.709,37
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	468.453,78	553.539,86	640.751,91
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	414.723,58	421.646,34	447.224,31
	6. Konstruksi	24.175.488,91	26.133.998,09	26.815.328,53
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.322.902,26	22.559.827,16	24.603.029,20
	8. Transportasi dan Pergudangan	12.438.126,50	18.894.553,60	27.658.696,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.601.871,41	44.112.103,06	54.683.173,97
	10. Informasi dan Komunikasi	14.836.631,89	15.028.830,69	15.517.170,16
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.686.120,02	11.486.409,28	13.277.201,87
	12. Real Estate	10.091.662,07	10.683.388,28	11.055.527,30
	13. Jasa Perusahaan	2.533.790,91	2.866.674,70	3.164.354,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.689.630,59	13.647.640,99	13.888.797,80
	15. Jasa Pendidikan	13.453.377,21	13.614.504,84	13.669.131,84
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.238.286,77	6.485.858,10	6.805.150,01
	17. Jasa lainnya	3.876.375,67	4.423.392,89	4.909.174,98
	PDRB ADH Berlaku	220.466.429,7₉	245.362.879,3₁	274.355.724,40

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Provinsi Bali TA 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 29 December 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 20 October 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 29 December 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2022 tanggal 29 December 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 20 October 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tanggal 29 December 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2023.

Tabel 3.1.1 Realisasi APBD TA 2023

NO.	URAIAN	2023			2022
		ANGGARAN PERUBAHAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%	REALISASI (Rupiah)
1.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja	44.660.448.129	43.693.481.519	97,83	40.095.651.121
3.	Surplus (Defisit)	44.660.448.129	43.693.481.519	97,83	40.095.651.121
4.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi belanja dan transfer mengalami peningkatan di TA 2023 yaitu sebesar Rp. 3.597.830.398,00.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Tahun 2023 realisasi APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tidak tercapai sesuai dengan target, karena adanya rasionalisasi dan pengendalian anggaran untuk mengantisipasi defisit anggaran, melalui Surat Edaran Sekda No. 8004 Tahun 2023, Tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.2.1 Realisasi Belanja TA 2023

(dalam rupiah)

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RUPIAH)	REALISASI BELANJA (RUPIAH)	%
1	2	3	4	5
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	44.660.448.129	43.693.481.519	97,83
5.1	BELANJA OPERASI	44.325.921.629	43.370.909.269	97,85
5.2	BELANJA MODAL	334.526.500	322.572.250	96,43
	JUMLAH	44.660.448.129	43.693.481.519	97,83

Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang penyerapan anggaran kegiatannya di bawah 80% dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.2.2 Realisasi Penyerapan Anggaran Kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di bawah 80%

No	Uraian Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)	Keterangan/Penjelasan
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.584.000	18.775.000	73,39	Sisa hasil negosiasi
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.395.000	29.234.432	53,74	Karena dipengaruhi adanya kontribusi dari pihak penyelenggara kegiatan dan harga tiket pesawat
3	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	67.502.000	1.909.000	2,83	Terbatasnya anggaran APBD yang tersedia dalam peningkatan kapasitas SDA/Manusia dan kurangnya komitmen antar pimpinan

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Sistem Akuntansi PPKD yang dilaksanakan oleh PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Laporan Keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA PPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan keyakinan dan keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional bendahara OPD.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang

yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6. UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
7. UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
8. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

- a. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
- b. PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)
- c. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)
- d. PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)
- e. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas

dalam hal:

- 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan

- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
- 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.

- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.

- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah

Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan

 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
- c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari

sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas;

- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

a. Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

b. Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c. Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Piutang Transfer Lainnya;

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

e. Piutang Bagi Hasil;

f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang

menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)

2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang

berlaku;

- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan

untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

b. Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu

lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:

a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi nonpermanen:

a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:

a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

(1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

(c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

(d) Penerima dana kooperatif.

(2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

(b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

(c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

(3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode

pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang

memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal),

maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.

b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.

c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset

tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah,

dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.

d. Berikut adalah contoh properti investasi:

- 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

- 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

- 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus

diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian

dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset

tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

- 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas

pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai

akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

a. surplus-LO pada periode pelaporan;

- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.
- Ekuitas berkurang pada saat adanya:
- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
 - b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melalui pendekatan kas dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci, Laporan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali TA 2023 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

TA 2023			TA 2022
ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI

5.1.1 BELANJA DAERAH

	44.660.448.129	43.693.481.519	97,83	40.095.651.121
--	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Belanja daerah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Belanja daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.597.830.398 (8,97%). Rincian objek belanja dapat diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Operasi	44.325.921.629	43.370.909.269	97,85	40.095.651.121
Belanja Modal	334.526.500	322.572.250	97,85	0
Jumlah	44.660.448.129	43.693.481.519	97,83	40.095.651.121

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

	44.325.921.629	43.370.909.269	97,85	40.095.651.121
--	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Belanja operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.275.258.148 (8,17%). Rincian objek belanja operasi dapat diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Pegawai	19.619.254.547	19.053.376.513	97,12	19.045.756.516
Belanja Barang dan Jasa	24.706.667.082	24.317.532.756	98,42	21.049.894.605
Jumlah	44.325.921.629	43.370.909.269	97,85	40.095.651.121

5.1.1.1.1 BELANJA PEGAWAI

	19.619.254.547	19.053.376.513	97,12	19.045.756.516
--	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.619.997 (0,04%). Rincian objek belanja pegawai diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.855.485.295	8.543.298.812	96,47	8.753.142.687
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.703.829.252	10.474.262.701	97,86	10.233.213.829
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.940.000	35.815.000	59,75	59.400.000
Jumlah	19.619.254.547	19.053.376.513	97,12	19.045.756.516

5.1.1.1.1 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN

Belanja gaji dan tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 209.843.875 (2,46%). Rincian objek belanja gaji dan tunjangan ASN diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Gaji Pokok PNS	6.135.598.995	6.017.037.195	98,07	6.168.855.181
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	628.796.256	617.268.814	98,17	631.621.700
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	210.380.000	210.380.000	100,00	208.220.000
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	695.062.000	676.967.000	97,40	695.048.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.510.000	59.485.000	93,66	66.250.000
Belanja Tunjangan Beras PNS	321.968.820	314.375.220	97,64	327.845.340
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.755.182	39.535.807	94,68	38.738.734
Belanja Pembulatan Gaji PNS	135.762	83.368	61,41	80.417
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	619.444.774	558.948.283	90,23	565.782.982
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.580.448	12.304.403	90,60	12.675.022
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	38.741.920	36.913.722	95,28	38.025.311
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	86.511.138	0	0,00	0
Jumlah	8.855.485.295	8.543.298.812	96,47	8.753.142.687

5.1.1.1.1.2 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 241.048.872 (2,30%). Rincian objek belanja tambahan penghasilan ASN diungkapkan sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6,845,190,606	6,687,825,301	97,70	4,093,285,529
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6,845,190,606	6,687,825,301	97,70	4,093,285,529
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	630,437,047	626,192,509	99,33	0
Jumlah	10.703.829.252	10.474.262.701	97,86	10.233.213.829

5.1.1.1.1.3 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 23.585.000 (65,85%). Rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	39,900,000	23,275,000	58,33	59,400,000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,040,000	2,040,000	100,00	-
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18,000,000	10,500,000	58,33	-
Jumlah	59.940.000	35.815.000	59,75	59.400.000

5.1.1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.267.638.151 (13,44%). Rincian objek belanja barang dan jasa diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Barang	1,337,590,810	1,299,511,250	97,15	1,097,795,963
Belanja Jasa	21,529,442,272	21,294,447,412	98,91	18,703,870,146
Belanja Pemeliharaan	673,110,000	660,618,390	98,14	660,503,026
Belanja Perjalanan Dinas	1,166,524,000	1,062,955,704	91,12	587,725,470
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0	0
Jumlah	24.706.667.082	24.317.532.756	98,42	21.049.894.605

Uraian rincian objek belanja barang dan jasa diungkapkan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1 BELANJA BARANG

Belanja barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 201.715.287 (15,52%). Rincian objek belanja barang dapat diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Barang Pakai Habis	1.337.590.810	1.299.511.250	97,15	1.097.795.963
Jumlah	1.337.590.810	1.299.511.250	97,15	1.097.795.963

5.1.1.1.2.1.1 BELANJA BARANG PAKAI HABIS

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	981,203,600	980,912,500	99,97	885,300,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66,562,500	48,175,050	72,38	57,482,875
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	27,005,900	26,582,200	98,43	27,218,208
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,122,000	3,822,000	92,72	4,800,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38,078,500	25,460,000	66,86	20,465,500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37,043,310	35,804,000	96,65	17,685,630
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80,400,000	78,658,000	97,83	70,020,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55,975,000	53,897,500	96,29	14,823,750
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	47,200,000	46,200,000	97,88	-
Jumlah	1,337,590,810	1,299,511,250	97,15	1.097.795.963

5.1.1.1.2.2 BELANJA JASA

Belanja jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.590.577.266 (12,17%). Rincian objek belanja jasa dapat diungkapkan: sebagai berikut

Belanja Jasa Kantor	21.113.725.632	21.022.049.772	99,57	18.487.276.002,00
Belanja Iuran				
Jaminan/Asuransi	257.966.640	257.966.640	100,00	216.594.144,00
Belanja Sewa				
Peralatan dan				
Mesin	15.000.000	14.431.000	96,21	0
Belanja Jasa				
Konsultansi				
Konstruksi	100.000.000	0,00	0,00	0
Belanja				
Kursus/Pelatihan,				
Sosialisasi,				
Bimbingan Teknis				
serta Pendidikan				
dan Pelatihan	42.750.000	0,00	0,00	0
Jumlah	21.529.442.272	21.294.447.412	98,91	18.703.870.146

5.1.1.1.2.2.1 BELANJA JASA KANTOR

Belanja jasa kantor yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.534.773.770 (12,06%). Rincian objek belanja jasa kantor dapat diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Jasa Tenaga				
Administrasi	3,122,964,000	3,122,964,000	100,00	2,706,568,800
Belanja Jasa Tenaga				
Pelayanan Umum	33,000,000	33,000,000	100,00	-
Belanja Jasa Tenaga				
Kebersihan	400,000,000	373,762,605	93,44	385,142,560
Belanja Jasa Tenaga				
Keamanan	17,374,761,632	17,343,443,552	99,82	14,882,697,900
Belanja Jasa Tenaga				
Supir	0	-	0,00	33,000,000
Belanja Jasa				
Penyelenggaraan Acara	0	-	0,00	344,500,000
Belanja Tagihan				
Telepon	12,000,000	9,867,779	82,23	10,018,703
Belanja Tagihan Listrik	130,000,000	105,157,162	80,89	94,217,011
Belanja				
Registrasi/Keanggotaan	0	-	0,00	4,579,028
Belanja Pembayaran				
Pajak, Bea, dan				
Perizinan	41,000,000	33,854,674	82,57	26,552,000

Jumlah	21.113.725.632	21.022.049.772	99,57	18.487.276.002
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

5.1.1.1.2.2.2 BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI

Belanja iuran jaminan/asuransi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 41.372.496 (16,04%). Rincian objek belanja iuran jaminan/asuransi diungkapkan sebagai berikut:

Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	129,368,880	129,368,880	100,00	105,142,752
Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7,279,200	7,279,200	100,00	6,308,640
Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	121,318,560	121,318,560	100,00	105,142,752
Jumlah	257.966.640	257.966.640	100,00	216.594.144

5.1.1.1.2.2.3 BELANJA SEWA PERALATAN DAN MESIN

Belanja sewa peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 14.431.000 (100%). Rincian objek belanja sewa peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000	14.431.000	100	0
Jumlah	15.000.000	14.431.000	100	0

5.1.1.1.2.2.4 BELANJA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Belanja jasa konsultasi konstruksi yang dianggarkan pada TA 2023 tidak terealisasikan dan belum pernah dianggarkan pada tahun 2022. Rincian Belanja jasa konsultasi konstruksi diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Peristirahatan	100.000.000	0	0	0,00
Jumlah	100.000.000	0	0	0,00

5.1.1.1.2.2.5 BELANJA KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan tidak terealisasi dan belum pernah dianggarkan pada tahun 2022. Rincian objek Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.750.000	0	0	0,00
Jumlah	42.750.000	0	0	0,00

5.1.1.1.2.3 BELANJA PEMELIHARAAN

Belanja pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 115.364 (0,02%). Rincian objek belanja pemeliharaan diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	543.110.000	531.153.090	97,80	640.937.056
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.000.000	129.465.300	99,59	0
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0,00	19.565.970

5.1.1.1.2.3.1 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 109.783.966 (20,67%). Rincian objek belanja pemeliharaan peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	492,800,000	486,192,990	98,66	538,156,976
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	-	0,00	54,684,055
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17,690,000	16,466,850	93,09	16,946,725
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16,060,000	14,441,100	89,92	14,542,200
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	16,560,000	14,052,150	84,86	16,607,100

Komputer-Peralatan
Personal Computer

Jumlah	543.110.000	531.153.090	97,80	640.937.056
---------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------

5.1.1.1.2.3.2 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 129.465.300 (100%). Rincian objek belanja pemeliharaan gedung dan bangunan diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Sewa			100	0
Alat Kantor Lainnya	130.000.000	129.465.300		
Jumlah	130.000.000	129.465.300	100	0

5.1.1.1.2.4 BELANJA PERJALANAN DINAS

Belanja perjalanan dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2002 mengalami kenaikan sebesar Rp 475.230.234 (44,71%). Rincian objek belanja perjalanan dinas diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Perjalanan				
Dinas Biasa	504,444,000	405,155,704	80,32	89,545,470
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	662,080,000	657,800,000	99,35	498,180,000
Jumlah	1.166.524.000	1.062.955.704	91,12	587.725.470

5.1.1.2 BELANJA MODAL

Belanja modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 322.572.550 (100%) dikarenakan adanya kebutuhan sarana dan prasarana yang lebih memadai dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kantor dalam mengawal tatakelola pemerintahan. Rincian objek belanja modal diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.526.500	127.979.250	93,74	701.341.200,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000	194.593.000	98,28	163.712.614,00
Jumlah	334.526.500	322.572.250	96,43	865.053.814,00

Uraian rincian objek belanja modal diungkapkan sebagai berikut.

5.1.1.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja modal peralatan dan mesin tidak dianggarkan pada tahun 2022 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp 127.979.250 (100%). Rincian objek belanja modal peralatan dan mesin diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.400.500	45.371.250,00	99,94	0
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.126.000	3.230.000	45,33	0
Belanja Modal Komputer	84.000.000	79.378.000	94,50	0
Jumlah	136.526.500	127.979.250	93,74	0,00

5.1.1.2.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tidak dianggarkan pada tahun 2022 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp 194.593.000 (100%). Rincian objek belanja pemeliharaan gedung dan bangunan diungkapkan sebagai berikut:

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	198.000.000	194.593.000	98,28	0
Jumlah	198.000.000	194.539.000	98,28	0

5.2 NERACA.

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

ASET	7.218.460.760,00
KEWAJIBAN	815.618.925,00
EKUITAS	6.378.734.595,00

Secara lebih rinci, neraca Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 ASET

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	7.218.460.760,00	7.602.368.460,00

Saldo tersebut merupakan saldo aset Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, rincian aset diungkapkan sebagai berikut:

Aset Lancar	1.571.600,00	232.449.360,00
Aset Tetap	7.216.889.160,00	7.369.919.100,00
Jumlah	7.218.460.760,00	7.602.368.460,00

5.2.1.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual, atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Saldo tersebut adalah saldo aset lancar yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca yang terdiri dari:

Persediaan	1.571.600,00	232.449.360,00
Jumlah	1.571.600,00	232.449.360,00

5.2.1.1.1 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Bahan	0	231.785.000,00
-------	---	----------------

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.571.600,00	664.360,00
----------------------------------	--------------	------------

5.2.1.1.1.1 BAHAN

Saldo Bahan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian Bahan adalah sebagai berikut:

Bahan Bakar dan Pelumas	0	231.785.000,00
Jumlah	0	231.785.000,00

5.2.1.1.1.2 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR

Saldo Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor adalah sebagai berikut:

Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	1.208.000,00
Kertas dan Cover	143.600,00	514.360,00
Benda Pos	220.000,00	150.000,00
Jumlah	1.571.600,00	232.449.360,00

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo saldo Aset Tetap yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pertanggal neraca, dengan rincian saldo Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tanah	24.989.572.500,00	25.558.532.500,00
Peralatan dan Mesin	9.825.062.643,00	9.763.739.442,00
Gedung dan Bangunan	1.762.441.000,00	1.762.441.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.380.000,00	34.380.000,00
Aset Tetap Lainnya	25.320.000,00	25.320.000,00
Akumulasi Penyusutan	(10.209.514.483,00)	(9.995.161.342,00)
Jumlah	7.216.889.160,00	7.369.919.100,00

Uraian rincian aset tetap diungkapkan sebagai berikut:

5.2.1.2.1 TANAH

Saldo Tanah yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Tanah adalah sebagai berikut:

Tanah Persil	5.779.200.000,00	5.779.200.000,00
Jumlah	5.779.200.000,00	5.779.200.000,00

5.2.1.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Alat Besar	140.000.000	140.000.000
Alat Angkutan	6.762.283.200	6.439.283.200
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.278.001.500	1.281.225.250
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	642.974.366	873.186.480
Alat Persenjataan	441.050.000	441.050.000
Komputer	549.203.577	549.203.577
Peralatan Proses/Produksi	11.550.000	11.550.000
Jumlah	9.825.062.643	9.763.739.442

5.2.1.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Bangunan Gedung	1.762.441.000	1.762.441.000
Jumlah	1.762.441.000	1.762.441.000

5.2.1.2.4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Instalasi	34.380.000	34.380.000
Jumlah	34.380.000	34.380.000

5.2.1.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	25.320.000	25.320.000
Jumlah	25.320.000	25.320.000

5.2.1.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Akumulasi Penyusutan

adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.365.742.061)	(9.157.102.260)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(805.750.922)	(801.183.582)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(12.701.500)	(11.555.500)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(25.320.000)	(25.320.000)
Jumlah	(10.209.514.483)	(9.995.161.342)

5.2.1.3 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-Lain yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Aset Rusak Berat/Usang	20.000.000	392.017.566
Jumlah	20.000.000	392.017.566

5.2.1.4 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang	(20.000.000)	(392.017.566)
Jumlah	(20.000.000)	(392.017.566)

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Kewajiban adalah sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	815.618.925	810.666.652
Jumlah	(815.618.925)	(810.666.652)

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo kewajiban jangka pendek yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

Utang Belanja Pegawai	805.770.161	801.076.216
Utang Belanja Barang dan Jasa	9.848.764	9.590.436
Jumlah	815.618.925	810.666.652

5.2.2.1.1 UTANG BELANJA PEGAWAI

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Utang Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24.203.085,00	24.512.962,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	781.567.076,00	776.563.254,00
Jumlah	805.770.161,00	801.076.216,00

5.2.2.1.2 UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per tanggal neraca, dengan rincian saldo Utang Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Utang Belanja Jasa	9.848.764,00	9.590.436,00
Jumlah	9.848.764,00	9.590.436,00

5.2.3 EKUITAS

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
-----------------------------	-----------------------------

6.378.734.595,00	6.791.701.808,00
-------------------------	-------------------------

Saldo tersebut adalah saldo ekuitas atau kekayaan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah per tanggal neraca. Saldo tersebut adalah saldo akhir Ekuitas pada TA 2023 yang disajikan dan diungkapkan dengan lebih lengkap pada **Catatan atas Laporan Perubahan** Ekuitas.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

	Tahun 2023	Tahun 2022
5.3.1 BEBAN DAERAH	44.114.448.732,00	40.857.551.250,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Daerah terdiri dari:

Beban Operasi	43.809.332.302,00	40.315.042.432,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	305.116.430,00	542.508.818,00
Jumlah	44.114.448.732,00	40.857.551.250,00

Rincian uraian beban daerah diungkapkan sebagai berikut:

5.3.1.1 BEBAN OPERASI	43.809.332.302,00	40.315.042.432,00
------------------------------	--------------------------	--------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Operasi terdiri dari:

Beban Pegawai	19.058.070.458,00	19.004.280.643,00
Beban Barang dan Jasa	24.751.261.844,00	21.310.761.789,00
Jumlah	43.809.332.302,00	40.315.042.432,00

Rincian uraian beban operasi diungkapkan sebagai berikut:

5.3.1.1.1 BEBAN PEGAWAI	19.058.070.458,00	19.004.280.643,00
--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Pegawai terdiri dari:

Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.542.988.935,00	8.731.248.202,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	10.479.266.523,00	10.213.632.441,00
Jumlah	19.058.070.458,00	19.004.280.643,00

5.3.1.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA	24.751.261.844,00	21.310.761.789,00
--	--------------------------	--------------------------

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Rincian Beban Barangan dan Jasa terdiri dari:

Beban Barang	1.538.389.010,00	1.357.844.985,00
--------------	------------------	------------------

Beban Jasa	21.294.705.740,00	18.704.688.308,00
Beban Pemeliharaan	855.211.390,00	660.503.026,00
Beban Perjalanan Dinas	1.062.955.704,00	587.725.470,00
Jumlah	24.751.261.844,00	21.310.761.789,00

5.3.1.1.3 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

305.116.430,00 **542.508.818,00**

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	275.295.850,00	502.712.828,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.674.580,00	38.649.990,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.146.000,00	1.146.000,00
Jumlah	305.116.430,00	542.508.818,00

5.3.1.1.4 SURPLUS/DEFISIT - LO

(44.106.448.732,00) **(44.106.448.732,00)**

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit) - LO Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022. Saldo Surplus/(Defisit) - LO tersebut di atas telah sama dengan yang diungkapkandalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2023	Tahun 2022
--	------------	------------

5.4.1 EKUITAS AWAL

6.791.701.808,00 **7.511.274.437,00**

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022.

5.4.2 RK-PPKD

43.693.481.519,00 **40.095.651.121,00**

Saldo tersebut di atas merupakan saldo RK-PPKD yaitu akun transitoris

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di tahun 2023 dan tahun 2022.

5.4.3 SURPLUS/(DEFISIT) -LO

	(44.106.448.732,00)	(40.814.323.750,00)
--	----------------------------	----------------------------

Saldo tersebut di atas merupakan defisit atas kegiatan operasional berbasis akrual yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada Tahun 2023 dan 2022.

5.4.4 DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

	0,00	(900.000,00)
--	-------------	---------------------

5.4.5 EKUITAS AKHIR

	33.510.796.105,00	31.110.134.710,00
--	--------------------------	--------------------------

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Saldo ekuitas akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sama besarnya dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca Per 31 Desember 2023.

BAB VI


INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali beralamat di Jalan DI Panjaitan No 10, Renon, Denpasar;
2. Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan subbidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
3. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali per 31 Desember adalah 106 orang.



LAMPIRAN

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.560.000	14.052.150,00	84,86	16.607.100,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.000.000	129.465.300,00	99,59	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	130.000.000	129.465.300,00	99,59	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	19.565.970,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0	0,00	0,00	9.892.320,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	9.673.650,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.166.524.000	1.062.955.704,00	91,12	587.725.470,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.166.524.000	1.062.955.704,00	91,12	587.725.470,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	504.444.000	405.155.704,00	80,32	89.545.470,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	662.080.000	657.800.000,00	99,35	498.180.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	44.325.921.629	43.370.909.269,00	97,85	40.095.651.121,00
5.2	BELANJA MODAL	334.526.500	322.572.250,00	96,43	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.526.500	127.979.250,00	93,74	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.400.500	45.371.250,00	99,94	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	45.400.500	45.371.250,00	99,94	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	45.400.500	45.371.250,00	99,94	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.126.000	3.230.000,00	45,33	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	7.126.000	3.230.000,00	45,33	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.126.000	3.230.000,00	45,33	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	84.000.000	79.378.000,00	94,50	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.000.000	59.200.000,00	98,67	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000	59.200.000,00	98,67	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.000.000	20.178.000,00	84,08	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.000.000	20.178.000,00	84,08	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000	194.593.000,00	98,28	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	198.000.000	194.593.000,00	98,28	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	198.000.000	194.593.000,00	98,28	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	198.000.000	194.593.000,00	98,28	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	334.526.500	322.572.250,00	96,43	0,00
	JUMLAH BELANJA	44.660.448.129	43.693.481.519,00	97,83	40.095.651.121,00
	SURPLUS/DEFISIT	(44.660.448.129)	(43.693.481.519,00)	97,83	(40.095.651.121,00)

Provinsi Bali, 15 Mei 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si
NIP. 197212161998031006

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	146.697.919,00	373.720.159,00	(227.022.240,00)	(60,75)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	117.393.990,00	321.304.903,00	(203.910.913,00)	(63,46)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.046.786,00	29.158.113,00	(23.111.327,00)	(79,26)
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	23.257.143,00	23.257.143,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	74.185.074,00	73.977.844,00	207.230,00	0,28
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	1.633.335,00	(1.633.335,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	44.932.009,00	47.161.009,00	(2.229.000,00)	(4,73)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.323.065,00	20.253.500,00	4.069.565,00	20,09
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.544.166,00	21.208.880,00	(12.664.714,00)	(59,71)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.312.166,00	3.720.000,00	592.166,00	15,92
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.360.000,00	16.616.880,00	(13.256.880,00)	(79,78)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	43.558.691,00	31.495.945,00	12.062.746,00	38,30
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	36.543.938,00	28.308.445,00	8.235.493,00	29,09
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.014.753,00	3.187.500,00	3.827.253,00	120,07
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.674.580,00	38.649.990,00	(9.975.410,00)	(25,81)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	28.674.580,00	38.649.990,00	(9.975.410,00)	(25,81)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26.268.580,00	36.243.990,00	(9.975.410,00)	(27,52)
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	100,00
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.390.000,00	(1.390.000,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0034	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	305.116.430,00	542.508.818,00	(237.392.388,00)	(43,76)
	JUMLAH BEBAN	44.114.448.732,00	40.857.551.250,00	3.256.897.482,00	7,97
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(44.106.448.732,00)	(40.815.223.750,00)	(3.291.224.982,00)	8,06

Provinsi Bali, 15 Mei 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si
NIP.197212161998031006



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Satuan Polisi Pamong Praja
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	7.218.460.760,00	7.602.368.460,00
1.1	ASET LANCAR	1.571.600,00	232.449.360,00
1.1.12	Persediaan	1.571.600,00	232.449.360,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	1.571.600,00	232.449.360,00
1.1.12.01.01	Bahan	0,00	231.785.000,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	231.785.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.571.600,00	664.360,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	143.600,00	514.360,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	220.000,00	150.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.571.600,00	232.449.360,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	7.216.889.160,00	7.369.919.100,00
1.3.01	Tanah	5.779.200.000,00	5.779.200.000,00
1.3.01.01	Tanah	5.779.200.000,00	5.779.200.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	5.779.200.000,00	5.779.200.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	5.779.200.000,00	5.779.200.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	9.825.062.643,00	9.763.739.442,00
1.3.02.01	Alat Besar	140.000.000,00	140.000.000,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	140.000.000,00	140.000.000,00
1.3.02.01.01.0010	Alat Pengangkat	140.000.000,00	140.000.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	6.762.283.200,00	6.439.283.200,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	6.741.283.200,00	6.418.283.200,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.544.435.300,00	4.201.435.300,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	177.950.000,00	177.950.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.031.914.900,00	1.031.914.900,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	434.183.000,00	454.183.000,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	552.800.000,00	552.800.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	21.000.000,00	21.000.000,00
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	21.000.000,00	21.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.278.001.500,00	1.281.225.250,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	227.430.000,00	227.430.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	222.480.000,00	222.480.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	809.262.000,00	812.485.750,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	397.025.000,00	399.155.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	226.409.750,00	212.378.500,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	185.827.250,00	200.952.250,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	241.309.500,00	241.309.500,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	165.149.500,00	165.149.500,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	21.030.000,00	21.030.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	45.180.000,00	45.180.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	9.950.000,00	9.950.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	642.974.366,00	873.186.480,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	26.190.000,00	22.960.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	4.360.000,00	4.360.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	21.830.000,00	18.600.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	254.989.366,00	268.326.480,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	207.295.366,00	220.632.480,00
1.3.02.06.02.0005	Alat Komunikasi Radio UHF	47.694.000,00	47.694.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	361.795.000,00	581.900.000,00
1.3.02.06.03.0001	Peralatan Pemancar MF/MW	361.795.000,00	511.795.000,00
1.3.02.06.03.0002	Peralatan Pemancar HF/SW	0,00	70.105.000,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	7.218.460.760,00	7.602.368.460,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	441.050.000,00	441.050.000,00
1.3.02.09.01	Senjata Api	260.675.000,00	260.675.000,00
1.3.02.09.01.0001	Senjata Genggam	248.850.000,00	248.850.000,00
1.3.02.09.01.0003	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	8.700.000,00	8.700.000,00
1.3.02.09.01.0010	Senjata Lain-Lain	3.125.000,00	3.125.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	180.375.000,00	180.375.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	173.550.000,00	173.550.000,00
1.3.02.09.02.0002	Non Senjata Api	6.825.000,00	6.825.000,00
1.3.02.10	Komputer	549.203.577,00	577.444.512,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	394.105.577,00	380.454.512,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	394.105.577,00	380.454.512,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	155.098.000,00	196.990.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	129.930.000,00	192.000.000,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	4.990.000,00	4.990.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	20.178.000,00	0,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	11.550.000,00	11.550.000,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	11.550.000,00	11.550.000,00
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	11.550.000,00	11.550.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.762.441.000,00	1.762.441.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	1.762.441.000,00	1.762.441.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.762.441.000,00	1.762.441.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1.642.141.000,00	1.642.141.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.800.000,00	50.800.000,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	69.500.000,00	69.500.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.380.000,00	34.380.000,00
1.3.04.03	Instalasi	34.380.000,00	34.380.000,00
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	34.380.000,00	34.380.000,00
1.3.04.03.07.0001	Instalasi Pertahanan di Darat	34.380.000,00	34.380.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	25.320.000,00	25.320.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	25.320.000,00	25.320.000,00
1.3.05.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	25.320.000,00	25.320.000,00
1.3.05.02.02.0001	Pahatan	17.820.000,00	17.820.000,00
1.3.05.02.02.0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	7.500.000,00	7.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(10.209.514.483,00)	(9.995.161.342,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.365.742.061,00)	(9.157.102.260,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(140.000.000,00)	(140.000.000,00)
1.3.07.01.01.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(140.000.000,00)	(140.000.000,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(6.487.005.245,00)	(6.017.307.326,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	(4.345.634.160,00)	(3.885.240.170,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	(177.950.000,00)	(177.950.000,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	(1.031.914.900,00)	(1.031.914.900,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	(398.406.185,00)	(412.359.399,00)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	(512.100.000,00)	(488.842.857,00)
1.3.07.01.02.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan	(21.000.000,00)	(21.000.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.183.063.227,00)	(1.157.473.153,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan	(222.480.000,00)	(222.480.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(3.877.500,00)	(2.887.500,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(356.743.662,00)	(313.941.653,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(174.795.315,00)	(181.812.250,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga	(183.857.250,00)	(195.042.250,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-K	(165.149.500,00)	(165.149.500,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-K	(21.030.000,00)	(21.030.000,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-K	(45.180.000,00)	(45.180.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-K	(9.950.000,00)	(9.950.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	(635.582.531,00)	(860.480.479,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(3.706.000,00)	(2.834.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan	(17.332.166,00)	(13.020.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Tele	(205.055.365,00)	(215.032.479,00)
1.3.07.01.06.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radi	(47.694.000,00)	(47.694.000,00)
1.3.07.01.06.0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Peman	(361.795.000,00)	(511.795.000,00)
1.3.07.01.06.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Peman	0,00	(70.105.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(441.050.000,00)	(441.050.000,00)
1.3.07.01.09.0001	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Genggam	(248.850.000,00)	(248.850.000,00)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	7.218.460.760,00	7.602.368.460,00
1.3.07.01.09.0003	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Bahu/Senjata Lara	(8.700.000,00)	(8.700.000,00)
1.3.07.01.09.0010	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(3.125.000,00)	(3.125.000,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Ke	(173.550.000,00)	(173.550.000,00)
1.3.07.01.09.0012	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Se	(6.825.000,00)	(6.825.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(472.881.058,00)	(536.941.302,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(333.336.930,00)	(342.341.927,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Person	(134.554.128,00)	(189.609.375,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringa	(4.990.000,00)	(4.990.000,00)
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(6.160.000,00)	(3.850.000,00)
1.3.07.01.17.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport	(6.160.000,00)	(3.850.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(805.750.922,00)	(801.183.582,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(805.750.922,00)	(801.183.582,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(777.466.922,00)	(775.305.582,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(12.530.667,00)	(11.514.667,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainr	(15.753.333,00)	(14.363.333,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(12.701.500,00)	(11.555.500,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(12.701.500,00)	(11.555.500,00)
1.3.07.03.03.0034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertaha	(12.701.500,00)	(11.555.500,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(25.320.000,00)	(25.320.000,00)
1.3.07.04.01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaa	(25.320.000,00)	(25.320.000,00)
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(25.320.000,00)	(25.320.000,00)
	JUMLAH ASET TETAP	7.216.889.160,00	7.369.919.100,00
		0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	20.000.000,00	392.017.566,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	20.000.000,00	392.017.566,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	20.000.000,00	392.017.566,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	20.000.000,00	392.017.566,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(20.000.000,00)	(392.017.566,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(20.000.000,00)	(392.017.566,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(20.000.000,00)	(392.017.566,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usan	(20.000.000,00)	(392.017.566,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	7.218.460.760,00	7.602.368.460,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	815.618.925,00	810.666.652,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	815.618.925,00	810.666.652,00
2.1.06	Utang Belanja	815.618.925,00	810.666.652,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	805.770.161,00	801.076.216,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	24.203.085,00	24.512.962,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan K	24.203.085,00	24.512.962,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	781.567.076,00	776.563.254,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ke	511.609.252,00	310.625.301,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Ke	52.873.922,00	0,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi K	217.083.902,00	465.937.953,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.848.764,00	9.590.436,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	9.848.764,00	9.590.436,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	821.957,00	821.957,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	9.026.807,00	8.768.479,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	815.618.925,00	810.666.652,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	815.618.925,00	810.666.652,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	6.401.941.835,00	6.790.801.808,00
3.1	EKUITAS	6.401.941.835,00	6.790.801.808,00
3.1.01	Ekuitas	(37.291.539.684,00)	(33.304.849.313,00)
3.1.01.01	Ekuitas	6.814.909.048,00	7.510.374.437,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	7.218.460.760,00	7.602.368.460,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	6.814.909.048,00	7.510.374.437,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	6.814.909.048,00	7.510.374.437,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(44.106.448.732,00)	(40.815.223.750,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(44.106.448.732,00)	(40.815.223.750,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(44.106.448.732,00)	(40.815.223.750,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	43.693.481.519,00	40.095.651.121,00
3.1.03.01	RK PPKD	43.693.481.519,00	40.095.651.121,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	43.693.481.519,00	40.095.651.121,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	43.693.481.519,00	40.095.651.121,00
	JUMLAH EKUITAS	6.401.941.835,00	6.790.801.808,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.217.560.760,00	7.601.468.460,00



Provinsi Bali, 15-05-2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si
NIP.197212161998031006

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri





PEMERINTAH PROVINSI BALI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	6.790.801.808,00	7.511.274.437,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(44.106.448.732,00)	(40.815.223.750,00)
RK PPKD	43.693.481.519,00	40.095.651.121,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	24.107.240,00	(900.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.107.240,00	0,00
EKUITAS AKHIR	6.401.941.835,00	6.790.801.808,00

Provinsi Bali, 15 Mei 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si
NIP. 197212161998031006

STATUS

Sudah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAFTAR JENIS SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG
PER 1 JANUARI 2023


Notes: Isi Bagian Kuning Saja

Level	KODE REKENING	Uraian	Data PP. Keuangan	BA. Stock Opname Pengurus Barang	Selisih
LV 3 (Jenis)	1.1.12	Persediaan	232.449.360,00	232.449.360,00	0,00
LV 4 (Objek)	1.1.12.01	Barang Pakai Habis	232.449.360,00	232.449.360,00	0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.01	Bahan	231.785.000,00	231.785.000,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	231.785.000,00	231.785.000,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemasam Kebakaran			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.02	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	664.360,00	664.360,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	514.360,00	514.360,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.04	Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.04.0001	Obat			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.07.0001	Natura			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.07.0002	Pakan			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.08	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.01.09	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya			0,00
LV 4 (Objek)	1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.02.01	Komponen	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.01.0005	Attachment			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya			0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.02.02	Pipa	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya			0,00
LV 4 (Objek)	1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
LV 5 (Rincian)	1.1.12.03.01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas			0,00
LV 6 (Sub Rincian)	1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			0,00

**DAFTAR PENDAPATAN HIBAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
Tahun 2023**



NO	OPD	Rekening (Sub Rincian)	Nama Rekening Sub Rincian	Nama Pemberi	No BAST	Tanggal BAST	Jenis Hibah yang Diterima	Nilai Aset	Nilai Konsolidasi	
									Nilai Penyusutan	Nilai Hibah
I	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO							8.000.000,00	-	8.000.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Kementrian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga	No. 535/BAST/Bb8.14/2023	10/02/2023	Paving Blok (Barang Pakai Habis)	8000000		8000000
II	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO									
III	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO									
IV	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO									
V	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO									

Bali, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali


Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721216 199803 1 006

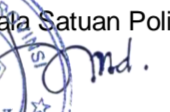
**Beban Dibayar Dimuka
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023**

No	Uraian	No. dan Tgl. Kontrak	Tgl Perjanjian		Masa Berlaku (Hari)	Belanja Dibayar Dimuka (Rp)	Beban per Hari (Rp)	Yang Telah Dibebankan s.d. (Hari)	Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	Dibebankan Semester I 2023 (Hari)	Beban Tahun 2023	Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2023	
			31/12/2023	31/12/2023									
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 6	9	10	11	12 = 11 x 8	13 = 7 - (8 * 9) - 12	
						NIHIL							
	Jumlah												


 Bali, 31 Desember 2023
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

 Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19721216 199803 1 006


Pendapatan Diterima Dimuka
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	NAMA PENYEWAWA/ PERUSAHAAN	URAIAN	LOKASI	TANGGAL PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PERIODE		NILAI TOTAL (Rp)	NILAI PER HARI (Rp)	JUMLAH HARI di 2023	PENDAPATAN LO TAHUN 2023 (Rp)	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023 (Rp)
							MULAI	BERAKHIR					
	JUMLAH												
					NIHIL								

Bali, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721216 199803 1 006

Kas Dana Bos
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2023

NO	KAB/KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENDAPATAN BOS REGULER 2023	PENDAPATAN BOS KINERJA 2023	KEMBALI KE KASDA TH. 2023	KOREKSI SALDO AUDITED 2022	PENGEMBALIAN BELANJA 2023	BELANJA BOS KINERJA 2023	BELANJA BOS REGULER 2023	BELANJA DARI SISA BOS 2021	SISA DANA BOS 2023	SISA DANA BOS REKENING KORAN
NIHIL														
TOTAL														

Bali, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721216 199803 1 006

Status Nihil

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAFTAR ASET YANG Pengerjaannya Tahun Jamak
PER 31 DESEMBER 2023
(Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Aset lainnya)

NO	Nama Aset	Nilai (Rp.)	% Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keterangan)*
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

Keterangan :

) * Nama Lokasi, Keterangan, Alamat Lokasi, Tahun dimulai, dll.



Bali, 31 Desember 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721216 199803 1 006

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAFTAR ASET DALAM PENYELESAIAN
PER 31 DESEMBER 2023
(Bangunan, Jalan, Jembatan, dan Aset lainnya)

NO	Nama Aset	Nilai (Rp.)	% Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keterangan)*
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Keterangan :

) * Nama Lokasi, Keterangan, Alamat Lokasi, Tahun dimulai, dll.

Bali, 31 Desember 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)


NIP. 19721216 199803 1 006

Status Nihil

LAMPIRAN V

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAFTAR ASET YANG DIKERJASAMAKAN
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Aset Yang Dikerjasamakan	Lokasi	Jenis Aset	Hak Tanah	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor	Luas m2	Nilai NJOP	Peruntukan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NIHIL										

Bali, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721216 199803 1 006




Status Sudah

LAMPIRAN VII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
RINGKASAN BELANJA DENGAN PENDEKATAN KAS
PER 31 DESEMBER 2023

BULAN	SP2D			SPJ	CONTRA POST (CP)			REALISASI	SISA DANA
	LS GAJI	LS BARJAS	UP/GU/TU		LS GAJI	LS BARJAS	UP/GU/TU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2+3+5-6-7	10 = 4-5-8
Januari	1.399.627,047	0,00	300.000,000	9.590.436,00	0,00	0,00	0,00	1409217483,00	290.409.564,00
Pebruari	1.405.056.583	1.849.546.848,00	0,00	122.002.322,00	0,00	0,00	0,00	4785823236,00	168.407.242,00
Maret	1.442.144.894,00	2.400.460.482,00	0,00	147.474.138,00	0,00	0,00	0,00	8775902750,00	20.933.104,00
April	2.439.868.634,00	1.965.417.985,00	279.066.896,00	151.986.771,00	0,00	0,00	0,00	13333176140,00	148.013.229,00
Mei	1.439.273.794,00	1.750.890.682,00	0,00	145.156.015,00	0,00	0,00	0,00	16668496631,00	2.857.214,00
Juni	1.454.799.188,00	2.034.041.658,00	297.142.786,00	219.815.063,00	0,00	0,00	0,00	20377152540,00	80.184.937,00
Juli	2.438.992.292,00	2.514.096.866,00	0,00	69.360.990,00	0,00	0,00	0,00	25399602688,00	10.823.947,00
Agustus	1.429.955.560,00	1.485.891.694,00	289.936.053,00	99.324.638,00	0,00	0,00	0,00	28414774580,00	201.435.362,00
September	1.371.796.857,00	1.760.349.682,00	0,00	96.411.593,00	0,00	0,00	0,00	31643332712,00	105.023.769,00
Oktober	1.423.608.341,00	1.762.604.516,00	0,00	42.701.970,00	0,00	0,00	0,00	34872247539,00	62.321.799,00
Nopember	1.368.100.427,00	2.064.739.848,00	0,00	18.049.942,00	0,00	0,00	0,00	38323137756,00	44.271.857,00
Desember	1.440.152.896,00	3.575.254.661,00	312.688.143,00	354.936.206,00				43693481519,00	2.023.794,00
	19.053.376.513,00	23.163.294.922,00	1.478.833.878,00	1.476.810.084,00	0,00	-	0,00	43693481519,00	2.023.794,00

LRA	Selisih
1.409.217.483	0,00
4.785.823.236	0,00
8.775.902.750	0,00
13.333.176.140	0,00
16.668.496.631	0,00
20.377.152.540	0,00
25.399.602.688	0,00
28.414.774.580	0,00
31.643.332.712	0,00
34.872.247.539	0,00
38.323.137.756	0,00
43.693.481.519	0,00

Bali, 31 Desember 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19721216 199803 1 006

PROVINSI BALI

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

22.00/04.0/000002/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023

Nomor SPM : 22.00/03.0/000002/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/M/1/2023
 Tanggal : 11 Januari 2023
 SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Dari : Kuasa BUD
 Tahun Anggaran : 2023

Bank Pengirim : Bank BPD BALI

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 010.01.0000000-1
 Uang sebesar Rp776.563.254 (terbilang: tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)

Kepada : Terlampir
 NPWP : Terlampir
 No. Rekening Bank : Terlampir
 Bank Penerima : Terlampir
 Keperluan Untuk : Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja ASN pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Bulan Desember Tahun 2022
 Pagu Anggaran : Rp12.159.580.962

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp776.563.254
2	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp776.563.254
3	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp310.625.301
4	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp465.937.953
Jumlah			Rp776.563.254

Potongan-potongan

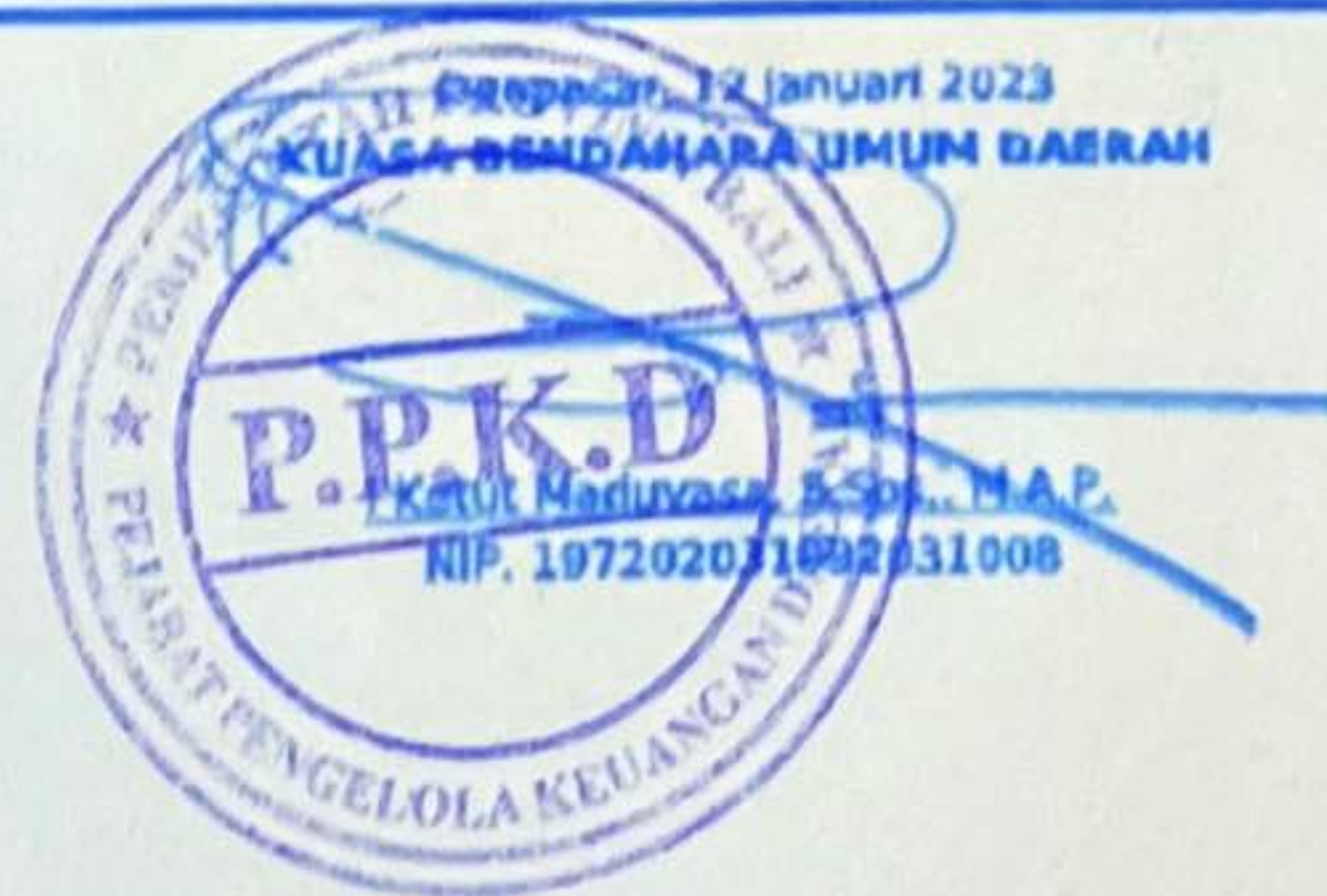
(tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) :

No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)
1.	PPH 21	59.573.239
2.	Iuran Wajib Pegawai 8%	0
3.	Iuran Wajib Pegawai 1%	0
4.	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	0
5.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0
6.	Iuran Jaminan Kematian	0
7.	Tapera	0
8.	Zakat	0
9.	Bulog	0
Jumlah		59.573.239

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp776.563.254
Jumlah Potongan	Rp59.573.239
Jumlah Netto	Rp716.990.015
Jumlah yang Dibayarkan	Rp776.563.254

Uang Sejumlah: tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah



- Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3: Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4: Pihak Penerima



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi : IBB8355913
Tanggal / Jam : 16-Jan-2023 / 08:26:06 WITA
Pembayaran : Telkom Bill Payment
Nomor Telepon : 0361245396
Nama : KTR.MAWIL HANSIP PROP.BALI
Month/Year : Jan23
Biller Reference : 301A
Bill Amount : Rp.
: 819,957
Biaya Admin : Rp.
: 2,000
Total Tagihan : Rp.
: 821,957
Jenis Transaksi : Transaksi Sekarang
Status : Sukses

Terima Kasih
Internet Banking BPD Bali. All right reserved.

* Duplikat *

Bank BPD Bali Internet Banking

16-Jan-2023 / 08:25:43

000008355884

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 551001738164
NAMA : KTR MAWIL HANSIP
TARIF/DAYA : P1/41500VA
BL/TH : Jan23
STAND METER : 00181265-00186416
RP TAG PLN : Rp. 8.765.979
NO REF : 01291495D6D11583DA45309431058FE3

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp. 2.500
TOTAL BAYAR : Rp. 8.768.479

Terima Kasih

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"



BERITA ACARA SERAH TERIMA BMN BERUPA BONGKARAN PAVING
NOMOR : 535/BAST/Bb8.14/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **I Nyoman Yasmara, ST., MT.**
NIP : 19840501 201012 1 002
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Bali yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Nama : **I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH,M.Si.**
NIP : 19721216 199803 1 006
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
5. Keputusan Manteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 75/KPTS/M/2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian PUPR.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
8. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Nomor B.36.331/4657/Set/Satpol PP.

Kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara berupa Bongkaran Paving Blok dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal - pasal dibawah ini :

Pasal 1

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Nomor B.36.331/4657/Set/Satpol PP, sambil menunggu Surat Persetujuan Pemindahtanganan BMN keluar, maka dalam rangka percepatan **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA** menerima hak atas Barang Milik Negara berupa Bongkaran Paving Blok dari **PIHAK KESATU**, sebanyak 400,00 (empat ratus) M² dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 2,.....

Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini, maka tanggung jawab material fisik dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada pasal (1) beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

1. Lampiran Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,
Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali,



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH, M.Si.
NIP. 19711216 199803 1 006

PIHAK KESATU,
Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi Bali,



I Nyoman Yasmara, ST., MT.
NIP. 19810501 201012 1 002

Lampiran Berita Acara Serah Terima BMN
Nomor : 535/BAST/BBB.14/2023
Tanggal : 10 Februari 2023

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA BONGKARAN PAVING
PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI BALI
YANG DI HIBAHKAN
KEPADA POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI**

NO	Uraian Barang Milik Negara		Kuantitas	Nilai Perolehan (Rp)	Tahun Perolehan	Lokasi	Keterangan
	Kode Barang	Uraian Barang					
I	Barang Habis Pakai						
1	1010101013000005	Paving Blok	400.00	8.000.000	2022	Bali	
		Total	400.00				

PIHAK KEDUA,
Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali,



PIHAK KESATU,
Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Pelaksanaan Wilayah III
Provinsi Bali





ບົດຄຳສັ່ງຖານະບັນຍັດ ທາລິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ກະຊວງທຸກໆທີ່ ທາລິ
SEKRETARIAT DAERAH

ຄະນະທີ່ ທາລິ ທາລິ ທາລິ - ທາລິ (ບັນຍັດ) ທາລິ ທາລິ (ບັນຍັດ) ທາລິ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR B.13.028/2592/PBMD/BPKAD

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI PADA 2 (DUA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Persetujuan Gubernur Bali Nomor B.13.028/8501/PBMD/BPKAD, tanggal 23 Desember 2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan penjualan kepada masyarakat umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 434 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada 2 (dua) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2012, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali berupa Barang Inventaris kondisi rusak berat pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp124.283.850,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp393.442.566,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Maret 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Keputusan Pengelola Barang
 Nomor : B.13.028/2592/PBMD/BPKAD
 Tanggal : 30 Maret 2023

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI
 PADA 2 (DUA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI												
a. Barang Intra Komptabel												
1	1.3.2.05.002.004.004	000027	A.C. Split	2014	1	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	1.3.2.05.002.004.004	000028	A.C. Split	2014	1	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.05.001.003.017	000001	Alat Reproduksi lainnya	2005	18	4.749.525,00	85.491.450,00	85.491.450,00	0	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	Rusak Berat	Tercatat 1 (satu) register
4	1.3.2.10.001.002.001	0005	Komputer Personal (P.C Unit)	2013	1	10.509.200,00	10.509.200,00	10.509.200,00	0	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.10.001.002.001	0009	Komputer Personal (P.C Unit)	2013	1	10.509.200,00	10.509.200,00	10.509.200,00	0	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.10.001.002.001	0003	Komputer Personal (P.C Unit)	2008	1	7.274.000,00	7.274.000,00	7.274.000,00	0	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Rusak Berat	
Jumlah 1					23	43.541.925,00	124.283.850,00	124.283.850,00	0			
2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI												
a. Barang Intra Komptabel												
1	1.3.2.06.002.001.006	000010	Handy Talky (HT)	2009	1	5.973.000,00	5.973.000,00	5.973.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1.3.2.06.002.001.006	000014	Handy Talky (HT)	2009	1	5.973.000,00	5.973.000,00	5.973.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.06.002.001.006	000018	Handy Talky (HT)	2010	1	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	1.3.2.06.002.001.006	000019	Handy Talky (HT)	2010	1	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.06.002.001.006	000020	Handy Talky (HT)	2010	1	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.06.002.001.006	000021	Handy Talky (HT)	2010	1	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	1.3.2.06.002.001.006	000022	Handy Talky (HT)	2010	1	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	1.3.2.06.002.001.006	000023	Handy Talky (HT)	2010	1	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	1.3.2.06.002.001.006	000024	Handy Talky (HT)	2010	1	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	1.3.2.06.002.001.006	000050	Handy Talky (HT)	2010	1	3.329.700,00	3.329.700,00	3.329.700,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	1.3.2.06.002.001.006	000049	Handy Talky (HT)	2011	1	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	1.3.2.06.002.001.006	000065	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	1.3.2.06.002.001.006	000066	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
14	1.3.2.06.002.001.006	000067	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	1.3.2.06.002.001.006	000068	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	1.3.2.06.002.001.006	000069	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	1.3.2.06.002.001.006	000070	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
18	1.3.2.06.002.001.006	000071	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	1.3.2.06.002.001.006	000072	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	1.3.2.06.002.001.006	000073	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
21	1.3.2.06.002.001.006	000074	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
22	1.3.2.06.002.001.006	000075	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
23	1.3.2.06.002.001.006	000076	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
24	1.3.2.06.002.001.006	000077	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
25	1.3.2.06.002.001.006	000078	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	1.3.2.06.002.001.006	000079	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
27	1.3.2.06.002.001.006	000080	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
28	1.3.2.06.002.001.006	000081	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
29	1.3.2.06.002.001.006	000082	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
30	1.3.2.06.002.001.006	000083	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
31	1.3.2.06.002.001.006	000084	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
32	1.3.2.06.002.001.006	000085	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
33	1.3.2.06.002.001.006	000086	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
34	1.3.2.06.002.001.006	000087	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
35	1.3.2.06.002.001.006	000088	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
36	1.3.2.06.002.001.006	000089	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
37	1.3.2.06.002.001.006	000090	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
38	1.3.2.06.002.001.006	000091	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	1.3.2.06.002.001.006	000092	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
40	1.3.2.06.002.001.006	000093	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
41	1.3.2.06.002.001.006	000094	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
42	1.3.2.06.002.001.006	000095	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
43	1.3.2.06.002.001.006	000096	Handy Talky (HT)	2012	1	3.716.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
44	1.3.2.10.002.003.003	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	1	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
45	1.3.2.10.002.003.003	000011	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
46	1.3.2.10.002.003.003	000014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1	4.785.000,00	4.785.000,00	4.785.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
47	1.3.2.05.002.004.004	000011	A.C. Split	2011	1	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
48	1.3.2.05.002.004.004	000016	A.C. Split	2013	1	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
49	1.3.2.05.002.006.077	000004	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
50	1.3.2.19.001.003.021	000005	Peralatan Senam lainnya	2006	1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
51	1.3.2.06.002.001.003	000001	Pesawat Telephone	2011	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	1.3.2.06.002.001.003	000002	Pesawat Telephone	2011	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
53	1.3.2.10.001.002.003	000003	Note Book	2010	1	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
54	1.3.2.10.001.002.001	000022	P.C Unit	2017	1	11.248.933,00	11.248.933,00	11.248.933,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
55	1.3.2.10.001.002.001	000025	P.C Unit	2017	1	11.248.933,00	11.248.933,00	11.248.933,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
56	1.3.2.10.001.002.001	000019	P.C Unit	2014	1	9.975.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
57	1.3.2.10.002.003.001	000002	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2010	1	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
58	1.3.2.10.002.003.001	000008	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2009	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
59	1.3.2.10.002.003.001	000009	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2009	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
60	1.3.2.10.002.003.001	000010	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2009	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
61	1.3.2.10.002.003.002	000001	Monitor	2009	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
62	1.3.2.10.002.003.002	000002	Monitor	2009	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
63	1.3.2.10.002.003.002	000003	Monitor	2009	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
64	1.3.2.10.002.003.002	000004	Monitor	2009	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	1.3.2.06.001.002.003	000001	Camera Electronic	2010	1	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
66	1.3.2.06.001.002.003	000003	Camera Electronic	2010	1	8.295.000,00	8.295.000,00	8.295.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
67	1.3.2.06.001.002.003	000005	Camera Electronic	2011	1	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
68	1.3.2.06.001.002.003	000008	Camera Electronic	2012	1	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
69	1.3.2.05.002.006.002	000004	Televisi	2011	1	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
70	1.3.2.05.002.001.030	000022	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
71	1.3.2.05.002.001.030	000023	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
72	1.3.2.05.002.001.030	000024	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
73	1.3.2.05.002.001.030	000025	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
74	1.3.2.05.002.001.030	000026	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
75	1.3.2.05.002.001.030	000027	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
76	1.3.2.05.002.001.030	000028	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
77	1.3.2.05.002.001.030	000029	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	1.3.2.05.002.001.030	000030	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
79	1.3.2.05.002.001.030	000031	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
80	1.3.2.05.002.001.030	000032	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
81	1.3.2.05.002.001.030	000033	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
82	1.3.2.05.002.001.030	000034	Kursi Rapat	2013	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
83	1.3.2.05.002.001.030	000047	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
84	1.3.2.05.002.001.030	000048	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
85	1.3.2.05.002.001.030	000049	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
86	1.3.2.05.002.001.030	000050	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
87	1.3.2.05.002.001.030	000051	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
88	1.3.2.05.002.001.030	000052	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
89	1.3.2.05.002.001.030	000053	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
90	1.3.2.05.002.001.030	000054	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	1.3.2.05.002.001.030	000055	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
92	1.3.2.05.002.001.030	000056	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
93	1.3.2.05.002.001.030	000057	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
94	1.3.2.05.002.001.030	000058	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
95	1.3.2.05.002.001.030	000059	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
96	1.3.2.05.002.001.030	000060	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
97	1.3.2.05.002.001.030	000061	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
98	1.3.2.05.002.001.030	000062	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
99	1.3.2.05.002.001.030	000063	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
100	1.3.2.05.002.001.030	000064	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
101	1.3.2.05.002.001.030	000065	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
102	1.3.2.05.002.001.030	000066	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
103	1.3.2.05.002.001.030	000067	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	1.3.2.05.002.001.030	000068	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
105	1.3.2.05.002.001.030	000069	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
106	1.3.2.05.002.001.030	000070	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
107	1.3.2.05.002.001.030	000071	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
108	1.3.2.05.002.001.030	000072	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
109	1.3.2.05.002.001.030	000073	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
110	1.3.2.05.002.001.030	000074	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
111	1.3.2.05.002.001.030	000075	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
112	1.3.2.05.002.001.030	000076	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
113	1.3.2.05.002.001.030	000077	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
114	1.3.2.05.002.001.030	000078	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
115	1.3.2.05.002.001.030	000079	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
116	1.3.2.05.002.001.030	000080	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	1.3.2.05.002.001.030	000081	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
118	1.3.2.05.002.001.030	000082	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
119	1.3.2.05.002.001.030	000083	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
120	1.3.2.05.002.001.030	000084	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
121	1.3.2.05.002.001.030	000085	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
122	1.3.2.05.002.001.030	000086	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
123	1.3.2.05.002.001.030	000087	Kursi Rapat	2014	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
124	1.3.2.05.002.001.032	000001	Kursi Putar	2003	1	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
125	1.3.2.05.002.001.039	000001	Meja Komputer	2009	1	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
126	1.3.2.05.002.001.039	000002	Meja Komputer	2009	1	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah a					126	392.017.566,00	392.017.566,00	392.017.566,00	0			
b. Barang Ekstra Kompatabel												
1	1.3.2.05.002.001.032	000002	Kursi Putar	2003	1	425.000,00	425.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	1.3.2.05.002.001.032	000003	Kursi Putar	2003	1	425.000,00	425.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.05.002.001.032	000004	Kursi Putar	2003	1	425.000,00	425.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1.3.2.05.002.002.003	000001	Jam Elektronik	2011	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah b					4	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-			
Jumlah 2					130	393.442.566,00	393.442.566,00	392.017.566,00	0			
Jumlah Total (1 + 2)					153	436.984.491,00	517.726.416,00	516.301.416,00	0			
						(Empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)	(Lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah)	(Lima ratus enam belas juta tiga ratus satu ribu empat ratus enam belas rupiah)				

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



පළාත ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමූහකලී ගාමිණී පාලන

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

සමූහකලී ගාමිණී පාලන විකල්ප ගාමිණී පාලන (පළාත ප්‍රාදේශීය) විකල්ප ගාමිණී පාලන
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon: (0361) 245396
Website : www.satpolpp.baliprov.go.id

BERITA ACARA REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA

Nomor : B.36.032/4224/Set/SatpolPP

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami melakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebesar Rp. 419.998.549 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). Adapun daftar barang yang dilakukan reklasifikasi sebagaimana daftar terlampir.

Berita Acara Reklasifikasi ini dibuat rangkap 2 (dua) dipergunakan untuk arsip atau dokumen pada OPD/UPB, dan 1 (satu) rangkap dapat disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Bali sebagai laporan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penatausahaan Barang
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I Putu Ricard Yuanta Putra S.STP.MAP
NIP. 19910913 201206 1 001

Pengurus Barang
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I Wayan Parna, S.Sos
NIP. 19750822 200701 1 017

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH, M.Si
NIP. 19721216 199803 1 006

DAFTAR BARANG REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA

Urut	Nomor			Nama / Jenis Barang	Mark/Type	No Sertifikat No Faktur	Bahan	Aksi/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Luasan Barang / Konstruksi	Satuan	Kondisi Barang (% K/L H/B)	Jumlah		Nilai Buku	Penyusutan	Ket
	Kode Barang	Registrasi											Barang	Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
(A). Barang Inti Kompetibel																	
1	00.00.01.04.001	000001	Spesika Motor	SUZUKI GS 250	M-80525017-102057	Gasal	Pembelian	2001	200		unit	RD	1	20.000,000	-	20.000,000	
2	00.10.01.00.000	000002	Headbuk	Bony V840 VPC3113PG-Black		metil	Pembelian	2010			unit	RB	1	14.200,000	-	14.200,000	
3	00.00.00.04.000	000003	A.C. Miodon	Dalton		metil	Pembelian	2004			unit	RD	1	12.000,000	-	12.000,000	
4	00.00.00.04.004	000013	A.C. Split	Panasonic / PC 1/2 MHP 1,5 pk		metil	Pembelian	2011			unit	RD	1	5.430,000	-	5.430,000	
5	00.00.00.04.004	000013	A.C. Split	Panasonic / PC 1/2 MHP 1,5 pk		metil	Pembelian	2011			unit	RD	1	5.430,000	-	5.430,000	
6	00.00.00.04.004	000017	A.C. Split	LG 2PK / S 10 LFD		metil	Pembelian	2013			unit	RD	1	7.480,000	-	7.480,000	
7	00.00.00.01.000	000110	Kursi Repat	Chitose / Caster N		besi	Pembelian	2013			buah	RD	1	710,000	-	710,000	
8	00.00.00.01.000	000111	Kursi Repat	Chitose / Caster N		besi	Pembelian	2013			buah	RD	1	710,000	-	710,000	
9	00.00.00.01.000	000112	Kursi Repat	Chitose / Caster N		besi	Pembelian	2013			buah	RD	1	710,000	-	710,000	
10	00.10.00.00.000	000000	Printer (Pembelian Personal Komputer)	HP LaserJet		metil	Pembelian	2009			buah	RD	1	4.930,000	-	4.930,000	
11	00.10.00.00.000	000010	Printer (Pembelian Personal Komputer)	Injet Epson		metil	Pembelian	2010			buah	RD	1	4.730,000	-	4.730,000	
12	00.10.00.00.000	000018	Printer (Pembelian Personal Komputer)	Injet Epson		metil	Pembelian	2010			buah	RD	1	4.730,000	-	4.730,000	
13	00.10.00.00.000	000020	Printer (Pembelian Personal Komputer)	HP LaserJet		metil	Pembelian	2017			buah	RD	1	5.770,000	-	5.770,000	
14	00.10.00.00.000	000024	Printer (Pembelian Personal Komputer)	HP LaserJet		metil	Pembelian	2017			buah	RD	1	5.770,000	-	5.770,000	
15	00.10.00.00.000	000023	Printer (Pembelian Personal Komputer)	HP LaserJet		metil	Pembelian	2017			buah	RD	1	5.770,000	-	5.770,000	
16	00.10.00.00.000	000026	Printer (Pembelian Personal Komputer)	HP LaserJet		metil	Pembelian	2017			buah	RD	1	5.770,000	-	5.770,000	
17	00.10.00.00.000	000027	Printer (Pembelian Personal Komputer)	HP LaserJet		metil	Pembelian	2017			buah	RD	1	5.770,000	-	5.770,000	
18	00.10.00.00.000	000028	Printer (Pembelian Personal Komputer)	HP LaserJet		metil	Pembelian	2017			buah	RD	1	5.770,000	-	5.770,000	
19	00.06.00.01.000	000012	Handset Telepon	Panasonic / KX-TS 505 BX			Pembelian	2011			buah	RD	1	1.130,000	-	1.130,000	
20	00.10.00.00.000	000005	Monitor			metil	Pembelian	2009			unit	RB	1	2.000,000	-	2.000,000	
21	00.10.00.00.000	000006	Monitor			metil	Pembelian	2009			unit	RD	1	2.000,000	-	2.000,000	
22	00.10.00.00.000	000009	Monitor			metil	Pembelian	2010			unit	RB	1	2.000,000	-	2.000,000	
23	00.10.00.00.000	000010	Monitor			metil	Pembelian	2010			unit	RD	1	2.000,000	-	2.000,000	
24	00.10.01.00.001	000010	P/C Dual	LG		metil	Pembelian	2011			unit	RD	1	9.900,000	-	9.900,000	
25	00.10.01.00.001	000011	P/C Dual	LG		metil	Pembelian	2011			unit	RB	1	9.900,000	-	9.900,000	
26	00.10.01.00.001	000027	P/C Dual	HP Pro One		metil	Pembelian	2017			unit	RD	1	11.248,935	-	11.248,935	
27	00.06.00.01.000	000101	Handy Talky (HT)	Motorola			Pembelian	2017			unit	RB	1	6.138,507	-	6.138,507	
28	00.06.00.01.000	000102	Handy Talky (HT)	Motorola			Pembelian	2017			unit	RD	1	6.138,507	-	6.138,507	
29	00.06.00.01.000	000008	Dual Pemasang MP/MW Stasioner	Motorola/ Pogester			sthan	2006			unit	RD	1	30.000,000	-	30.000,000	

Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	No Detail / No Faktur	Bahan	Mer/Ln/Perseoran/Barang	Uraian Perseoran	Uraian Barang Konstruksi	Satuan	(Rp. Rib. Rib)	Jumlah	Harga	Alok. Buku	Persediaan	Kat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	02.06.03.01.000	000009	Unit Pemancar MF/MW Stationary	Motrola / Raycester				buah	2006	unit	RD	1	30.000.000	-	30.000.000	
31	02.06.03.01.000	000010	Unit Pemancar MF/MW Stationary	Motrola / Raycester				buah	2006	unit	RD	1	30.000.000	-	30.000.000	
32	02.06.03.02.000	000001	Unit Pemancar HF/YW Stationary	Revita / O		besi		Pembelian	2006	unit	RD	1	20.000.000	-	20.000.000	
33	02.06.03.02.000	000002	Unit Pemancar HF/YW Stationary	Revita / O		besi		Pembelian	2008	unit	RD	1	49.745.000	-	49.745.000	
34	02.05.02.06.077	000005	Alat Pemisah Tenaga Lain-lain	borgol / O		besi		Pembelian	2004	buah	RD	1	3.000.000	-	3.000.000	
35	02.05.02.06.082	000002	Tabung	L-G / Metal				Pembelian	2003	unit	RD	1	4.500.000	-	4.500.000	
36	02.05.02.06.082	000003	Tabung	L-G / O		metal		Pembelian	2003	unit	RD	1	3.000.000	-	3.000.000	
37	02.05.02.06.080	000001	Tabung	L/O 20FP4RL				Pembelian	2011	unit	RD	1	3.633.000	-	3.633.000	
Jumlah Intra Kompartabel												37	408.058.048	-	408.058.048	
(B). Barang Ekstra Kompartabel																
1	02.05.01.01.001	000001	Mesin Sisir (Metal) Longengem (20-27 Inch)	OLMETI / O				Pembelian	1980	unit	RD	1	100.000	-	100.000	
2	02.05.02.06.077	000005	Alat Pemisah Tenaga Lain-lain	Meteran Groses				Pembelian	2012	buah	RD	1	245.000	-	245.000	
3	02.05.02.06.077	000006	Alat Pemisah Tenaga Lain-lain	Meteran Groses				Pembelian	2012	buah	RD	1	245.000	-	245.000	
4	02.05.02.06.077	000007	Alat Pemisah Tenaga Lain-lain	Meteran gulung				Pembelian	2012	buah	RD	1	45.000	-	45.000	
5	02.05.02.06.077	000008	Alat Pemisah Tenaga Lain-lain	Meteran gulung				Pembelian	2012	buah	RD	1	80.000	-	80.000	
6	02.05.02.06.077	000009	Alat Pemisah Tenaga Lain-lain	Meteran gulung				Pembelian	2012	buah	RD	1	90.000	-	90.000	
7	02.05.02.06.077	000010	Alat Pemisah Tenaga Lain-lain	Meteran gulung				Pembelian	2012	buah	RD	1	85.000	-	85.000	
8	02.05.01.04.001	000001	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
9	02.05.01.04.001	000002	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
10	02.05.01.04.001	000003	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
11	02.05.01.04.001	000004	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
12	02.05.01.04.001	000005	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
13	02.05.01.04.001	000006	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
14	02.05.01.04.001	000007	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
15	02.05.01.04.001	000008	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
16	02.05.01.04.001	000009	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
17	02.05.01.04.001	000010	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
18	02.05.01.04.001	000011	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
19	02.05.01.04.001	000012	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
20	02.05.01.04.001	000013	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
21	02.05.01.04.001	000014	Rak Besi	Rak susun				Pembelian	2012	buah	RD	1	190.000	-	190.000	
22	02.05.02.03.000	000002	Jas Listrik	Selko				Pembelian	2011	buah	RD	1	150.000	-	150.000	
23	02.05.02.03.000	000003	Jas Listrik	Selko				Pembelian	2011	buah	RD	1	150.000	-	150.000	
24	02.05.02.03.000	000004	Jas Listrik	Selko				Pembelian	2011	buah	RD	1	150.000	-	150.000	
25	02.05.02.03.000	000005	Jas Listrik	Selko				Pembelian	2011	buah	RD	1	150.000	-	150.000	
26	02.05.02.03.000	000007	Jas Listrik	Selko				Pembelian	2011	buah	RD	1	150.000	-	150.000	

Uraian	Kode Barang	Reguler	Nama / Jenis Barang	ManuType	No Serah/No Faktur	Bahan	AMBIKUN/REVISI/Barang	Uraian/Revisi	Uraian/Revisi	Satuan	(B. Kd. Rp)	Barang	Harga	Nilai Buku	Penjualan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	02.05.01.04.000	00006	Flang Cahaya New	Elita75 / besi			Pembelian	2010		buah	RB	1	382.500	-	382.500	
	02.05.01.02.001	00008	Lubam Cat Air				Pembelian	2012		buah	RB	1	495.000	-	495.000	
	02.05.01.02.001	00017	Lubam Cat Air				Pembelian	2012		buah	RB	1	495.000	-	495.000	
	02.05.01.02.001	00018	Lubam Cat Air				Pembelian	2012		buah	RB	1	495.000	-	495.000	
	02.05.02.00.007	00004	Guru Baju Pakaian Serius V			katun	Pembelian	2010		buah	RB	1	400.000	-	400.000	
	02.05.02.00.007	00002	Guru Baju Pakaian Serius V			katun	Pembelian	2010		buah	RB	1	400.000	-	400.000	
	02.05.02.00.007	00003	Guru Baju Pakaian Serius V			katun	Pembelian	2010		buah	RB	1	400.000	-	400.000	
	02.05.02.00.007	00004	Guru Baju Pakaian Serius V			katun	Pembelian	2010		buah	RB	1	400.000	-	400.000	
	02.05.02.00.007	00005	Guru Baju Pakaian Serius V			katun	Pembelian	2010		buah	RB	1	400.000	-	400.000	
	02.05.02.00.007	00006	Guru Baju Pakaian Serius V			katun	Pembelian	2010		buah	RB	1	400.000	-	400.000	
	02.05.02.01.036	00072	Guru Lapis	chitose			Pembelian	2008		buah	RB	1	265.000	-	265.000	
	02.05.02.01.036	00073	Guru Lapis	chitose			Pembelian	2008		buah	RB	1	265.000	-	265.000	
	02.05.02.01.036	00074	Guru Lapis	chitose			Pembelian	2008		buah	RB	1	265.000	-	265.000	
	02.05.02.01.036	00075	Guru Lapis	chitose			Pembelian	2008		buah	RB	1	265.000	-	265.000	
	02.05.02.01.036	00076	Guru Lapis	chitose			Pembelian	2008		buah	RB	1	265.000	-	265.000	
	02.05.02.01.036	00077	Guru Lapis	chitose			Pembelian	2008		buah	RB	1	265.000	-	265.000	
	02.05.02.01.036	00078	Guru Lapis	chitose			Pembelian	2008		buah	RB	1	265.000	-	265.000	
Jumlah Bata Kompetabel																
Jumlah Total												42	18.342.500	-	18.342.500	
												79	419.908.548	-	419.908.548	

Peserta Penatausahaan Barang
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

 Prita Rizka Yudianto Putra S.STP, MAF
 NP. 19810913 201208 1 001

Pengurus Barang
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

 I Wayan Prana, S.Sos
 NP. 19750822 200701 1 017

Mengatakan
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Provinsi Bali

 Dewa Mahan Rai Darmadi, Ssi, M.Si
 NP. 19721216 198002 1 008



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Aset Tetap				11,304,203,643							
2		PERALATAN DAN MESIN		9,482,062,643			8,747,446,211	139,480,073	135,815,777	9,022,742,061	459,320,582
1.3.2.1		ALAT BESAR									
1.3.2.1.1		ALAT BESAR DARAT		140,000,000			140.000.000	0	0	140.000.000	0
1.3.2.1.1.10		ALAT PENGANGKAT		140,000,000			140.000.000	0	0	140.000.000	0
1.3.2.1.1.10.1	2	Tower Crane	12 2006	140,000,000	0	0	140.000.000	0	0	140.000.000	0
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		6,398,283,200			5.976.307.326	73.348.959	73.348.960	6.123.005.245	275,277,955
1.3.2.2.1.1		KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		4,201,435,300			3.885.240.170	58.696.995	58.696.995	4.002.634.160	198,801,140
1.3.2.2.1.1.3	2	Station Wagon	12 1994	30,000,000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	4	Station Wagon	10 2010	402,204,900	0	0	402.204.900	0	0	402.204.900	0
1.3.2.2.1.1.3	5	Station Wagon	7 2010	131,000,000	0	0	131.000.000	0	0	131.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	6	Station Wagon	7 2010	131,000,000	0	0	131.000.000	0	0	131.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	7	Station Wagon	10 2011	145,400,000	0	0	145.400.000	0	0	145.400.000	0
1.3.2.2.1.1.3	8	Station Wagon	10 2011	145,400,000	0	0	145.400.000	0	0	145.400.000	0
1.3.2.2.1.1.3	9	Station Wagon	4 2012	192,139,200	0	0	192.139.200	0	0	192.139.200	0
1.3.2.2.1.1.3	10	Station Wagon	4 2012	194,009,200	0	0	194.009.200	0	0	194.009.200	0
1.3.2.2.1.1.3	12	Station Wagon	12 1996	90,000,000	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	13	Station Wagon	12 2015	203,000,000	0	0	203.000.000	0	0	203.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	14	Station Wagon	12 2015	203,000,000	0	0	203.000.000	0	0	203.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	15	Station Wagon	12 2015	203,000,000	0	0	203.000.000	0	0	203.000.000	0
1.3.2.2.1.1.3	16	Station Wagon	12 2015	252,440,000	0	0	252.440.000	0	0	252.440.000	0
1.3.2.2.1.1.3	17	Station Wagon	12 2015	412,700,000	0	0	412.700.000	0	0	412.700.000	0
1.3.2.2.1.1.3	18	Station Wagon	12 2015	274,040,000	0	0	274.040.000	0	0	274.040.000	0
1.3.2.2.1.1.3	19	Station Wagon	8 2019	508,212,000	2	7	247.981.156	36.311.281	36.311.280	320.603.717	187,608,283
1.3.2.2.1.1.3	20	Station Wagon	4 2017	313,400,000	0	3	257.435.714	22.385.714	22.385.715	302.207.143	11,192,857
1.3.2.2.1.1.6	2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	9 2012	370,490,000	0	0	370.490.000	0	0	370.490.000	0
1.3.2.2.1.2		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		177,950,000			177.950.000	0	0	177.950.000	0
1.3.2.2.1.2.3	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12 2013	177,950,000	0	0	177.950.000	0	0	177.950.000	0
1.3.2.2.1.3		KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG		1,031,914,900			1.031.914.900	0	0	1.031.914.900	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.2.1.3.2	1	Pick Up	6 2008	121,630,000	0	0	121.630.000	0	0	121.630.000	0
1.3.2.2.1.3.2	2	Pick Up	10 2010	365,440,100	0	0	365.440.100	0	0	365.440.100	0
1.3.2.2.1.3.2	3	Pick Up	9 2012	182,194,800	0	0	182.194.800	0	0	182.194.800	0
1.3.2.2.1.3.2	4	Pick Up	11 2013	362,650,000	0	0	362.650.000	0	0	362.650.000	0
1.3.2.2.1.4		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		434,183,000			392.359.399	3.023.393	3.023.393	398.406.185	35,776,815
1.3.2.2.1.4.1	2	Sepeda Motor	12 2001	20,000,000	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	5	Sepeda Motor	12 2006	9,518,000	0	0	9.518.000	0	0	9.518.000	0
1.3.2.2.1.4.1	6	Sepeda Motor	12 2010	34,750,000	0	0	34.750.000	0	0	34.750.000	0
1.3.2.2.1.4.1	7	Sepeda Motor	12 2010	34,750,000	0	0	34.750.000	0	0	34.750.000	0
1.3.2.2.1.4.1	8	Sepeda Motor	11 2011	15,190,000	0	0	15.190.000	0	0	15.190.000	0
1.3.2.2.1.4.1	9	Sepeda Motor	12 2012	29,416,750	0	0	29.416.750	0	0	29.416.750	0
1.3.2.2.1.4.1	10	Sepeda Motor	12 2012	29,416,750	0	0	29.416.750	0	0	29.416.750	0
1.3.2.2.1.4.1	11	Sepeda Motor	12 2015	30,850,000	0	0	30.850.000	0	0	30.850.000	0
1.3.2.2.1.4.1	12	Sepeda Motor	12 2015	30,850,000	0	0	30.850.000	0	0	30.850.000	0
1.3.2.2.1.4.1	13	Sepeda Motor	12 2015	30,850,000	0	0	30.850.000	0	0	30.850.000	0
1.3.2.2.1.4.1	14	Sepeda Motor	12 2015	30,850,000	0	0	30.850.000	0	0	30.850.000	0
1.3.2.2.1.4.1	15	Sepeda Motor	12 2015	30,850,000	0	0	30.850.000	0	0	30.850.000	0
1.3.2.2.1.4.1	16	Sepeda Motor	12 2015	30,850,000	0	0	30.850.000	0	0	30.850.000	0
1.3.2.2.1.4.1	17	Sepeda Motor	12 2015	16,857,000	0	0	16.857.000	0	0	16.857.000	0
1.3.2.2.1.4.1	18	Sepeda Motor	12 2015	16,857,000	0	0	16.857.000	0	0	16.857.000	0
1.3.2.2.1.4.1	19	Sepeda Motor	12 2022	42,327,500	5	11	503.899	3.023.393	3.023.393	6.550.685	35,776,815
1.3.2.2.1.6		KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS		552,800,000			488.842.857	11.628.571	11.628.572	512.100.000	40,700,000
1.3.2.2.1.6.19	1	Mobil Unit Kesehatan Hewan	6 2013	390,000,000	0	0	390.000.000	0	0	390.000.000	0
1.3.2.2.1.6.110	1	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	10 2018	162,800,000	1	9	98.842.857	11.628.571	11.628.572	122.100.000	40,700,000
1.3.2.2.2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		21,000,000			21.000.000	0	0	21.000.000	0
1.3.2.2.2.2		KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG		21,000,000			21.000.000	0	0	21.000.000	0
1.3.2.2.2.2.1	1	Sepeda	11 2017	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.2.1	2	Sepeda	11 2017	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.2.1	3	Sepeda	11 2017	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.2.1	4	Sepeda	11 2017	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.2.1	5	Sepeda	11 2017	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.2.2.1	6	Sepeda	11 2017	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.1	7	Sepeda	1 2018	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.1	8	Sepeda	1 2018	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.1	9	Sepeda	1 2018	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.1	10	Sepeda	1 2018	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.1	11	Sepeda	1 2018	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.2.2.1	12	Sepeda	1 2018	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		227,430,000			225.367.500	495.000	495.000	226.357.500	1,072,500
1.3.2.5.1.4		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		222,480,000			222.480.000	0	0	222.480.000	0
1.3.2.5.1.4.2	4	Lemari Kayu	12 2003	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.1.4.2	5	Lemari Kayu	12 2003	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.1.4.2	6	Lemari Kayu	12 2005	8,725,000	0	0	8.725.000	0	0	8.725.000	0
1.3.2.5.1.4.2	7	Lemari Kayu	12 2005	8,725,000	0	0	8.725.000	0	0	8.725.000	0
1.3.2.5.1.4.4	1	Rak Kayu	12 2004	4,250,000	0	0	4.250.000	0	0	4.250.000	0
1.3.2.5.1.4.4	2	Rak Kayu	12 2004	4,250,000	0	0	4.250.000	0	0	4.250.000	0
1.3.2.5.1.4.4	3	Rak Kayu	12 2006	8,250,000	0	0	8.250.000	0	0	8.250.000	0
1.3.2.5.1.4.4	4	Rak Kayu	12 2006	8,250,000	0	0	8.250.000	0	0	8.250.000	0
1.3.2.5.1.4.4	5	Rak Kayu	12 2006	8,250,000	0	0	8.250.000	0	0	8.250.000	0
1.3.2.5.1.4.5	9	Filing Cabinet Besi	12 2006	2,000,000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
1.3.2.5.1.4.5	10	Filing Cabinet Besi	12 2006	2,000,000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
1.3.2.5.1.4.5	11	Filing Cabinet Besi	12 2006	2,000,000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
1.3.2.5.1.4.5	15	Filing Cabinet Besi	12 2004	4,700,000	0	0	4.700.000	0	0	4.700.000	0
1.3.2.5.1.4.5	16	Filing Cabinet Besi	12 2004	4,700,000	0	0	4.700.000	0	0	4.700.000	0
1.3.2.5.1.4.5	17	Filing Cabinet Besi	12 2006	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.1.4.5	18	Filing Cabinet Besi	12 2006	2,200,000	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0
1.3.2.5.1.4.5	21	Filing Cabinet Besi	7 2011	4,030,000	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	22	Filing Cabinet Besi	7 2011	4,030,000	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	23	Filing Cabinet Besi	7 2011	4,030,000	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	24	Filing Cabinet Besi	7 2011	4,030,000	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	25	Filing Cabinet Besi	7 2011	4,030,000	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	26	Filing Cabinet Besi	7 2011	4,030,000	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN		SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan	Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.4.5	27	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	28	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	29	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	30	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	31	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	32	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	33	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	34	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	35	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	36	Filing Cabinet Besi	7	2011	4,030,000	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	0
1.3.2.5.1.4.5	37	Filing Cabinet Besi	4	2014	2,500,000	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.5	38	Filing Cabinet Besi	4	2014	2,500,000	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.5	39	Filing Cabinet Besi	4	2014	2,500,000	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.3.2.5.1.4.5	40	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	41	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	42	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	43	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	44	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	45	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	46	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	47	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	48	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	49	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	50	Filing Cabinet Besi	6	2015	2,900,000	0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	51	Filing Cabinet Besi	5	2017	4,900,000	0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	52	Filing Cabinet Besi	5	2017	4,900,000	0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	53	Filing Cabinet Besi	5	2017	4,900,000	0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	54	Filing Cabinet Besi	5	2017	4,900,000	0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.4.5	55	Filing Cabinet Besi	5	2017	4,900,000	0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	0
1.3.2.5.1.4.7	2	Brandkas	11	2011	7,750,000	0	0	0	7.750.000	0	0	7.750.000	0
1.3.2.5.1.4.7	3	Brandkas	11	2011	7,850,000	0	0	0	7.850.000	0	0	7.850.000	0
1.3.2.5.1.5		ALAT KANTOR LAINNYA			4,950,000				2.887.500	495.000	495.000	3.877.500	1,072,500



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.5.88	1	Alat Kantor Lainnya	2 2020	4,950,000	1	1	2.887.500	495.000	495.000	3.877.500	1,072,500
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		809,262,000			642.201.153	36.219.433	36.975.641	715.396.227	93,865,773
1.3.2.5.2.1		MEUBELAIR		397,025,000			311.811.653	22.465.993	22.466.016	356.743.662	40,281,338
1.3.2.5.2.1.2	1	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	2	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	3	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	4	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	5	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	6	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	7	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	8	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	9	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	10	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	11	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.2	12	Meja Kerja Kayu	4 2017	3,025,000	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	0
1.3.2.5.2.1.4	21	Kursi Kayu	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	22	Kursi Kayu	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	23	Kursi Kayu	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	24	Kursi Kayu	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	25	Kursi Kayu	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.4	26	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	27	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	28	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	29	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	30	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	31	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	32	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	33	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	34	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	35	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	36	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	37	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.4	38	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	39	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	40	Kursi Kayu	9 2015	595,000	0	0	595.000	0	0	595.000	0
1.3.2.5.2.1.4	41	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	42	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	43	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	44	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	45	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	46	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	47	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	48	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	49	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	50	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	51	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.4	52	Kursi Kayu	4 2017	690,000	0	0	690.000	0	0	690.000	0
1.3.2.5.2.1.8	12	Meja Rapat	5 2013	25,500,000	0	0	25.500.000	0	0	25.500.000	0
1.3.2.5.2.1.8	13	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	14	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	15	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	16	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	17	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	18	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	19	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	20	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	21	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	22	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	23	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	24	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	25	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	26	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	27	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	28	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.8	29	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	30	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	31	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	32	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	33	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	34	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	35	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	36	Meja Rapat	10 2019	4,730,000	0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	709,500
1.3.2.5.2.1.8	37	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	38	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	39	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	40	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	41	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	42	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	43	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	44	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	45	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	46	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	47	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.8	48	Meja Rapat	4 2020	4,730,000	1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	1,182,500
1.3.2.5.2.1.24	9	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	10	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	12	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	14	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	15	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	16	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	17	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	18	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	32	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,700,000	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0
1.3.2.5.2.1.24	33	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	36	Meja 1/2 Biro	12 2009	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.2.1.24	37	Meja 1/2 Biro	12 2009	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.24	38	Meja 1/2 Biro	12 2009	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.2.1.24	39	Meja 1/2 Biro	12 2009	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.2.1.24	40	Meja 1/2 Biro	12 2009	1,980,000	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	0
1.3.2.5.2.1.24	41	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	42	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	43	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	44	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	45	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	46	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	47	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	48	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	49	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	50	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	51	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	52	Meja 1/2 Biro	12 2003	1,670,000	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	0
1.3.2.5.2.1.24	53	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	54	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	55	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	56	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.24	57	Meja 1/2 Biro	12 2004	1,200,000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0
1.3.2.5.2.1.30	35	Kursi Rapat	5 2013	1,150,000	0	0	1.150.000	0	0	1.150.000	0
1.3.2.5.2.1.30	36	Kursi Rapat	5 2013	1,150,000	0	0	1.150.000	0	0	1.150.000	0
1.3.2.5.2.1.30	88	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	89	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	90	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	91	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	92	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	93	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	94	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	95	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	96	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	97	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	98	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	99	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	100	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	101	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	102	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	103	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	104	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	105	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	106	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	107	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	108	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	109	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	113	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	114	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	115	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	116	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	117	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	118	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	119	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	120	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	121	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	122	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	123	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	124	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	125	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	126	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	127	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	128	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	129	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	130	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	131	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	132	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	133	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	134	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	135	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	136	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	137	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	138	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	139	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	140	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	141	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	142	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	143	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	144	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	145	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	146	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	147	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	148	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	149	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	150	Kursi Rapat	11 2019	2,265,833	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	377,639
1.3.2.5.2.1.30	151	Kursi Rapat	11 2019	2,265,841	0	10	1.435.032	226.584	226.584	1.888.200	377,641
1.3.2.5.2.1.31	1	Kursi Tamu	12 2002	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.2.1.31	5	Kursi Tamu	11 2011	3,920,000	0	0	3.920.000	0	0	3.920.000	0
1.3.2.5.2.1.31	6	Kursi Tamu	4 2014	2,000,000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
1.3.2.5.2.1.39	3	Meja Komputer	12 2009	550,000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
1.3.2.5.2.1.39	4	Meja Komputer	12 2009	550,000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
1.3.2.5.2.1.39	5	Meja Komputer	12 2009	550,000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
1.3.2.5.2.1.39	6	Meja Komputer	12 2009	550,000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
1.3.2.5.2.1.39	9	Meja Komputer	10 2010	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.39	10	Meja Komputer	10 2010	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.39	11	Meja Komputer	10 2010	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.39	12	Meja Komputer	10 2010	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.39	13	Meja Komputer	10 2010	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.39	14	Meja Komputer	12 2010	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.4		ALAT PENDINGIN		226,409,750			150.472.250	11.783.440	12.539.625	174.795.315	51,614,435
1.3.2.5.2.4.3	5	A.C. Window	12 2005	8,435,000	0	0	8.435.000	0	0	8.435.000	0
1.3.2.5.2.4.3	7	A.C. Window	12 2005	8,435,000	0	0	8.435.000	0	0	8.435.000	0
1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	5 2011	5,130,000	0	0	5.130.000	0	0	5.130.000	0
1.3.2.5.2.4.4	7	A.C. Split	5 2011	5,130,000	0	0	5.130.000	0	0	5.130.000	0
1.3.2.5.2.4.4	8	A.C. Split	5 2011	5,130,000	0	0	5.130.000	0	0	5.130.000	0
1.3.2.5.2.4.4	9	A.C. Split	5 2011	5,130,000	0	0	5.130.000	0	0	5.130.000	0
1.3.2.5.2.4.4	15	A.C. Split	10 2012	5,346,000	0	0	5.346.000	0	0	5.346.000	0
1.3.2.5.2.4.4	18	A.C. Split	9 2014	7,490,000	0	0	7.490.000	0	0	7.490.000	0
1.3.2.5.2.4.4	19	A.C. Split	6 2015	8,302,500	0	0	8.302.500	0	0	8.302.500	0
1.3.2.5.2.4.4	20	A.C. Split	7 2017	8,497,000	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	0
1.3.2.5.2.4.4	21	A.C. Split	7 2017	8,497,000	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	0
1.3.2.5.2.4.4	22	A.C. Split	7 2017	8,497,000	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	0
1.3.2.5.2.4.4	23	A.C. Split	7 2017	8,497,000	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	0
1.3.2.5.2.4.4	24	A.C. Split	7 2017	8,497,000	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	0
1.3.2.5.2.4.4	25	A.C. Split	7 2019	7,260,000	0	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	726,000
1.3.2.5.2.4.4	26	A.C. Split	7 2019	7,260,000	0	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	726,000
1.3.2.5.2.4.4	27	A.C. Split	7 2019	7,260,000	0	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	726,000
1.3.2.5.2.4.4	28	A.C. Split	7 2019	7,260,000	0	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	726,000
1.3.2.5.2.4.4	29	A.C. Split	7 2019	7,260,000	0	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	726,000
1.3.2.5.2.4.4	30	A.C. Split	4 2020	7,287,500	1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	1,821,875
1.3.2.5.2.4.4	31	A.C. Split	4 2020	7,287,500	1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	1,821,875
1.3.2.5.2.4.4	32	A.C. Split	4 2020	7,287,500	1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	1,821,875
1.3.2.5.2.4.4	33	A.C. Split	4 2020	7,287,500	1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	1,821,875
1.3.2.5.2.4.4	34	A.C. Split	4 2020	7,287,500	1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	1,821,875
1.3.2.5.2.4.4	35	A.C. Split	4 2020	7,287,500	1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	1,821,875
1.3.2.5.2.4.4	36	A.C. Split	2 2023	9,074,250	4	1	0	756.188	907.425	1.663.613	7,410,637
1.3.2.5.2.4.4	36	A.C. Split	2 2023	9,074,250	4	1	0	756.188	907.425	1.663.613	7,410,637
1.3.2.5.2.4.4	36	A.C. Split	2 2023	9,074,250	4	1	0	756.188	907.425	1.663.613	7,410,637
1.3.2.5.2.4.4	36	A.C. Split	2 2023	9,074,250	4	1	0	756.188	907.425	1.663.613	7,410,637
1.3.2.5.2.4.4	36	A.C. Split	2 2023	9,074,250	4	1	0	756.188	907.425	1.663.613	7,410,637
1.3.2.5.2.6		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		185,827,250			179.917.250	1.970.000	1.970.000	183.857.250	1,970,000



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
 Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.6.2	6	Televisi	7 2011	1,900,000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
1.3.2.5.2.6.2	7	Televisi	7 2011	1,900,000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
1.3.2.5.2.6.2	8	Televisi	7 2011	1,900,000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
1.3.2.5.2.6.2	9	Televisi	7 2011	1,900,000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
1.3.2.5.2.6.2	10	Televisi	5 2012	8,000,000	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0
1.3.2.5.2.6.2	11	Televisi	6 2015	8,750,000	0	0	8.750.000	0	0	8.750.000	0
1.3.2.5.2.6.8	1	Sound System	8 2013	59,715,000	0	0	59.715.000	0	0	59.715.000	0
1.3.2.5.2.6.8	2	Sound System	9 2014	19,742,250	0	0	19.742.250	0	0	19.742.250	0
1.3.2.5.2.6.8	3	Sound System	7 2019	19,700,000	0	6	13.790.000	1.970.000	1.970.000	17.730.000	1,970,000
1.3.2.5.2.6.12	1	Wireless	12 2002	10,620,000	0	0	10.620.000	0	0	10.620.000	0
1.3.2.5.2.6.22	1	Camera film	10 2014	22,450,000	0	0	22.450.000	0	0	22.450.000	0
1.3.2.5.2.6.77	3	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7 2011	29,250,000	0	0	29.250.000	0	0	29.250.000	0
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		241,309,500			241.309.500	0	0	241.309.500	0
1.3.2.5.3.1		MEJA KERJA PEJABAT		165,149,500			165.149.500	0	0	165.149.500	0
1.3.2.5.3.1.4	1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	11 2010	7,843,000	0	0	7.843.000	0	0	7.843.000	0
1.3.2.5.3.1.5	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2009	6,875,000	0	0	6.875.000	0	0	6.875.000	0
1.3.2.5.3.1.5	2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2009	6,875,000	0	0	6.875.000	0	0	6.875.000	0
1.3.2.5.3.1.5	5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2010	6,363,500	0	0	6.363.500	0	0	6.363.500	0
1.3.2.5.3.1.5	6	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2010	6,363,500	0	0	6.363.500	0	0	6.363.500	0
1.3.2.5.3.1.6	3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2003	1,700,000	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0
1.3.2.5.3.1.6	4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	5,445,000	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	0
1.3.2.5.3.1.6	5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	5,445,000	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	0
1.3.2.5.3.1.6	6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	5,445,000	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	0
1.3.2.5.3.1.6	7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	5,445,000	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	0
1.3.2.5.3.1.6	8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	5,445,000	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	0
1.3.2.5.3.1.6	12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	5,390,000	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	0
1.3.2.5.3.1.6	13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	5,390,000	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	0
1.3.2.5.3.1.6	14	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	5,390,000	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	0
1.3.2.5.3.1.6	15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 2013	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.5.3.1.6	16	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2003	1,700,000	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0
1.3.2.5.3.1.6	17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2003	1,700,000	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN		SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
							Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3.1.7	44	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	45	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	46	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	47	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	48	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	49	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	50	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	51	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	52	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	53	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	54	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	55	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	56	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	57	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	58	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	59	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	60	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	61	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	62	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	63	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	64	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	65	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	66	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	67	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	68	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	69	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	70	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	71	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	72	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	73	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	74	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	
1.3.2.5.3.1.7	75	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12	2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0	



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3.1.7	76	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0
1.3.2.5.3.1.7	77	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0
1.3.2.5.3.1.7	78	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0
1.3.2.5.3.1.7	79	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0
1.3.2.5.3.1.7	80	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	1,468,500	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	0
1.3.2.5.3.1.7	81	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.3.1.7	82	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.3.1.7	83	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.3.1.8	1	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.3.1.8	2	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.3.1.8	3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.3.1.8	4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.3.1.8	5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.3.3		KURSI KERJA PEJABAT		21,030,000			21.030.000	0	0	21.030.000	0
1.3.2.5.3.3.4	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	11 2010	1,850,000	0	0	1.850.000	0	0	1.850.000	0
1.3.2.5.3.3.5	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2009	1,320,000	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000	0
1.3.2.5.3.3.5	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2009	1,320,000	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000	0
1.3.2.5.3.3.5	5	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2010	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.5.3.3.5	6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2010	1,750,000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
1.3.2.5.3.3.6	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	1,298,000	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	0
1.3.2.5.3.3.6	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	1,298,000	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	0
1.3.2.5.3.3.6	3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	1,298,000	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	0
1.3.2.5.3.3.6	4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	1,298,000	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	0
1.3.2.5.3.3.6	5	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	1,298,000	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	0
1.3.2.5.3.3.6	9	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	1,450,000	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	0
1.3.2.5.3.3.6	10	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	1,450,000	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	0
1.3.2.5.3.3.6	11	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	1,450,000	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	0
1.3.2.5.3.3.6	12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 2013	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.5.3.3.7	81	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.3.3.7	82	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.3.3.7	83	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.3.6		KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT		45,180,000			45.180.000	0	0	45.180.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3.6.4	1	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	11 2011	5,180,000	0	0	5.180.000	0	0	5.180.000	0
1.3.2.5.3.6.5	1	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	11 2011	4,475,000	0	0	4.475.000	0	0	4.475.000	0
1.3.2.5.3.6.5	2	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	11 2011	4,475,000	0	0	4.475.000	0	0	4.475.000	0
1.3.2.5.3.6.5	3	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	11 2011	4,475,000	0	0	4.475.000	0	0	4.475.000	0
1.3.2.5.3.6.5	4	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	11 2011	4,475,000	0	0	4.475.000	0	0	4.475.000	0
1.3.2.5.3.6.11	1	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6 2012	5,900,000	0	0	5.900.000	0	0	5.900.000	0
1.3.2.5.3.6.11	2	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6 2012	5,900,000	0	0	5.900.000	0	0	5.900.000	0
1.3.2.5.3.6.11	3	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6 2012	5,900,000	0	0	5.900.000	0	0	5.900.000	0
1.3.2.5.3.6.11	6	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	12 2012	4,400,000	0	0	4.400.000	0	0	4.400.000	0
1.3.2.5.3.7		LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		9,950,000			9.950.000	0	0	9.950.000	0
1.3.2.5.3.7.4	2	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	11 2012	4,975,000	0	0	4.975.000	0	0	4.975.000	0
1.3.2.5.3.7.4	3	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	11 2012	4,975,000	0	0	4.975.000	0	0	4.975.000	0
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		26,190,000			15.854.000	2.565.166	2.619.000	21.038.166	5,151,834
1.3.2.6.1.1		PERALATAN STUDIO AUDIO		4,360,000			2.834.000	436.000	436.000	3.706.000	654,000
1.3.2.6.1.1.36	1	Microphone/Wireless MIC	10 2019	4,360,000	0	9	2.834.000	436.000	436.000	3.706.000	654,000
1.3.2.6.1.2		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		21,830,000			13.020.000	2.129.166	2.183.000	17.332.166	4,497,834
1.3.2.6.1.2.105	3	Layar Film/Projector	7 2019	9,300,000	0	6	6.510.000	930.000	930.000	8.370.000	930,000
1.3.2.6.1.2.105	4	Layar Film/Projector	7 2019	9,300,000	0	6	6.510.000	930.000	930.000	8.370.000	930,000
1.3.2.6.1.2.163	1	Camera Conference	2 2023	1,615,000	4	1	0	134.583	161.500	296.083	1,318,917
1.3.2.6.1.2.163	1	Camera Conference	2 2023	1,615,000	4	1	0	134.583	161.500	296.083	1,318,917
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		254,989,366			249.389.365	1.680.000	1.680.000	252.749.365	2,240,001
1.3.2.6.2.1		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		207,295,366			201.695.365	1.680.000	1.680.000	205.055.365	2,240,001
1.3.2.6.2.1.1	1	Telephone (PABX)	12 2003	13,300,000	0	0	13.300.000	0	0	13.300.000	0
1.3.2.6.2.1.3	3	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	4	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	5	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	6	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	7	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	8	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.2.1.3	9	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	10	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	11	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	13	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	14	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	15	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.6	98	Handy Talky (HT)	7 2015	5,450,000	0	0	5.450.000	0	0	5.450.000	0
1.3.2.6.2.1.6	99	Handy Talky (HT)	7 2015	5,450,000	0	0	5.450.000	0	0	5.450.000	0
1.3.2.6.2.1.6	100	Handy Talky (HT)	7 2015	5,450,000	0	0	5.450.000	0	0	5.450.000	0
1.3.2.6.2.1.6	103	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	104	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	105	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	106	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	107	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	108	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	109	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	110	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	111	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	112	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	113	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	114	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	115	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	116	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	117	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	118	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	119	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	120	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	121	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	122	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	123	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	124	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	125	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,556	0	0	6.118.556	0	0	6.118.556	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.2.1.6	126	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,556	0	0	6.118.556	0	0	6.118.556	0
1.3.2.6.2.1.6	127	Handy Talky (HT)	9 2019	5,600,000	0	8	3.733.333	560.000	560.000	4.853.333	746,667
1.3.2.6.2.1.6	128	Handy Talky (HT)	9 2019	5,600,000	0	8	3.733.333	560.000	560.000	4.853.333	746,667
1.3.2.6.2.1.6	129	Handy Talky (HT)	9 2019	5,600,000	0	8	3.733.333	560.000	560.000	4.853.333	746,667
1.3.2.6.2.1.10	1	Facsimile	12 1990	800,000	0	0	800.000	0	0	800.000	0
1.3.2.6.2.5		ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF		47,694,000			47.694.000	0	0	47.694.000	0
1.3.2.6.2.5.1	1	Unit Tranceiver UHF Portable	12 2006	33,640,000	0	0	33.640.000	0	0	33.640.000	0
1.3.2.6.2.5.1	2	Unit Tranceiver UHF Portable	12 2012	14,054,000	0	0	14.054.000	0	0	14.054.000	0
1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR		361,795,000			361.795.000	0	0	361.795.000	0
1.3.2.6.3.1		PERALATAN PEMANCAR MF/MW		361,795,000			361.795.000	0	0	361.795.000	0
1.3.2.6.3.1.3	1	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	72,039,000	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	0
1.3.2.6.3.1.3	2	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	72,039,000	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	0
1.3.2.6.3.1.3	3	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	72,039,000	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	0
1.3.2.6.3.1.3	4	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	72,039,000	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	0
1.3.2.6.3.1.3	5	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	72,039,000	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	0
1.3.2.6.3.1.3	6	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2007	800,000	0	0	800.000	0	0	800.000	0
1.3.2.6.3.1.3	7	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2007	800,000	0	0	800.000	0	0	800.000	0
1.3.2.9		ALAT PERSENJATAAN									
1.3.2.9.1		SENJATA API		260,675,000			260.675.000	0	0	260.675.000	0
1.3.2.9.1.1		SENJATA GENGAM		248,850,000			248.850.000	0	0	248.850.000	0
1.3.2.9.1.1.1	1	Revolver	12 2002	21,000,000	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	0
1.3.2.9.1.1.1	2	Revolver	12 2002	21,000,000	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	0
1.3.2.9.1.1.1	3	Revolver	12 2002	21,000,000	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	0
1.3.2.9.1.1.1	4	Revolver	12 2002	21,000,000	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	0
1.3.2.9.1.1.1	5	Revolver	12 2002	21,000,000	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	0
1.3.2.9.1.1.2	1	Pistol	12 2003	42,000,000	0	0	42.000.000	0	0	42.000.000	0
1.3.2.9.1.1.2	2	Pistol	12 2004	44,250,000	0	0	44.250.000	0	0	44.250.000	0
1.3.2.9.1.1.2	3	Pistol	12 2005	57,600,000	0	0	57.600.000	0	0	57.600.000	0
1.3.2.9.1.3		SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG		8,700,000			8.700.000	0	0	8.700.000	0
1.3.2.9.1.3.2	1	Senapan Semi Otomatis	12 2002	700,000	0	0	700.000	0	0	700.000	0
1.3.2.9.1.3.6	1	Senapan Runduk	12 2002	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.9.1.3.6	2	Senapan Runduk	12 2002	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.9.1.10		SENJATA LAIN-LAIN		3,125,000			3.125.000	0	0	3.125.000	0
1.3.2.9.1.10.8	1	Senapan Gas	12 2003	3,125,000	0	0	3.125.000	0	0	3.125.000	0
1.3.2.9.2		PERSENJATAAN NON SENJATA API		180,375,000			180.375.000	0	0	180.375.000	0
1.3.2.9.2.1		ALAT KEAMANAN		173,550,000			173.550.000	0	0	173.550.000	0
1.3.2.9.2.1.11	5	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	10 2010	39,050,000	0	0	39.050.000	0	0	39.050.000	0
1.3.2.9.2.1.11	26	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	27	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	28	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	29	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	30	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	31	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	32	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	33	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	34	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	35	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	3,850,000	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	0
1.3.2.9.2.1.11	36	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	19,200,000	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	0
1.3.2.9.2.1.11	37	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	19,200,000	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	0
1.3.2.9.2.1.11	38	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	19,200,000	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	0
1.3.2.9.2.1.11	39	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	19,200,000	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	0
1.3.2.9.2.1.11	40	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	19,200,000	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	0
1.3.2.9.2.2		NON SENJATA API		6,825,000			6.825.000	0	0	6.825.000	0
1.3.2.9.2.2.12	1	Pisau Lempar	12 2002	3,750,000	0	0	3.750.000	0	0	3.750.000	0
1.3.2.9.2.2.12	2	Pisau Lempar	12 2003	575,000	0	0	575.000	0	0	575.000	0
1.3.2.9.2.2.12	3	Pisau Lempar	12 2002	2,500,000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		394,105,577			296.792.992	20.320.887	16.223.051	333.336.930	60,768,647
1.3.2.10.1.2		PERSONAL KOMPUTER		394,105,577			296.792.992	20.320.887	16.223.051	333.336.930	60,768,647
1.3.2.10.1.2.1	8	P.C Unit	5 2011	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	9	P.C Unit	5 2011	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	12	P.C Unit	5 2011	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	14	P.C Unit	6 2012	9,950,000	0	0	9.950.000	0	0	9.950.000	0
1.3.2.10.1.2.1	15	P.C Unit	6 2012	9,950,000	0	0	9.950.000	0	0	9.950.000	0
1.3.2.10.1.2.1	16	P.C Unit	7 2013	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	17	P.C Unit	7 2013	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	18	P.C Unit	7 2013	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	20	P.C Unit	10 2014	9,975,000	0	0	9.975.000	0	0	9.975.000	0
1.3.2.10.1.2.1	21	P.C Unit	11 2016	9,999,998	0	0	9.999.998	0	0	9.999.998	0
1.3.2.10.1.2.1	23	P.C Unit	6 2017	11,248,933	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	0
1.3.2.10.1.2.1	24	P.C Unit	6 2017	11,248,933	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	0
1.3.2.10.1.2.1	26	P.C Unit	6 2017	11,248,933	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	0
1.3.2.10.1.2.1	28	P.C Unit	10 2019	8,699,593	0	0	7.068.419	1.087.449	543.725	8.699.593	0
1.3.2.10.1.2.1	29	P.C Unit	10 2019	8,699,593	0	0	7.068.419	1.087.449	543.725	8.699.593	0
1.3.2.10.1.2.1	30	P.C Unit	10 2019	8,699,594	0	0	7.068.420	1.087.449	543.725	8.699.594	0
1.3.2.10.1.2.1	31	P.C Unit	2 2023	11,840,000	3	1	0	1.233.333	1.480.000	2.713.333	9,126,667
1.3.2.10.1.2.1	31	P.C Unit	2 2023	11,840,000	3	1	0	1.233.333	1.480.000	2.713.333	9,126,667
1.3.2.10.1.2.1	31	P.C Unit	2 2023	11,840,000	3	1	0	1.233.333	1.480.000	2.713.333	9,126,667
1.3.2.10.1.2.1	31	P.C Unit	2 2023	11,840,000	3	1	0	1.233.333	1.480.000	2.713.333	9,126,667
1.3.2.10.1.2.1	31	P.C Unit	2 2023	11,840,000	3	1	0	1.233.333	1.480.000	2.713.333	9,126,667
1.3.2.10.1.2.2	3	Lap Top	5 2014	14,850,000	0	0	14.850.000	0	0	14.850.000	0
1.3.2.10.1.2.2	4	Lap Top	6 2021	14,245,000	1	5	5.638.646	1.780.625	1.780.625	9.199.896	5,045,104
1.3.2.10.1.2.2	5	Lap Top	6 2021	14,245,000	1	5	5.638.646	1.780.625	1.780.625	9.199.896	5,045,104
1.3.2.10.1.2.2	6	Lap Top	6 2021	14,245,000	1	5	5.638.646	1.780.625	1.780.625	9.199.896	5,045,104
1.3.2.10.1.2.3	1	Note Book	10 2010	14,500,000	0	0	14.500.000	0	0	14.500.000	0
1.3.2.10.1.2.3	7	Note Book	6 2012	14,900,000	0	0	14.900.000	0	0	14.900.000	0
1.3.2.10.1.2.3	8	Note Book	8 2012	14,750,000	0	0	14.750.000	0	0	14.750.000	0
1.3.2.10.1.2.3	9	Note Book	5 2013	14,800,000	0	0	14.800.000	0	0	14.800.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
 Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.1.2.3	11	Note Book	5 2014	14,850,000	0	0	14.850.000	0	0	14.850.000	0
1.3.2.10.1.2.3	14	Note Book	9 2019	14,800,000	0	0	12.333.333	1.850.000	616.667	14.800.000	0
1.3.2.10.1.2.3	15	Note Book	9 2019	14,800,000	0	0	12.333.333	1.850.000	616.667	14.800.000	0
1.3.2.10.1.2.3	16	Note Book	9 2019	14,800,000	0	0	12.333.333	1.850.000	616.667	14.800.000	0
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		155,098,000			132.529.375	3.695.628	3.319.125	139.544.128	15,553,872
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		150,108,000			127.539.375	3.695.628	3.319.125	134.554.128	15,553,872
1.3.2.10.2.3.1	3	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	5,500,000	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0
1.3.2.10.2.3.1	4	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	5,500,000	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0
1.3.2.10.2.3.1	5	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	5,500,000	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0
1.3.2.10.2.3.1	6	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	5,500,000	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0
1.3.2.10.2.3.1	7	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	5,500,000	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0
1.3.2.10.2.3.1	11	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.1	12	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.1	13	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	11	Monitor	10 2010	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
1.3.2.10.2.3.2	12	Monitor	10 2010	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
1.3.2.10.2.3.2	13	Monitor	10 2010	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
1.3.2.10.2.3.2	14	Monitor	10 2010	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.10.2.3.3	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 2011	4,000,000	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0
1.3.2.10.2.3.3	15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2012	4,785,000	0	0	4.785.000	0	0	4.785.000	0
1.3.2.10.2.3.3	16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2013	4,290,000	0	0	4.290.000	0	0	4.290.000	0
1.3.2.10.2.3.3	17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2013	4,290,000	0	0	4.290.000	0	0	4.290.000	0
1.3.2.10.2.3.3	18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	4,750,000	0	0	4.750.000	0	0	4.750.000	0
1.3.2.10.2.3.3	21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9 2014	5,000,000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
1.3.2.10.2.3.3	22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11 2016	4,995,000	0	0	4.995.000	0	0	4.995.000	0
1.3.2.10.2.3.3	29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0
1.3.2.10.2.3.3	30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2019	7,950,000	0	0	6.459.375	993.750	496.875	7.950.000	0
1.3.2.10.2.3.3	31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2019	2,400,000	0	0	1.950.000	300.000	150.000	2.400.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.2.3.3	32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2019	2,400,000	0	0	1.950.000	300.000	150.000	2.400.000	0
1.3.2.10.2.3.3	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 2023	3,363,000	3	1	0	350.313	420.375	770.688	2,592,312
1.3.2.10.2.3.3	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 2023	3,363,000	3	1	0	350.313	420.375	770.688	2,592,312
1.3.2.10.2.3.3	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 2023	3,363,000	3	1	0	350.313	420.375	770.688	2,592,312
1.3.2.10.2.3.3	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 2023	3,363,000	3	1	0	350.313	420.375	770.688	2,592,312
1.3.2.10.2.3.3	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 2023	3,363,000	3	1	0	350.313	420.375	770.688	2,592,312
1.3.2.10.2.3.3	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 2023	3,363,000	3	1	0	350.313	420.375	770.688	2,592,312
1.3.2.10.2.4		PERALATAN JARINGAN		4,990,000			4.990.000	0	0	4.990.000	0
1.3.2.10.2.4.33	1	Peralatan Jaringan lainnya	12 2010	4,990,000	0	0	4.990.000	0	0	4.990.000	0
1.3.2.17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI									
1.3.2.17.1		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		11,550,000			3.850.000	1.155.000	1.155.000	6.160.000	5,390,000
1.3.2.17.1.19		TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID		11,550,000			3.850.000	1.155.000	1.155.000	6.160.000	5,390,000
1.3.2.17.1.19.4	1	Jet Pump	5 2021	5,775,000	2	4	1.925.000	577.500	577.500	3.080.000	2,695,000
1.3.2.17.1.19.4	2	Jet Pump	5 2021	5,775,000	2	4	1.925.000	577.500	577.500	3.080.000	2,695,000
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		1,762,441,000			801,183,582	19,324,995	19,324,995	839,833,572	922,607,428
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG									
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1,762,441,000			801.183.582	19.324.995	19.324.995	839.833.572	922,607,428
1.3.3.1.1.1		BANGUNAN GEDUNG KANTOR		1,642,141,000			775.305.582	18.121.995	18.121.995	811.549.572	830,591,428
1.3.3.1.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 1996	1,642,141,000	22	11	775.305.582	18.121.995	18.121.995	811.549.572	830,591,428
1.3.3.1.1.13		BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA		50,800,000			11.514.667	508.000	508.000	12.530.667	38,269,333
1.3.3.1.1.13.1	1	Gedung Pos Jaga Permanen	9 2011	50,800,000	37	8	11.514.667	508.000	508.000	12.530.667	38,269,333
1.3.3.1.1.30		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA		69,500,000			14.363.333	695.000	695.000	15.753.333	53,746,667
1.3.3.1.1.30.5	1	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	9 2012	69,500,000	38	8	14.363.333	695.000	695.000	15.753.333	53,746,667
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		34,380,000			11,555,500	573,000	573,000	12,701,500	21,678,500
1.3.4.3		INSTALASI									
1.3.4.3.7		INSTALASI PERTAHANAN		34,380,000			11,555,500	573,000	573,000	12,701,500	21,678,500
1.3.4.3.7.1		INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT		34,380,000			11.555.500	573.000	573.000	12.701.500	21,678,500
1.3.4.3.7.1.5	1	Instalasi Benteng	12 2012	34,380,000	18	11	11.555.500	573.000	573.000	12.701.500	21,678,500



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
5		ASET TETAP LAINNYA		25,320,000			25,320,000	0	0	25,320,000	0
1.3.5.2		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA									
1.3.5.2.2		ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		25,320,000			25.320.000	0	0	25.320.000	0
1.3.5.2.2.1		PAHATAN		17,820,000			17.820.000	0	0	17.820.000	0
1.3.5.2.2.1.2	1	Pahatan Kayu	12 2012	4,905,000	0	0	4.905.000	0	0	4.905.000	0
1.3.5.2.2.1.2	2	Pahatan Kayu	12 2012	4,905,000	0	0	4.905.000	0	0	4.905.000	0
1.3.5.2.2.1.2	3	Pahatan Kayu	12 2012	4,905,000	0	0	4.905.000	0	0	4.905.000	0
1.3.5.2.2.1.2	4	Pahatan Kayu	12 2012	3,105,000	0	0	3.105.000	0	0	3.105.000	0
1.3.5.2.2.2		MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH		7,500,000			7.500.000	0	0	7.500.000	0
1.3.5.2.2.2.15	1	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	10 2012	7,500,000	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0
Jumlah Aset Tetap				11,304,203,643			9.585.505.293	159.378.068	155.713.772	9.900.597.133	1,403,606,510
Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya				409,656,049							
2		PERALATAN DAN MESIN		409,656,049			409,656,049	0	0	409,656,049	0
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		20,000,000			20.000.000	0	0	20.000.000	0
1.3.2.2.1.4		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		20,000,000			20.000.000	0	0	20.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	1	Sepeda Motor	12 2001	20,000,000	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		48,595,000			48.595.000	0	0	48.595.000	0
1.3.2.5.2.1		MEUBELAIR		2,130,000			2.130.000	0	0	2.130.000	0
1.3.2.5.2.1.30	110	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	111	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	112	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.4		ALAT PENDINGIN		31,340,000			31.340.000	0	0	31.340.000	0
1.3.2.5.2.4.3	3	A.C. Window	12 2004	13,000,000	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000	0
1.3.2.5.2.4.4	12	A.C. Split	5 2011	5,430,000	0	0	5.430.000	0	0	5.430.000	0
1.3.2.5.2.4.4	13	A.C. Split	5 2011	5,430,000	0	0	5.430.000	0	0	5.430.000	0
1.3.2.5.2.4.4	17	A.C. Split	7 2013	7,480,000	0	0	7.480.000	0	0	7.480.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.6		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		15,125,000			15.125.000	0	0	15.125.000	0
1.3.2.5.2.6.2	2	Televisi	12 2003	4,500,000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
1.3.2.5.2.6.2	3	Televisi	12 2002	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.2.6.2	5	Televisi	7 2011	2,625,000	0	0	2.625.000	0	0	2.625.000	0
1.3.2.5.2.6.77	2	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2004	5,000,000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		13,337,114			13.337.114	0	0	13.337.114	0
1.3.2.6.2.1		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		13,337,114			13.337.114	0	0	13.337.114	0
1.3.2.6.2.1.3	12	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.6	101	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	102	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR		220,105,000			220.105.000	0	0	220.105.000	0
1.3.2.6.3.1		PERALATAN PEMANCAR MF/MW		150,000,000			150.000.000	0	0	150.000.000	0
1.3.2.6.3.1.3	8	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2006	50,000,000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
1.3.2.6.3.1.3	9	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2006	50,000,000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
1.3.2.6.3.1.3	10	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2006	50,000,000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
1.3.2.6.3.2		PERALATAN PEMANCAR HF/SW		70,105,000			70.105.000	0	0	70.105.000	0
1.3.2.6.3.2.3	1	Unit Pemancar HF/SW Stationary	12 2006	20,360,000	0	0	20.360.000	0	0	20.360.000	0
1.3.2.6.3.2.3	2	Unit Pemancar HF/SW Stationary	6 2008	49,745,000	0	0	49.745.000	0	0	49.745.000	0
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		45,548,935			45.548.935	0	0	45.548.935	0
1.3.2.10.1.2		PERSONAL KOMPUTER		45,548,935			45.548.935	0	0	45.548.935	0
1.3.2.10.1.2.1	10	P.C Unit	5 2011	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	11	P.C Unit	5 2011	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	27	P.C Unit	6 2017	11,248,935	0	0	11.248.935	0	0	11.248.935	0
1.3.2.10.1.2.3	2	Note Book	10 2010	14,500,000	0	0	14.500.000	0	0	14.500.000	0
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		62,070,000			62.070.000	0	0	62.070.000	0
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		62,070,000			62.070.000	0	0	62.070.000	0
1.3.2.10.2.3.2	5	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	6	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	9	Monitor	10 2010	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN		SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan	Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.2.3.2	10	Monitor	10	2010	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	2010	4,750,000	0	0	4.750.000	0	0	4.750.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	2010	4,750,000	0	0	4.750.000	0	0	4.750.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0	
1.3.2.10.2.3.3	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0	
Jumlah Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya					409,656,049			409.656.049	0	0	409.656.049	0	
Aset Tetap yang dihapuskan					392,017,566								
2		PERALATAN DAN MESIN			392,017,566			392,017,566	0	0	392,017,566	0	
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA											
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA			53,952,000			53.952.000	0	0	53.952.000	0	
1.3.2.5.2.1		MEUBELAIR			29,742,000			29.742.000	0	0	29.742.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	22	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	23	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	24	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	25	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	26	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	27	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	28	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	29	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	30	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	31	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	32	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	33	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	34	Kursi Rapat	5	2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
1.3.2.5.2.1.30	47	Kursi Rapat	4	2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	48	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	49	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	50	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	51	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	52	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	53	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	54	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	55	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	56	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	57	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	58	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	59	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	60	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	61	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	62	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	63	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	64	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	65	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	66	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	67	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	68	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	69	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	70	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	71	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	72	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	73	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	74	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	75	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	76	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	77	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	78	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	79	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	80	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	81	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	82	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	83	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	84	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	85	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	86	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	87	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.32	1	Kursi Putar	12 2003	1,642,000	0	0	1.642.000	0	0	1.642.000	0
1.3.2.5.2.1.39	1	Meja Komputer	12 2009	550,000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
1.3.2.5.2.1.39	2	Meja Komputer	12 2009	550,000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
1.3.2.5.2.4		ALAT PENDINGIN		12,910,000			12.910.000	0	0	12.910.000	0
1.3.2.5.2.4.4	11	A.C. Split	5 2011	5,430,000	0	0	5.430.000	0	0	5.430.000	0
1.3.2.5.2.4.4	16	A.C. Split	7 2013	7,480,000	0	0	7.480.000	0	0	7.480.000	0
1.3.2.5.2.6		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		11,300,000			11.300.000	0	0	11.300.000	0
1.3.2.5.2.6.2	4	Televisi	7 2011	7,850,000	0	0	7.850.000	0	0	7.850.000	0
1.3.2.5.2.6.77	4	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9 2012	3,450,000	0	0	3.450.000	0	0	3.450.000	0
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		32,895,000			32.895.000	0	0	32.895.000	0
1.3.2.6.1.2		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		32,895,000			32.895.000	0	0	32.895.000	0
1.3.2.6.1.2.3	1	Camera Electronic	10 2010	12,500,000	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000	0
1.3.2.6.1.2.3	3	Camera Electronic	10 2010	8,295,000	0	0	8.295.000	0	0	8.295.000	0
1.3.2.6.1.2.3	5	Camera Electronic	4 2011	9,300,000	0	0	9.300.000	0	0	9.300.000	0
1.3.2.6.1.2.3	8	Camera Electronic	4 2012	2,800,000	0	0	2.800.000	0	0	2.800.000	0
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		178,212,700			178.212.700	0	0	178.212.700	0
1.3.2.6.2.1		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		178,212,700			178.212.700	0	0	178.212.700	0
1.3.2.6.2.1.3	1	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	2	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.6	10	Handy Talky (HT)	12 2009	5,973,000	0	0	5.973.000	0	0	5.973.000	0
1.3.2.6.2.1.6	14	Handy Talky (HT)	12 2009	5,973,000	0	0	5.973.000	0	0	5.973.000	0
1.3.2.6.2.1.6	18	Handy Talky (HT)	10 2010	5,075,000	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	19	Handy Talky (HT)	10 2010	5,075,000	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN		SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan	Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.2.1.6	20	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	21	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	22	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	23	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	24	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	49	Handy Talky (HT)	4	2011	6,300,000	0	0	0	6.300.000	0	0	6.300.000	0
1.3.2.6.2.1.6	50	Handy Talky (HT)	12	2010	3,329,700	0	0	0	3.329.700	0	0	3.329.700	0
1.3.2.6.2.1.6	65	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	66	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	67	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	68	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	69	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	70	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	71	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	72	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	73	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	74	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	75	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	76	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	77	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	78	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	79	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	80	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	81	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	82	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	83	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	84	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	85	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	86	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	87	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	88	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	89	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.2.1.6	90	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	91	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	92	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	93	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	94	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	95	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	96	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		46,972,866			46.972.866	0	0	46.972.866	0
1.3.2.10.1.2		PERSONAL KOMPUTER		46,972,866			46.972.866	0	0	46.972.866	0
1.3.2.10.1.2.1	19	P.C Unit	10 2014	9,975,000	0	0	9.975.000	0	0	9.975.000	0
1.3.2.10.1.2.1	22	P.C Unit	6 2017	11,248,933	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	0
1.3.2.10.1.2.1	25	P.C Unit	6 2017	11,248,933	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	0
1.3.2.10.1.2.3	3	Note Book	10 2010	14,500,000	0	0	14.500.000	0	0	14.500.000	0
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		49,985,000			49.985.000	0	0	49.985.000	0
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		49,985,000			49.985.000	0	0	49.985.000	0
1.3.2.10.2.3.1	2	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	5,500,000	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0
1.3.2.10.2.3.1	8	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.1	9	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.1	10	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	1	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	2	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	3	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	4	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.10.2.3.3	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2010	4,750,000	0	0	4.750.000	0	0	4.750.000	0
1.3.2.10.2.3.3	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2012	4,785,000	0	0	4.785.000	0	0	4.785.000	0
1.3.2.19		PERALATAN OLAH RAGA									
1.3.2.19.1		PERALATAN OLAH RAGA		30,000,000			30.000.000	0	0	30.000.000	0
1.3.2.19.1.3		PERALATAN SENAM		30,000,000			30.000.000	0	0	30.000.000	0
1.3.2.19.1.3.21	5	Peralatan Senam lainnya	12 2006	30,000,000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Jumlah Aset Tetap yang dihapuskan				392,017,566			392.017.566	0	0	392.017.566	0
Jumlah				12,105,877,258			10.387.178.908	159.378.068	155.713.772	10.702.270.748	1,403,606,510



ပင်မအစိုးရအဖွဲ့အစည်း
PEMERINTAH PROVINSI BALI
မအေမာဏ်ဂဟဗ်မိ မဟေပုဏ်

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

မအေမာဏ်ဂဟဗ်မိ မဟေပုဏ် (ပင်မအစိုးရအဖွဲ့အစည်း)၊ ဂဟဗ်မိ (ပင်မအစိုးရအဖွဲ့အစည်း)၊ ဂဟဗ်မိ
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon; (0361) 245395
Website : www.satpolpp.baliprov.go.id

BERITA ACARA SALAH POS BELANJA MODAL

Nomor : B.36.032 /7828/ Set / Satpol PP

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami telah melakukan Perubahan Pos Belanja Modal sejumlah 1 Paket Belanja Modal Gedung Kantor dengan nilai perolehan sebesar Rp. 194.593.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan selanjutnya akan dipindah ke Pos Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah. (Daftar Terlampir)

Berita Acara Salah Pos Belanja Modal ini dibuat rangkap 2 (dua) dipergunakan untuk arsip atau dokumen pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, dan 1 (satu) rangkap dapat disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Bali sebagai laporan.

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 11 Oktober 2023

Pengurus Barang
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I Putu Ricard Yuanta Putra S.STP.,MAP
NIP. 19910913 201206 1 001

I Wawan Parna, S.Sos
NIP. 19750822 200701 1 017

Mengetahui

Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si
NIP. 19721216 199803 1 006

Lampiran :

Nomor : B.36.032 /7828/ Set / Satpol PP

Tanggal : 11 Oktober 2023

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET
1	Spanduk K3	Buah	1	550,000	550,000	
2	Papan Informasi K3	Buah	1	1,650,000	1,650,000	
3	Rambu-rambu K3	Buah	1	520,000	520,000	
4	Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (K3)	Buah	1	312,000	312,000	
5	Helm proyek	Buah	10	70,000	700,000	
6	Kartu nama pekerjaan	Buah	10	6,000	60,000	
7	Rompi proyek	Buah	10	45,000	450,000	
8	Masker	Buah	10	16,000	160,000	
9	Full body harness	Buah	10	245,000	2,450,000	
10	Sarung tangan	Buah	10	15,000	150,000	
11	Kaca mata safety	Buah	10	220,000	2,200,000	
12	Pengerokan cat dinding lama	M2	673	37,000	24,901,000	
13	Pemasangan wallpaper	M2	10	125,000	1,250,000	
14	Pemasangan lantai vinly	M2	35	375,000	13,125,000	
15	Pekerjaan filler tembok	M2	422	115,000	48,530,000	
16	Jasa pengecatan dinding	M2	673	145,000	97,585,000	
				JUMLAH	194,593,000	

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I Putu Ricard Yuanta Putra S.STP., MAP
NIP. 19910913 201206 1 001

Pengurus Barang
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I Wayan Parna, S.Sos
NIP. 19750822 200701 1 017

Mengetahui
Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH, M.Si
NIP. 19721216 198803 1 006

PROVINSI BALI

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

22.00/04.0/000190/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.04/7/2023

: 22.00/03.0/000178/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.04/7/2023

: 17 Juli 2023

: Satuan Polisi Pamong Praja

Dari : Kuasa BUD
Tahun Anggaran : 2023

m : Bank BPD Bali

nencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 010.01.0000000-1

ar Rp194.593.000 (terbilang: seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

: I Putu Eka Adnyana (Direktur CV. Buana Asri)

: 017290263901000

ng Bank : 0100100012257

ima : Bank BPD Bali

Untuk : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun Anggaran

nggaran : Rp1.340.486.548

CODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp194.593.000
05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp194.593.000
2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp194.593.000
	Jumlah	Rp194.593.000

Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Pajak Potongan:		
Pajak Pertambahan Nilai	19.283.991	
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.067.908	
Jumlah	22.351.899	

Denda yang Dibayarkan	Rp194.593.000
Pajak yang Diminta (Bruto)	Rp22.351.899
Pajak Potongan	Rp172.241.101
Jumlah Netto	Rp194.593.000

Jumlah yang Dibayarkan
Uang Sejumlah: seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah

Denpasar, 27 Juli 2023

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



Maduyasa, S.Sos., M.A.P.
NIP. 197202031992031008



3218 JULI 2023

- Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3: Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4: Pihak Penerima



ບົດຄຳສູງ ກຽມບົດຄຳ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ກຳລັງເກົາຫຼີ ທ່າວກາ
SEKRETARIAT DAERAH

ທາງຄຳ ກຳລັງ ກຳລັງ ທ່າວກາ - ທ່າວກາ (ບ່າວກຳ) ກຳລັງ ກຳລັງ (ບ່າວກຳ) ກຳລັງ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR B.13.028/8932/P.BMD/BPKAD

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI PADA 3 (TIGA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Persetujuan Gubernur Bali Nomor B.00.032/45917/Setda, tanggal 6 November 2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan penjualan kepada masyarakat umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 434 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada 3 (tiga) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2012, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali berupa Barang Inventaris kondisi rusak berat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp71.395.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp824.156.900,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp399.998.549,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 23 November 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali di Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI
PADA 3 (TIGA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI												
a. Barang Intra Kompatabel												
1	02.06.02.04.004	17	AC Split	2001	1	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	02.06.02.04.004	18	AC Split	2001	1	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	02.06.02.04.004	19	AC Split	2001	1	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	02.06.02.01.012	4	Meja Makan	2001	1	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	02.06.02.01.012	3	Meja Makan	1994	1	595.000,00	595.000,00	595.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	02.06.02.04.001	5	Lemari Es	2007	1	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	02.06.02.06.039	7	Dispenser	2011	1	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	02.07.02.01.009	2	Facsimile	2012	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	02.06.02.04.006	12,13,14	Kipas Angin	2008	3	2.250.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	02.07.02.01.008	07,08,09,10	Sound System	1997	4	550.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	02.06.02.01.009	55	Tempat Tidur Kayu	2013	4	3.900.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	02.06.02.01.006	2,5,6,7,8,9	Filling Cabinet Besi	2001	6	750.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah a					25	47.995.000,00	69.595.000,00	69.595.000,00	0			
b. Barang Ekstra Kompatabel												
1	02.06.02.01.045	37	Sprei	2013	12	150.000,00	1.800.000,00	-	-	Badan Penghubung Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah b					12	150.000,00	1.800.000,00	-	-			
Jumlah 1					37	48.145.000,00	71.395.000,00	69.595.000,00	0			
2. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI												
a. Barang Intra Kompatabel												
1	1.3.2.10.02.03.03	000001	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1994	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1.3.2.10.02.03.003	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2001	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.10.02.01.010	000003	Line Printer	2014	1	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	1.3.2.10.02.03.003	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2001	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.10.02.03.003	000007	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2000	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.10.02.03.003	000010	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	1	4.785.000,00	4.785.000,00	4.785.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	1.3.2.10.02.03.003	000011	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	1	4.785.000,00	4.785.000,00	4.785.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	1.3.2.10.02.03.003	000026	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	1.3.2.10.02.03.003	000012	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	1	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	1.3.2.10.02.03.003	000013	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	1	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	1.3.2.10.02.03.003	000042	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	885.000,00	885.000,00	885.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	1.3.2.10.02.03.003	000014	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
13	1.3.2.10.02.03.003	000019	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	4.267.000,00	4.267.000,00	4.267.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	1.3.2.10.02.03.03	000020	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	1.3.2.10.02.03.03	000021	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	1.3.2.10.02.03.03	000061	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	1.3.2.10.02.03.03	000066	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1	632.500,00	632.500,00	632.500,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
18	1.3.2.10.02.03.03	000067	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1	632.500,00	632.500,00	632.500,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	1.3.2.10.01.02.02	000001	Lap Top	2000	1	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	1.3.2.10.01.02.02	000001	Lap Top	2014	1	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
21	1.3.2.10.01.02.03	000002	Note Book	2011	1	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
22	1.3.2.10.01.02.03	000002	Note Book	2011	1	10.806.000,00	10.806.000,00	10.806.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
23	1.3.2.10.01.02.02	000002	Lap Top	2005	1	39.850.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
24	1.3.2.10.01.02.02	000003	Lap Top	2010	1	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
25	1.3.2.10.01.02.03	000003	Note Book	2011	1	9.856.000,00	9.856.000,00	9.856.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	1.3.2.10.01.02.002	000003	Lap Top	2014	1	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
27	1.3.2.10.01.02.002	000013	Lap Top	2014	1	10.975.000,00	10.975.000,00	10.975.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
28	1.3.2.10.01.02.002	000020	Lap Top	2009	1	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
29	1.3.2.10.01.02.002	000034	Lap Top	2015	1	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
30	1.3.2.10.01.02.002	000036	Lap Top	2011	1	9.460.000,00	9.460.000,00	9.460.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
31	1.3.2.10.01.02.002	000042	Lap Top	2013	1	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
32	1.3.2.10.01.02.002	000043	Lap Top	2013	1	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
33	1.3.2.10.01.02.002	000044	Lap Top	2014	1	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
34	1.3.2.10.01.02.002	000047	Lap Top	2015	1	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
35	1.3.2.10.01.02.002	000054	Lap Top	2015	1	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
36	1.3.2.10.01.02.002	000055	Lap Top	2015	1	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
37	1.3.2.10.01.02.002	000056	Lap Top	2015	1	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	1.3.2.10.01.02.002	000057	Lap Top	2013	1	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
39	1.3.2.10.01.02.002	000058	Lap Top	2013	1	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
40	1.3.2.10.01.02.002	000059	Lap Top	2013	1	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
41	1.3.2.10.01.02.002	000060	Lap Top	2010	1	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
42	1.3.2.10.01.02.002	000063	Lap Top	2015	1	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
43	1.3.2.10.01.02.002	000064	Lap Top	2015	1	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
44	1.3.2.10.01.02.001	000067	P.C Unit	2007	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
45	1.3.2.10.01.02.001	000068	P.C Unit	2007	1	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
46	1.3.2.10.01.02.001	000100	P.C Unit	2013	1	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
47	1.3.2.10.01.02.001	000001	P.C Unit	2011	1	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
48	1.3.2.10.01.02.001	000003	P.C Unit	2000	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
49	1.3.2.10.01.02.001	000001	P.C Unit	1999	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	1.3.2.10.01.02.001	000004	P.C Unit	2000	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
51	1.3.2.10.01.02.001	000005	P.C Unit	2000	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
52	1.3.2.10.01.02.001	000006	P.C Unit	1995	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
53	1.3.2.10.01.02.001	000008	P.C Unit	2000	1	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
54	1.3.2.10.01.02.001	000010	P.C Unit	1999	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
55	1.3.2.10.01.02.001	000011	P.C Unit	2001	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
56	1.3.2.10.01.02.001	000013	P.C Unit	1999	1	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
57	1.3.2.10.01.02.001	000015	P.C Unit	2001	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
58	1.3.2.10.01.02.001	000016	P.C Unit	2004	1	19.762.200,00	19.762.200,00	19.762.200,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
59	1.3.2.10.01.02.001	000017	P.C Unit	2004	1	19.762.000,00	19.762.000,00	19.762.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
60	1.3.2.10.01.02.001	000018	P.C Unit	2004	1	48.450.000,00	48.450.000,00	48.450.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
61	1.3.2.10.01.02.001	000019	P.C Unit	2011	1	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	1.3.2.10.01.02.001	000021	P.C Unit	2012	1	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
63	1.3.2.06.02.01.003	000005	Pesawat Telephone	2004	1	3.536.500,00	3.536.500,00	3.536.500,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
64	1.3.2.06.02.01.003	000028	Pesawat Telephone	2019	1	1.375.000,00	1.375.000,00	1.122.916,00	252.084,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
65	1.3.2.05.01.05.023	000001	Overhead Projector	2012	1	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
66	1.3.2.06.01.02.105	000002, 000003	Layar Film/Projector	2016	2	13.200.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
67	1.3.2.06.02.01.010	000003	Facsimile	2016	1	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
68	1.3.2.06.01.02.012	000001	Video Monitor	2016	1	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
69	1.3.2.05.02.06.021	000001	Camera Video	2015	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
70	1.3.2.09.02.01.011	000066 s/d 000085	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	2017	20	1.815.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
71	1.3.2.05.01.04.007	000001	Brandkas	1998	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
72	1.3.2.04.001.005.015	000001	Alat Laboratorium lainnya	2003	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
73	1.3.2.04.001.003.011	000001	Alat Panen Lainnya	2005	1	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	1.3.2.04.001.006.044	000001	Alat Prosesing lainnya	2010	1	24.976.000,00	24.976.000,00	24.976.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
75	1.3.2.04.001.001.013	000001	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	2004	1	39.710.000,00	39.710.000,00	39.710.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
76	1.3.2.04.001.001.013	000002	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	2004	1	3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
77	1.3.2.10.02.03.003	000022	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
78	1.3.2.05.001.004.005	000033	Filing Cabinet Besi	2003	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
79	1.3.2.05.001.004.005	000034	Filing Cabinet Besi	2003	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
80	1.3.2.05.001.004.005	000028	Filing Cabinet Besi	2003	1	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
81	1.3.2.05.002.001.002	000010	Meja Kerja Kayu	1992	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
82	1.3.2.05.002.001.024	000006	Meja 1/2 Biro	1998	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
83	1.3.2.05.002.001.030	000003	Kursi Rapat	1986	1	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
84	1.3.2.10.001.002.002	000033	Lap Top	2009	1	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah a					104	771.943.900,00	819.628.900,00	819.376.816,00	252.084,00			
b. Barang Ekstra Kompatabel												



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.3.2.06.02.01.003	000001	Pesawat Telephone	1998	1	375.000,00	375.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	1.3.2.06.02.01.003	000002	Pesawat Telephone	1987	1	50.000,00	50.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.06.02.01.003	000003	Pesawat Telephone	1980	1	250.000,00	250.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	1.3.2.06.02.01.003	000006	Pesawat Telephone	2018	1	393.000,00	393.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.05.02.01.039	000002 s/d 000003	Meja Komputer	2009	2	495.000,00	990.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.05.01.04.007	000002	Brandkas	1970	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	1.3.2.06.02.01.003	000004	Pesawat Telephone	1997	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	1.3.2.05.02.01.032	000007	Kursi Putar	1990	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	1.3.2.05.02.01.032	000010	Kursi Putar	1990	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	1.3.2.05.002.001.002	000031	Meja Kerja Kayu	1972	1	70.000,00	70.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	1.3.2.05.002.001.002	000033	Meja Kerja Kayu	1972	1	70.000,00	70.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	1.3.2.05.002.001.024	000001	Meja 1/2 Biro	2000	1	350.000,00	350.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	1.3.2.05.002.001.024	000002	Meja 1/2 Biro	2000	1	200.000,00	200.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
14	1.3.2.05.002.001.024	000016	Meja 1/2 Biro	1983	1	320.000,00	320.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	1.3.2.05.002.001.024	000023	Meja 1/2 Biro	1983	1	240.000,00	240.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	1.3.2.05.002.001.004	000001	Kursi Kayu	1992	1	80.000,00	80.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	1.3.2.05.002.001.004	000002	Kursi Kayu	1995	1	55.000,00	55.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
18	1.3.2.05.002.001.004	000003	Kursi Kayu	1994	1	60.000,00	60.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	1.3.2.05.002.001.036	000001	Kursi Lipat	2000	1	50.000,00	50.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	1.3.2.05.002.001.030	000002	Kursi Rapat	2014	1	375.000,00	375.000,00	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah b					21	4.033.000,00	4.528.000,00	-	-			
Jumlah 2					125	775.976.900,00	824.156.900,00	819.376.816,00	252.084,00			
3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI												
a. Barang Intra Kompatabel												
1	02.10.01.02.003	000002	Notebook	2010	1	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	02.05.02.04.003	000003	A.C. Window	2004	1	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	02.05.02.04.004	000012	A.C. Split	2011	1	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	02.05.02.04.004	000013	A.C. Split	2011	1	5.430.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	02.05.02.04.004	000017	A.C. Split	2013	1	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	02.05.02.01.030	000110	Kursi Rapat	2015	1	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	02.05.02.01.030	000111	Kursi Rapat	2015	1	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	02.05.02.01.030	000112	Kursi Rapat	2015	1	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	02.10.02.03.003	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	1	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	02.10.02.03.003	000010	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	02.10.02.03.003	000019	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	02.10.02.03.003	000023	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
13	02.10.02.03.003	000024	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
14	02.10.02.03.003	000025	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	02.10.02.03.003	000026	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	02.10.02.03.003	000027	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	02.10.02.03.003	000028	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	5.770.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
18	02.06.02.01.003	000012	Pesawat Telephone	2011	1	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	02.10.02.03.002	000005	Monitor	2009	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	02.10.02.03.002	000006	Monitor	2009	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak	
21	02.10.02.03.002	000009	Monitor	2010	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak	
22	02.10.02.03.002	000010	Monitor	2010	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
23	02.10.01.02.001	000010	P.C Unit	2011	1	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
24	02.10.01.02.001	000011	P.C Unit	2011	1	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
25	02.10.01.02.001	000027	P.C Unit	2017	1	11.248.935,00	11.248.935,00	11.248.935,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
26	02.06.02.01.006	000101	Handy Talky (HT)	2017	1	6.118.557,00	6.118.557,00	6.118.557,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
27	02.06.02.01.006	000102	Handy Talky (HT)	2017	1	6.118.557,00	6.118.557,00	6.118.557,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
28	02.06.03.01.003	000008	Unit Pemancar MF/MW Stationary	2006	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
29	02.06.03.01.003	000009	Unit Pemancar MF/MW Stationary	2006	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
30	02.06.03.01.003	000010	Unit Pemancar MF/MW Stationary	2006	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	02.06.03.02.003	000001	Unit Pemancar HF/SW Stationary	2006	1	20.360.000,00	20.360.000,00	20.360.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
32	02.06.03.02.003	000002	Unit Pemancar HF/SW Stationary	2008	1	49.745.000,00	49.745.000,00	49.745.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
33	02.05.02.06.077	000002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2004	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
34	02.05.02.06.002	000002	Televisi	2003	1	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
35	02.05.02.06.002	000003	Televisi	2002	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
36	02.05.02.06.002	000005	Televisi	2011	1	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	0	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah a					36	389.656.049,00	389.656.049,00	389.656.049,00	0			
b. Barang Ekstra Kompatabel												
1	02.05.01.01.003	000001	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1980	1	100.000,00	100.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	02.05.02.06.077	000005	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	365.000,00	365.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	02.05.02.06.077	000006	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	365.000,00	365.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	02.05.02.06.077	000007	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	95.000,00	95.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	02.05.02.06.077	000008	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	95.000,00	95.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	02.05.02.06.077	000009	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	95.000,00	95.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	02.05.02.06.077	000010	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2012	1	95.000,00	95.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	02.05.01.04.003	000001	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	02.05.01.04.003	000002	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	02.05.01.04.003	000003	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	02.05.01.04.003	000004	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	02.05.01.04.003	000005	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
13	02.05.01.04.003	000006	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
14	02.05.01.04.003	000007	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	02.05.01.04.003	000008	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	02.05.01.04.003	000009	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	02.05.01.04.003	000010	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	02.05.01.04.003	000011	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	02.05.01.04.003	000012	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	02.05.01.04.003	000013	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
21	02.05.01.04.003	000014	Rak Besi	2012	1	190.000,00	190.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
22	02.05.02.02.003	000002	Jam Elektronik	2011	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
23	02.05.02.02.003	000003	Jam Elektronik	2011	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
24	02.05.02.02.003	000004	Jam Elektronik	2011	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
25	02.05.02.02.003	000006	Jam Elektronik	2011	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
26	02.05.02.02.003	000007	Jam Elektronik	2011	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
27	02.05.01.04.005	000006	Filing Cabinet Besi	2003	1	382.500,00	382.500,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
28	05.02.01.02.001	000008	Lukisan Cat Air	2012	1	495.000,00	495.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
29	05.02.01.02.001	000017	Lukisan Cat Air	2012	1	495.000,00	495.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
30	05.02.01.02.001	000018	Lukisan Cat Air	2012	1	495.000,00	495.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
31	02.05.03.03.007	000061	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2010	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
32	02.05.03.03.007	000062	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2010	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
33	02.05.03.03.007	000063	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2010	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
34	02.05.03.03.007	000064	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2010	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
35	02.05.03.03.007	000065	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	2010	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
36	02.05.02.01.036	000072	Kursi Lipat	2006	1	265.000,00	265.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
37	02.05.02.01.036	000073	Kursi Lipat	2006	1	265.000,00	265.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
38	02.05.02.01.036	000074	Kursi Lipat	2006	1	265.000,00	265.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
39	02.05.02.01.036	000075	Kursi Lipat	2006	1	265.000,00	265.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
40	02.05.02.01.036	000076	Kursi Lipat	2006	1	265.000,00	265.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	02.05.02.01.036	000077	Kursi Lipat	2006	1	265.000,00	265.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
42	02.05.02.01.036	000078	Kursi Lipat	2006	1	265.000,00	265.000,00	-	-	Satpol PP Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah b					42	10.342.500,00	10.342.500,00	-	-			
Jumlah 3					78	399.998.549,00	399.998.549,00	389.656.049,00	0			
Jumlah Total (1 + 2 + 3)					240	1.224.120.449,00	1.295.550.449,00	1.278.627.865,00	252.084,00			
						(Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)	(Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)	(Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)	(Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah)			

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

FORMULIR SETORAN
Deposit Form

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK / Fill in With Block Letters

NAMA PEMILIK REKENING
Name of Account Holder
BENDAHARA BPKAD
PROVINSI: BALI

MATA UANG: RUPIAH VALUTA ASING
Currency Local Currency Foreign Currency

JENIS SETORAN/ Deposit Type
 TUNAI WARKAT SENDIRI WARKAT BANK LAIN
Cash BPD's Cheque Other Bank's Cheque

ALAMAT PEMILIK REKENING
Depositor's Address
DENPASAR

JENIS REKENING/ Account Type
 GIRO TABUNGAN PINJAMAN LAINNYA
Checking Account Saving Loan Other

NAMA BANK TERTARIK Drawee Bank	NOMOR CEK / BG Cheque Number	JUMLAH Amount
		1.000.000

NOMOR REKENING
Account Number
19190110440091114

JENIS TRANSAKSI
Transaction Type
 LOKAL ANTAR CABANG
Local Inter Branch

TERBILANG
Amount in Words
SATU JUTA RIBU RUPIAH

DATA PENYETOR/ Depositor's Data

NAMA/ Name: ELAH DIKERANA
ALAMAT/ Address: Jln. ...
NO. IDENTITAS/ No. Identity: 321042112590159

NOMOR TELPON
Phone Number

TANGGAL
Date
14-11-2023

JAM
Hour

TANDA TANGAN TELLER
Teller's Signature
TANDATANGAN PENYETOR
Depositor's Signature

KHUSUS SETORAN/ Deposit Only ≥ Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Sumber Dana/ Source of Funds: ...
Tujuan Transaksi/ Transaction Purpose: ...

Setoran Warkat akan dikredit bila dana efektif sudah diterima
Proceeds of cheque are not available until cleared

Validasi

010 009111044 00911 14/11/2023 11:40
010 01 01.05.01675-8 201 K IDR 1.900,00
BEND PENERIMAAN BPKAD PROV BALI
LELANC

- KETENTUAN:
1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
 3. Pengguna Jasa yang bertransaksi diatas ≥ 100.000.000,- wajib menyerahkan fotocopy identitas diri.



පරමාදායක පාලන කමිටුව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩලය
SEKRETARIAT DAERAH

කොමිස්නරියාත්මක සේවා කොට්ඨාසය (විද්‍යාල, රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩල) පුලුන්න
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361)224871
WEBSITE : www.baliprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG INVENTARIS

Nomor : B.44.028/48504/RT/B.UMPRO

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : **I Wayan Budiasa**
NIP : 19730904 199302 1 001
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
Alamat : Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Nama : **I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si**
NIP : 19721216 199803 1 006
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Nota Dinas Nomor : B.36.026.2/8691/Set/SatpolPP tanggal 17 November 2023, dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima barang inventaris dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik dari **PIHAK PERTAMA** yaitu barang inventaris berupa kendaraan roda 4 (empat) sejumlah 2 (dua) unit dengan kondisi baik, sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

Dengan serah terima sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan barang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Barang inventaris sebagaimana dimaksud pasal 1, dihapus dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Bali pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi Bali pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, serta ditetapkan status penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Umum dan Protokol Setda
Provinsi Bali

I Wayan Budiasa
NIP. 19730904 199302 1 001

PIHAK KEDUA
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bali

I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si
NIP. 19721216 199803 1 006

Diketahui,

Pengurus Barang Pembantu Biro Umum dan
Protokol Setda Provinsi Bali

I Dewa Gede Arcana
NIP. 19710611 199203 1 008

Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali

I Wayan Parna, S.Sos
NIP. 19750822 200701 1 017

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris

Nomor : B.44.028/48504/RT/10.LUMPRO

Tanggal : 24 November 2023

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Tipe	Kode Barang/Regiter	Nomor Mesin / Nomor Rangka	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Kendaraan	Kat.
1	Stasion Wagon	Toyota Avenza / 1500 S	1.3.2.02.001.001.003 / 0020	DCH6488 / MHFM1CA4JBK058774	DK 1291 B	2011	171.500.000.000	B	
2	Station Wagon	Toyota Avenza / 1500 S	1.3.2.02.001.001.003 / 0021	DCH4214 / MHFM1CA4JBK058510	DK 1258 A	2011	171.500.000.000	B	
TOTAL							343.000.000.000		

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali

I. Wayan Ruziana
NIP. 19730104 199302 1 001

Pengurus Barang Pembantu Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali

I. Dewa Gede Arcasa
NIP. 19710511 199203 1 008

Diketahui,

PIHAK KEDUA
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I. Dewa Nyoman Ba. Dharma, S.I., M.Si
19721219 199503 1 009

Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I. Wayan Partha, S.Sos
NIP. 19750822 200701 1 017



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80233) Telepon: (0361) 245280
 Website : www.satpolpp.balitrov.go.id

BERITA ACARA OPNAME PERSEDIAAN BARANG

Nomor : B.36.032/9823/Set/SatpolPP

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan

Nama	: I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si
NIP	: 19721216 199803 1 006
Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Yang selanjutnya disebut	: Pihak Pertama

Nama	: I Wayan Parna, S.Sos
NIP	: 19750822 200701 1 017
Pangkat/Golongan	: Penata Muda Tk 1 (III/b)
Jabatan	: Pengurus Barang
Yang selanjutnya disebut	: Pihak Kedua

Pihak pertama telah melakukan Pemeriksaan Barang (Stok Opname) Kepada Pihak Kedua di tempat penyimpanan barang pada

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
1	Pertamax	0	Liter	14,000	0
2	Solar	0	Liter	17,200	0
Total					0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
1	Penghapus penghapus fiber castle besar	5	Pcs	3,500	17,500
2	Binder Clip No. 3	6	Kotak	3,500	21,000
3	Mag Kop 24 x36 cm	119	Buah	9,500	1,130,500
4	Binder Clip 105	1	Pack	6,500	6,500
5	Binder Clip 155	5	Pack	6,500	32,500
Total					1,208,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
1	Kertas HVS F4 Sidu 70gr	1	Rim	71,800	71,800
2	Kertas HVS F4 Sidu 70gr	1	Rim	71,800	71,800
Total					143,600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
1	Materal 10.000	20	Lembar	11,000	220,000
Total					220,000
Total Keseluruhan					1,571,600

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang (Stok Opname) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENGURUS BARANG

I WAYAN PARNA, S.SOS
NIP. 19750822 200701 1 017

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI

I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH., M.Si
NIP. 19721216 199803 1 006

**BUKU LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN/BARANG PAKAI HABIS
UNTUK PERIODE JANUARI S/D DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD/UPB : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

Kode	Uraian (Nama Barang)	Satuan (buah/ lusin/ setempat)	Keadaan Dec-22		Mutasi/Perubahan Januari s/d Desember 2023				Keadaan Dec-23		Ket
			Jml Barang	Jml Harga (Rp)	Bertambah		Berkurang		Jml Barang	Jml Harga (Rp)	
					Jml Barang	Jml Harga (Rp)	Jml Barang	Jml Harga (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E.1	Belanja Operasi		25,487	232,449,360	116,923	1,128,786,790	146,232	1,389,533,510	158	1,371,800	
E.1.02	Belanja Barang dan Jasa		25,487	232,449,360	116,923	1,128,786,790	146,232	1,389,533,510	158	1,371,800	
E.1.02.01	Belanja Barang										
E.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis										
E.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		25,448	231,798,000	73,818	981,912,890	87,898	1,212,897,690	-	-	
	Pertamax	Liter	19,685	178,965,000	-	-	19,685	178,965,000	-	-	
	Solar Non Subsid	Liter	5,763	52,833,000	-	-	5,763	52,833,000	-	-	
	Pertamax	Liter	-	-	31,250	400,000,000	21,250	400,000,000	-	-	
	Solar Non Subsid	Liter	-	-	5,060	81,557,500	5,060	81,557,500	-	-	
	Pertamax	Liter	-	-	24,590	329,515,000	24,590	329,515,000	-	-	
	Pertamax	Liter	-	-	8,660	121,240,000	8,660	121,240,000	-	-	
	Solar Non Subsid	Liter	-	-	3,000	51,600,000	3,000	51,600,000	-	-	
E.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	-	48,717	48,775,000	48,891	48,967,680	138	1,204,800	
	Lem Ulu Stok 21 Or	Buah	-	-	10	280,000	10	280,000	-	-	
	Bopost Box	Buah	-	-	25	112,500	25	112,500	-	-	
	Bopost Plat Balgan Fritan	Kotak	-	-	5	300,000	5	300,000	-	-	
	Pena Pilot Baller	Buah	-	-	35	542,500	35	542,500	-	-	
	Pensil Faber Castell 2B	Pos	-	-	15	84,000	15	84,000	-	-	
	Amplop Lokal Foto23 x 35 cm (1 warna)	Bus	-	-	9	396,000	9	396,000	-	-	
	Kardus Kecil 2 Pls	Pos	-	-	3	9,300	3	9,300	-	-	
	Kerko No. 12-1M	Kotak	-	-	150	675,000	150	675,000	-	-	
	Bantex Doc. File Foto	Buah	-	-	40	1,320,000	40	1,320,000	-	-	
	Box File Bantex ukuran 11.5	Buah	-	-	35	1,435,000	35	1,435,000	-	-	
	Map foto biasa setuas warna	Pos	-	-	3,000	3,000,000	3,000	3,000,000	-	-	
	Map Teka Besar	Buah	-	-	80	2,010,000	80	2,010,000	-	-	
	Stempap merek Diamond	Buah	-	-	40	220,000	40	220,000	-	-	
	Penghapus Penghapus Besi 3000	Pos	-	-	10	155,000	10	155,000	-	-	
	Penghapus penghapus faber castle besar	Pos	-	-	30	105,000	25	87,500	5	17,500	
	Binder Clp 105	Kotak	-	-	70	455,000	70	455,000	-	-	
	Binder Clp kerko 100	Kotak	-	-	50	325,000	50	325,000	-	-	
	Binder Clp No. 2	Kotak	-	-	120	420,000	114	396,000	6	24,000	
	Binder klip Seagull Trigonal Klp	Box	-	-	25	1,250,000	25	1,250,000	-	-	
	Kerko Stapler Type Hst 10	Buah	-	-	15	172,500	15	172,500	-	-	
	Foto Copy Hitam Putih Base	Pos	-	-	25,500	8,925,000	25,500	8,925,000	-	-	
	Map klip 24 x36 cm	Buah	-	-	700	5,950,000	591	5,519,500	109	1,130,500	
	Spanduk	Buah	-	-	80	3,200,000	80	3,200,000	-	-	
	Lem Ulu Stok 21 Or	Buah	-	-	1	28,000	1	28,000	-	-	
	Amplop Cover Foto 23 x 35 cm (1 warna)	Bus	-	-	1	60,000	1	60,000	-	-	
	Foto copy hitam Putih base	Lembar	-	-	3,137	1,087,950	3,137	1,087,950	-	-	
	Pengalihan gis biasa	Bus	-	-	50	1,250,000	50	1,250,000	-	-	
	Kerko No. 12-1M	Buah	-	-	80	270,000	80	270,000	-	-	
	Bantex Doc. File Foto	Buah	-	-	8	228,000	8	228,000	-	-	
	Map Foto	Buah	-	-	290	200,000	290	200,000	-	-	
	Binder klip No. 105 Jorko	Buah	-	-	10	85,000	10	85,000	-	-	

Binder Kip Kanko Binder Kip	Box	-	-	20	360.000	20	360.000	-	-
Trigonal Clip Seagull No 3	Kotak	-	-	50	274.000	50	274.000	-	-
Kanko Stapler HD 10	Buah	-	-	3	174.000	3	174.000	-	-
Lem Lhu Gros 21 Gr	Buah	-	-	1	28.000	1	28.000	-	-
Amplop Coklat Foto 23 x 35 cm (1 warna)	Box	-	-	1	66.000	1	66.000	-	-
Foto copy Hitam Putih biasa	Lembar	-	-	445	166.750	445	166.750	-	-
Penutup Jilid biasa	Buku	-	-	15	375.000	15	375.000	-	-
Kanko No. 10-1M	Buah	-	-	18	81.000	18	81.000	-	-
Bantex Doc. File Folder	Buah	-	-	3	114.000	3	114.000	-	-
Map Foto	Buah	-	-	48	48.000	48	48.000	-	-
Binder Kip No. 155 Jyoko	Buah	-	-	10	65.000	10	65.000	-	-
Binder Kip Kanko Binder Kip	Box	-	-	6	168.000	6	168.000	-	-
Trigonal Clip Seagull No 3	Kotak	-	-	11	60.500	11	60.500	-	-
Kanko Stapler HD 10	Buah	-	-	3	116.000	3	116.000	-	-
Foto copy Hitam Putih Biasa	Lembar	-	-	3.085	1.289.750	3.085	1.289.750	-	-
Map 5Mn No 10-1M	Kotak	-	-	15	67.500	15	67.500	-	-
Map Teka Besar	Buah	-	-	15	502.500	15	502.500	-	-
Stapling Pin	Pcs	-	-	290	575.000	290	575.000	-	-
Binder Clip Kanko Type 208	Kotak	-	-	10	160.000	10	160.000	-	-
Foto Copy Hitam Putih Biasa	Lembar	-	-	1.935	677.250	1.935	677.250	-	-
Ko Stapler Kanko No. 10-1M	Buah	-	-	4	18.800	4	18.800	-	-
Trigonal Clip Seagull No. 1	Kotak	-	-	7	54.600	7	54.600	-	-
Map Foto Kartas	Buah	-	-	100	120.000	100	120.000	-	-
Foto Copy Hitam Putih Biasa	Lembar	-	-	2.074	725.900	2.074	725.900	-	-
Laminating Jilid Biasa	Set	-	-	20	600.000	20	600.000	-	-
Map 5 Mn No 10-1M	Buah	-	-	5	22.500	5	22.500	-	-
Bantex File Ordner Plastik	Buah	-	-	5	250.000	5	250.000	-	-
Map Kanko Map Plastik	Buah	-	-	7	16.100	7	16.100	-	-
Binder Clip no. 3	Kotak	-	-	5	140.000	5	140.000	-	-
Binder Kip Kanko Binder Kip	Box	-	-	5	17.500	5	17.500	-	-
Kanko Stapler HD 10	Buah	-	-	1	11.500	1	11.500	-	-
Buku Agenda Surat	Buah	-	-	6	591.600	6	591.600	-	-
Foto Copy Hitam Putih Biasa	Lembar	-	-	728	254.800	728	254.800	-	-
Kanko No. 10 - 1M	Buah	-	-	2	9.400	2	9.400	-	-
Bantex File Ordner Plastik	Buah	-	-	2	145.000	2	145.000	-	-
Binder Clip Seagull Trigonal Kip	Box	-	-	2	101.000	2	101.000	-	-
Buku Tulis Folio Banteng Olor 100br	Buah	-	-	1	21.000	1	21.000	-	-
Saker Staples No 10	Pack	-	-	6	9.600	6	9.600	-	-
Map Foto biasa semua warna	Pcs	-	-	192	192.000	192	192.000	-	-
Map Teka Kecil	Buah	-	-	1	26.000	1	26.000	-	-
Binder Clip 105	Pack	-	-	5	32.500	4	26.000	1	6.500
Binder Clip 155	Pack	-	-	20	130.000	15	97.500	5	32.500
Kanko Stapler Type Hd-10	Buah	-	-	2	23.000	2	23.000	-	-
Amplop Coklat Foto 23x35 cm(1 warna)	Box	-	-	1	66.000	1	66.000	-	-
Stapling Sheet Diamond	Buah	-	-	10	55.000	10	55.000	-	-
Album Foto	Buah	-	-	1	66.000	1	66.000	-	-
Barang Detakan Fotocopy Hitam Putih Biasa	Lembar	-	-	1.715	600.250	1.715	600.250	-	-
Cetak Buku Cover & Jilid 101 s.d 200 hal bahan HVS A4/F4	Buah	-	-	3	285.000	3	285.000	-	-
Cetak Kartu Undangan Ux 44 Dua Bar Print Double Full Color + Amplop	Buah	-	-	165	2.475.000	165	2.475.000	-	-
Barang Detakan Fotocopy Hitam Putih Biasa	Lembar	-	-	600	210.000	600	210.000	-	-

51.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		7	514,360	478	26,582,200	485	26,552,960	2	143,800
	Amplip Caang A 10x24 cm	Rox	-	-	10	160,000	10	160,000	-	-
	Kertas HVS Sdu F4 - 70gr	Rm	7	514,360	180	12,924,000	187	13,438,380	-	-
	Kertas HVS Sdu A4 - 70 Gsm	Rm	-	-	18	1,314,000	18	1,314,000	-	-
	Kertas HVS Sdu F4 70Gsm	Rm	-	-	18	1,292,400	18	1,292,400	-	-
	Kertas HVS Sdu A4 - 70 Gsm	Rm	-	-	3	219,000	3	219,000	-	-
	Kertas HVS Sdu F4 70Gsm	Rm	-	-	4	287,200	4	287,200	-	-
	Kertas HVS F4 Sdu	rm	-	-	75	5,385,000	75	5,385,000	-	-
	Kertas HVS Sdu F4	Rm	-	-	11	789,800	11	789,800	-	-
	Amplip Jaza No. 104	Pcs	-	-	100	190,000	100	190,000	-	-
	Kertas HVS F4 Sdu	Rm	-	-	25	1,795,000	25	1,795,000	-	-
	Kertas HVS F4 Sdu	Rm	-	-	10	718,000	10	718,000	-	-
	Kertas HVS F4 Sdu 70gr	Rm	-	-	15	1,145,800	15	1,145,800	1	71,800
	Kertas HVS F4 Sdu 70gr	Rm	-	-	5	359,000	4	287,200	1	71,800
51.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		15	150,000	382	1,822,000	347	3,762,000	38	225,000
	Materai 10.000	Lembar	15	150,000	270	2,870,000	295	2,900,000	30	225,000
	Materai 10.000	Lembar	-	-	30	320,000	30	320,000	-	-
	Materai 10.000	Lembar	-	-	30	300,000	30	300,000	-	-
	Materai 10000	Lembar	-	-	12	132,000	12	132,000	-	-
51.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		-	-	122	25,480,800	122	25,460,000	-	-
	Refill Toner Hp Laserjet 12A	Buah	-	-	25	2,000,000	25	2,000,000	-	-
	Tinta Hp 30A Black Original Laserjet Toner Cartridge CF230A	Buah	-	-	1	1,400,000	1	1,400,000	-	-
	Tinta Hp 78A Black Original Laserjet Toner Cartridge CE278A	Buah	-	-	1	1,100,000	1	1,100,000	-	-
	Tinta Printer Hitam Epson 694	Buah	-	-	20	800,000	20	800,000	-	-
	Hp 12A Black Original Laserjet Toner Cartridge Q2612A	Unit	-	-	2	2,200,000	2	2,200,000	-	-
	Refill TonerK Hp Laserjet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3000Mb/3020/3030/3000Mb/M1005Mp/M1319 Mp 12A Q2612A	Buah	-	-	38	3,120,000	38	3,120,000	-	-
	Hp 12A Black Original Laserjet Toner Cartridge Q2612A	Unit	-	-	1	1,100,000	1	1,100,000	-	-
	Refill Toner Hp Laserjet 12 A	Unit	-	-	8	640,000	8	640,000	-	-
	Toner Toner Printer Cartridge HP Laserjet 85 A	Buah	-	-	4	4,400,000	4	4,400,000	-	-
	Toner Laserjet 36 A	Buah	-	-	3	3,030,000	3	3,030,000	-	-
	Tinta Epson C13700V100 ink Bottle 903 Dye (Bk) Compatibly L 1116, L3110, L2190, L5190	Unit	-	-	5	850,000	5	850,000	-	-
	Tinta Hp Laser Jet 83A	Buah	-	-	1	1,050,000	1	1,050,000	-	-
	Tinta Hp Laser Jet 83A	Buah	-	-	1	1,030,000	1	1,050,000	-	-
	Refill Toner A HP Laserjet 12 A	Buah	-	-	6	480,000	6	480,000	-	-
	Toner Laserjet HP 12 A Original Cartridge	Buah	-	-	1	1,100,000	1	1,100,000	-	-
	Refill Toner A HP Laserjet 12 A	Buah	-	-	3	240,000	3	240,000	-	-
	Toner Laserjet HP 12 A Original Cartridge	Buah	-	-	1	1,100,000	1	1,100,000	-	-
51.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		-	-	547	34,894,000	547	34,894,000	-	-
	Philips Lampu Tembak/Gantung 30 Watt Indoor/Outdoor Original	Buah	-	-	5	2,250,000	5	2,250,000	-	-
	Lampu T8 LED Tube Batan 16 Watt	Buah	-	-	35	3,874,500	35	3,874,500	-	-
	Lampu Philips Intelingkan 20 Watt	Buah	-	-	55	4,875,000	55	4,875,000	-	-
	lmba LED 25 Watt 1 Pcs	Buah	-	-	35	3,885,000	35	3,885,000	-	-
	Lampu T8 LED Tube Batan 8 Watt	Buah	-	-	10	1,296,000	10	1,296,000	-	-
	Trips Relais RTA Philips 18 Watt	Buah	-	-	50	4,030,000	50	4,030,000	-	-
	Lampu Philips Hemat Energi 23 Watt E23	Buah	-	-	80	5,728,000	80	5,728,000	-	-
	Kabel Listrik (Vercel) Ukuran 2x1,5 mm 300-500 Watt/roll	Buah	-	-	2	1,340,000	2	1,340,000	-	-
	Kabel Listrik Kabel HDMI 10 Meter, HDMI AV Cable For HDTV	Buah	-	-	2	460,000	2	460,000	-	-
	Tang	Buah	-	-	1	243,000	1	243,000	-	-
	MCB Listrik PLN SZMR Mekan Riser 2 Ampere	Buah	-	-	8	1,580,000	8	1,580,000	-	-

	Obeng Tergem Vissel TD-1300	Buah	-	-	4	882.000	4	3.528.000	-	-
	Talangan/Slak Pengangk Lantai	Buah	-	-	3	1.950.000	3	5.850.000	-	-
	Cuk Rod (Aksi) Ukuran 10MM Kapasitas 600 Watt	Buah	-	-	5	1.300.000	5	6.500.000	-	-
	Hande / Cair Starter	Buah	-	-	36	2.128.000	36	76.608.000	-	-
	Klem Kabel 10	Buah	-	-	15	324.000	15	4.860.000	-	-
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi		-	-	400	8.000.000	400	8.000.000	-	-
	Paving Blok	M2	-	-	400	8.000.000	400	8.000.000	-	-
	Jumlah		29.407	232.448.380	118.823	1.128.791.700	140.232	1.268.533.510	108	1.071.800

Mengingat
KEPALA SATUAN



Dewa Nyoman Bal Dharmadi, SH., M.Si
NIP. 19721216 199803 1 006

Bali, 29 Desember 2023
Pengurus Barang



I Wwan Pama S Sis
NIP. 19750822 200701 1 017



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Aset Tetap				1,822,141,000							
2		PERALATAN DAN MESIN		0			9,090,446,211	139,480,073	135,815,777	9,365,742,061	(9,365,742,061)
1.3.2.1		ALAT BESAR									
1.3.2.1.1		ALAT BESAR DARAT		0			140.000.000	0	0	140.000.000	(140,000,000)
1.3.2.1.1.10		ALAT PENGANGKAT		0			140.000.000	0	0	140.000.000	(140,000,000)
1.3.2.1.1.10.1	2	Tower Crane	12 2006	0 0	0		140.000.000	0	0	140.000.000	(140,000,000)
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		0			6.319.307.326	73.348.959	73.348.960	6.466.005.245	(6,466,005,245)
1.3.2.2.1.1		KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		0			4.228.240.170	58.696.995	58.696.995	4.345.634.160	(4,345,634,160)
1.3.2.2.1.1.3	2	Station Wagon	12 1994	0 0	0		30.000.000	0	0	30.000.000	(30,000,000)
1.3.2.2.1.1.3	4	Station Wagon	10 2010	0 0	0		402.204.900	0	0	402.204.900	(402,204,900)
1.3.2.2.1.1.3	5	Station Wagon	7 2010	0 0	0		131.000.000	0	0	131.000.000	(131,000,000)
1.3.2.2.1.1.3	6	Station Wagon	7 2010	0 0	0		131.000.000	0	0	131.000.000	(131,000,000)
1.3.2.2.1.1.3	7	Station Wagon	10 2011	0 0	0		145.400.000	0	0	145.400.000	(145,400,000)
1.3.2.2.1.1.3	8	Station Wagon	10 2011	0 0	0		145.400.000	0	0	145.400.000	(145,400,000)
1.3.2.2.1.1.3	9	Station Wagon	4 2012	0 0	0		192.139.200	0	0	192.139.200	(192,139,200)
1.3.2.2.1.1.3	10	Station Wagon	4 2012	0 0	0		194.009.200	0	0	194.009.200	(194,009,200)
1.3.2.2.1.1.3	12	Station Wagon	12 1996	0 0	0		90.000.000	0	0	90.000.000	(90,000,000)
1.3.2.2.1.1.3	13	Station Wagon	12 2015	0 0	0		203.000.000	0	0	203.000.000	(203,000,000)
1.3.2.2.1.1.3	14	Station Wagon	12 2015	0 0	0		203.000.000	0	0	203.000.000	(203,000,000)
1.3.2.2.1.1.3	15	Station Wagon	12 2015	0 0	0		203.000.000	0	0	203.000.000	(203,000,000)
1.3.2.2.1.1.3	16	Station Wagon	12 2015	0 0	0		252.440.000	0	0	252.440.000	(252,440,000)
1.3.2.2.1.1.3	17	Station Wagon	12 2015	0 0	0		412.700.000	0	0	412.700.000	(412,700,000)
1.3.2.2.1.1.3	18	Station Wagon	12 2015	0 0	0		274.040.000	0	0	274.040.000	(274,040,000)
1.3.2.2.1.1.3	19	Station Wagon	8 2019	0 2	7		247.981.156	36.311.281	36.311.280	320.603.717	(320,603,717)
1.3.2.2.1.1.3	20	Station Wagon	4 2017	0 0	3		257.435.714	22.385.714	22.385.715	302.207.143	(302,207,143)
1.3.2.2.1.1.3	30	Station Wagon	12 2011	0 0	0		171.500.000	0	0	171.500.000	(171,500,000)
1.3.2.2.1.1.3	31	Station Wagon	12 2011	0 0	0		171.500.000	0	0	171.500.000	(171,500,000)
1.3.2.2.1.1.6	2	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	9 2012	0 0	0		370.490.000	0	0	370.490.000	(370,490,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.2.1.2		KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		0			177.950.000	0	0	177.950.000	(177,950,000)
1.3.2.2.1.2.3	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12 2013	0 0	0		177.950.000	0	0	177.950.000	(177,950,000)
1.3.2.2.1.3		KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG		0			1.031.914.900	0	0	1.031.914.900	(1,031,914,900)
1.3.2.2.1.3.2	1	Pick Up	6 2008	0 0	0		121.630.000	0	0	121.630.000	(121,630,000)
1.3.2.2.1.3.2	2	Pick Up	10 2010	0 0	0		365.440.100	0	0	365.440.100	(365,440,100)
1.3.2.2.1.3.2	3	Pick Up	9 2012	0 0	0		182.194.800	0	0	182.194.800	(182,194,800)
1.3.2.2.1.3.2	4	Pick Up	11 2013	0 0	0		362.650.000	0	0	362.650.000	(362,650,000)
1.3.2.2.1.4		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		0			392.359.399	3.023.393	3.023.393	398.406.185	(398,406,185)
1.3.2.2.1.4.1	2	Sepeda Motor	12 2001	0 0	0		20.000.000	0	0	20.000.000	(20,000,000)
1.3.2.2.1.4.1	5	Sepeda Motor	12 2006	0 0	0		9.518.000	0	0	9.518.000	(9,518,000)
1.3.2.2.1.4.1	6	Sepeda Motor	12 2010	0 0	0		34.750.000	0	0	34.750.000	(34,750,000)
1.3.2.2.1.4.1	7	Sepeda Motor	12 2010	0 0	0		34.750.000	0	0	34.750.000	(34,750,000)
1.3.2.2.1.4.1	8	Sepeda Motor	11 2011	0 0	0		15.190.000	0	0	15.190.000	(15,190,000)
1.3.2.2.1.4.1	9	Sepeda Motor	12 2012	0 0	0		29.416.750	0	0	29.416.750	(29,416,750)
1.3.2.2.1.4.1	10	Sepeda Motor	12 2012	0 0	0		29.416.750	0	0	29.416.750	(29,416,750)
1.3.2.2.1.4.1	11	Sepeda Motor	12 2015	0 0	0		30.850.000	0	0	30.850.000	(30,850,000)
1.3.2.2.1.4.1	12	Sepeda Motor	12 2015	0 0	0		30.850.000	0	0	30.850.000	(30,850,000)
1.3.2.2.1.4.1	13	Sepeda Motor	12 2015	0 0	0		30.850.000	0	0	30.850.000	(30,850,000)
1.3.2.2.1.4.1	14	Sepeda Motor	12 2015	0 0	0		30.850.000	0	0	30.850.000	(30,850,000)
1.3.2.2.1.4.1	15	Sepeda Motor	12 2015	0 0	0		30.850.000	0	0	30.850.000	(30,850,000)
1.3.2.2.1.4.1	16	Sepeda Motor	12 2015	0 0	0		30.850.000	0	0	30.850.000	(30,850,000)
1.3.2.2.1.4.1	17	Sepeda Motor	12 2015	0 0	0		16.857.000	0	0	16.857.000	(16,857,000)
1.3.2.2.1.4.1	18	Sepeda Motor	12 2015	0 0	0		16.857.000	0	0	16.857.000	(16,857,000)
1.3.2.2.1.4.1	19	Sepeda Motor	12 2022	0 5	11		503.899	3.023.393	3.023.393	6.550.685	(6,550,685)
1.3.2.2.1.6		KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS		0			488.842.857	11.628.571	11.628.572	512.100.000	(512,100,000)
1.3.2.2.1.6.19	1	Mobil Unit Kesehatan Hewan	6 2013	0 0	0		390.000.000	0	0	390.000.000	(390,000,000)
1.3.2.2.1.6.110	1	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	10 2018	0 1	9		98.842.857	11.628.571	11.628.572	122.100.000	(122,100,000)
1.3.2.2.2		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		0			21.000.000	0	0	21.000.000	(21,000,000)
1.3.2.2.2.2		KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG		0			21.000.000	0	0	21.000.000	(21,000,000)
1.3.2.2.2.2.1	1	Sepeda	11 2017	0 0	0		1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN		SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
				Thn	Bulan	Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.2.2.1	2	Sepeda	11 2017	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	3	Sepeda	11 2017	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	4	Sepeda	11 2017	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	5	Sepeda	11 2017	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	6	Sepeda	11 2017	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	7	Sepeda	1 2018	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	8	Sepeda	1 2018	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	9	Sepeda	1 2018	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	10	Sepeda	1 2018	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	11	Sepeda	1 2018	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.2.2.1	12	Sepeda	1 2018	0	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA										
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR		0				225.367.500	495.000	495.000	226.357.500	(226,357,500)
1.3.2.5.1.4		ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		0				222.480.000	0	0	222.480.000	(222,480,000)
1.3.2.5.1.4.2	4	Lemari Kayu	12 2003	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	(4,000,000)
1.3.2.5.1.4.2	5	Lemari Kayu	12 2003	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	(4,000,000)
1.3.2.5.1.4.2	6	Lemari Kayu	12 2005	0	0	0	0	8.725.000	0	0	8.725.000	(8,725,000)
1.3.2.5.1.4.2	7	Lemari Kayu	12 2005	0	0	0	0	8.725.000	0	0	8.725.000	(8,725,000)
1.3.2.5.1.4.4	1	Rak Kayu	12 2004	0	0	0	0	4.250.000	0	0	4.250.000	(4,250,000)
1.3.2.5.1.4.4	2	Rak Kayu	12 2004	0	0	0	0	4.250.000	0	0	4.250.000	(4,250,000)
1.3.2.5.1.4.4	3	Rak Kayu	12 2006	0	0	0	0	8.250.000	0	0	8.250.000	(8,250,000)
1.3.2.5.1.4.4	4	Rak Kayu	12 2006	0	0	0	0	8.250.000	0	0	8.250.000	(8,250,000)
1.3.2.5.1.4.4	5	Rak Kayu	12 2006	0	0	0	0	8.250.000	0	0	8.250.000	(8,250,000)
1.3.2.5.1.4.5	9	Filing Cabinet Besi	12 2006	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	(2,000,000)
1.3.2.5.1.4.5	10	Filing Cabinet Besi	12 2006	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	(2,000,000)
1.3.2.5.1.4.5	11	Filing Cabinet Besi	12 2006	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	(2,000,000)
1.3.2.5.1.4.5	15	Filing Cabinet Besi	12 2004	0	0	0	0	4.700.000	0	0	4.700.000	(4,700,000)
1.3.2.5.1.4.5	16	Filing Cabinet Besi	12 2004	0	0	0	0	4.700.000	0	0	4.700.000	(4,700,000)
1.3.2.5.1.4.5	17	Filing Cabinet Besi	12 2006	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	(2,200,000)
1.3.2.5.1.4.5	18	Filing Cabinet Besi	12 2006	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	(2,200,000)
1.3.2.5.1.4.5	21	Filing Cabinet Besi	7 2011	0	0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.4.5	22	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	23	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	24	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	25	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	26	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	27	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	28	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	29	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	30	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	31	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	32	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	33	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	34	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	35	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	36	Filing Cabinet Besi	7 2011	0 0	0	0	4.030.000	0	0	4.030.000	(4,030,000)
1.3.2.5.1.4.5	37	Filing Cabinet Besi	4 2014	0 0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	(2,500,000)
1.3.2.5.1.4.5	38	Filing Cabinet Besi	4 2014	0 0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	(2,500,000)
1.3.2.5.1.4.5	39	Filing Cabinet Besi	4 2014	0 0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	(2,500,000)
1.3.2.5.1.4.5	40	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	41	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	42	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	43	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	44	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	45	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	46	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	47	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	48	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	49	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	50	Filing Cabinet Besi	6 2015	0 0	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000	(2,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	51	Filing Cabinet Besi	5 2017	0 0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	(4,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	52	Filing Cabinet Besi	5 2017	0 0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	(4,900,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.1.4.5	53	Filing Cabinet Besi	5 2017	0 0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	(4,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	54	Filing Cabinet Besi	5 2017	0 0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	(4,900,000)
1.3.2.5.1.4.5	55	Filing Cabinet Besi	5 2017	0 0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	(4,900,000)
1.3.2.5.1.4.7	2	Brandkas	11 2011	0 0	0	0	7.750.000	0	0	7.750.000	(7,750,000)
1.3.2.5.1.4.7	3	Brandkas	11 2011	0 0	0	0	7.850.000	0	0	7.850.000	(7,850,000)
1.3.2.5.1.5		ALAT KANTOR LAINNYA		0			2.887.500	495.000	495.000	3.877.500	(3,877,500)
1.3.2.5.1.5.88	1	Alat Kantor Lainnya	2 2020	0 1	1	1	2.887.500	495.000	495.000	3.877.500	(3,877,500)
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		0			642.201.153	36.219.433	36.975.641	715.396.227	(715,396,227)
1.3.2.5.2.1		MEUBELAIR		0			311.811.653	22.465.993	22.466.016	356.743.662	(356,743,662)
1.3.2.5.2.1.2	1	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	2	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	3	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	4	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	5	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	6	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	7	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	8	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	9	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	10	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	11	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.2	12	Meja Kerja Kayu	4 2017	0 0	0	0	3.025.000	0	0	3.025.000	(3,025,000)
1.3.2.5.2.1.4	21	Kursi Kayu	4 2014	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.4	22	Kursi Kayu	4 2014	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.4	23	Kursi Kayu	4 2014	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.4	24	Kursi Kayu	4 2014	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.4	25	Kursi Kayu	4 2014	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.4	26	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	27	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	28	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	29	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	30	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.4	31	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	32	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	33	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	34	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	35	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	36	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	37	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	38	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	39	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	40	Kursi Kayu	9 2015	0 0	0	0	595.000	0	0	595.000	(595,000)
1.3.2.5.2.1.4	41	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	42	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	43	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	44	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	45	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	46	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	47	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	48	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	49	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	50	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	51	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.4	52	Kursi Kayu	4 2017	0 0	0	0	690.000	0	0	690.000	(690,000)
1.3.2.5.2.1.8	12	Meja Rapat	5 2013	0 0	0	0	25.500.000	0	0	25.500.000	(25,500,000)
1.3.2.5.2.1.8	13	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)
1.3.2.5.2.1.8	14	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)
1.3.2.5.2.1.8	15	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)
1.3.2.5.2.1.8	16	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)
1.3.2.5.2.1.8	17	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)
1.3.2.5.2.1.8	18	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)
1.3.2.5.2.1.8	19	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)
1.3.2.5.2.1.8	20	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.8	21	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	22	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	23	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	24	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	25	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	26	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	27	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	28	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	29	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	30	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	31	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	32	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	33	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	34	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	35	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	36	Meja Rapat	10 2019	0 0	9	3.074.500	473.000	473.000	4.020.500	(4,020,500)	
1.3.2.5.2.1.8	37	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	38	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	39	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	40	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	41	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	42	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	43	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	44	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	45	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	46	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	47	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.8	48	Meja Rapat	4 2020	0 1	3	2.601.500	473.000	473.000	3.547.500	(3,547,500)	
1.3.2.5.2.1.24	9	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)	
1.3.2.5.2.1.24	10	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)	
1.3.2.5.2.1.24	12	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)	



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.24	14	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	15	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	16	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	17	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	18	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	32	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	(1,700,000)
1.3.2.5.2.1.24	33	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	36	Meja 1/2 Biro	12 2009	0 0	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	(1,980,000)
1.3.2.5.2.1.24	37	Meja 1/2 Biro	12 2009	0 0	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	(1,980,000)
1.3.2.5.2.1.24	38	Meja 1/2 Biro	12 2009	0 0	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	(1,980,000)
1.3.2.5.2.1.24	39	Meja 1/2 Biro	12 2009	0 0	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	(1,980,000)
1.3.2.5.2.1.24	40	Meja 1/2 Biro	12 2009	0 0	0	0	1.980.000	0	0	1.980.000	(1,980,000)
1.3.2.5.2.1.24	41	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	42	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	43	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	44	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	45	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	46	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	47	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	48	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	49	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	50	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	51	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	52	Meja 1/2 Biro	12 2003	0 0	0	0	1.670.000	0	0	1.670.000	(1,670,000)
1.3.2.5.2.1.24	53	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	54	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	55	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	56	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.24	57	Meja 1/2 Biro	12 2004	0 0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	(1,200,000)
1.3.2.5.2.1.30	35	Kursi Rapat	5 2013	0 0	0	0	1.150.000	0	0	1.150.000	(1,150,000)
1.3.2.5.2.1.30	36	Kursi Rapat	5 2013	0 0	0	0	1.150.000	0	0	1.150.000	(1,150,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	88	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	89	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	90	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	91	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	92	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	93	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	94	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	95	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	96	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	97	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	98	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	99	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	100	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	101	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	102	Kursi Rapat	4 2014	0 0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)	
1.3.2.5.2.1.30	103	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	104	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	105	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	106	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	107	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	108	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	109	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	113	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	114	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	115	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	116	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	117	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	118	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	119	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	120	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	
1.3.2.5.2.1.30	121	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)	



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	122	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)
1.3.2.5.2.1.30	123	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)
1.3.2.5.2.1.30	124	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)
1.3.2.5.2.1.30	125	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)
1.3.2.5.2.1.30	126	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)
1.3.2.5.2.1.30	127	Kursi Rapat	6 2015	0 0	0	0	710.000	0	0	710.000	(710,000)
1.3.2.5.2.1.30	128	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	129	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	130	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	131	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	132	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	133	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	134	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	135	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	136	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	137	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	138	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	139	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	140	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	141	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	142	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	143	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	144	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	145	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	146	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	147	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	148	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	149	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	150	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.027	226.583	226.584	1.888.194	(1,888,194)
1.3.2.5.2.1.30	151	Kursi Rapat	11 2019	0 0	0	10	1.435.032	226.584	226.584	1.888.200	(1,888,200)
1.3.2.5.2.1.31	1	Kursi Tamu	12 2002	0 0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	(4,000,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.31	5	Kursi Tamu	11 2011	0 0	0	0	3.920.000	0	0	3.920.000	(3,920,000)
1.3.2.5.2.1.31	6	Kursi Tamu	4 2014	0 0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	(2,000,000)
1.3.2.5.2.1.39	3	Meja Komputer	12 2009	0 0	0	0	550.000	0	0	550.000	(550,000)
1.3.2.5.2.1.39	4	Meja Komputer	12 2009	0 0	0	0	550.000	0	0	550.000	(550,000)
1.3.2.5.2.1.39	5	Meja Komputer	12 2009	0 0	0	0	550.000	0	0	550.000	(550,000)
1.3.2.5.2.1.39	6	Meja Komputer	12 2009	0 0	0	0	550.000	0	0	550.000	(550,000)
1.3.2.5.2.1.39	9	Meja Komputer	10 2010	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.39	10	Meja Komputer	10 2010	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.39	11	Meja Komputer	10 2010	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.39	12	Meja Komputer	10 2010	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.39	13	Meja Komputer	10 2010	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.1.39	14	Meja Komputer	12 2010	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.2.4		ALAT PENDINGIN		0			150.472.250	11.783.440	12.539.625	174.795.315	(174,795,315)
1.3.2.5.2.4.3	5	A.C. Window	12 2005	0 0	0	0	8.435.000	0	0	8.435.000	(8,435,000)
1.3.2.5.2.4.3	7	A.C. Window	12 2005	0 0	0	0	8.435.000	0	0	8.435.000	(8,435,000)
1.3.2.5.2.4.4	6	A.C. Split	5 2011	0 0	0	0	5.130.000	0	0	5.130.000	(5,130,000)
1.3.2.5.2.4.4	7	A.C. Split	5 2011	0 0	0	0	5.130.000	0	0	5.130.000	(5,130,000)
1.3.2.5.2.4.4	8	A.C. Split	5 2011	0 0	0	0	5.130.000	0	0	5.130.000	(5,130,000)
1.3.2.5.2.4.4	9	A.C. Split	5 2011	0 0	0	0	5.130.000	0	0	5.130.000	(5,130,000)
1.3.2.5.2.4.4	15	A.C. Split	10 2012	0 0	0	0	5.346.000	0	0	5.346.000	(5,346,000)
1.3.2.5.2.4.4	18	A.C. Split	9 2014	0 0	0	0	7.490.000	0	0	7.490.000	(7,490,000)
1.3.2.5.2.4.4	19	A.C. Split	6 2015	0 0	0	0	8.302.500	0	0	8.302.500	(8,302,500)
1.3.2.5.2.4.4	20	A.C. Split	7 2017	0 0	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	(8,497,000)
1.3.2.5.2.4.4	21	A.C. Split	7 2017	0 0	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	(8,497,000)
1.3.2.5.2.4.4	22	A.C. Split	7 2017	0 0	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	(8,497,000)
1.3.2.5.2.4.4	23	A.C. Split	7 2017	0 0	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	(8,497,000)
1.3.2.5.2.4.4	24	A.C. Split	7 2017	0 0	0	0	8.497.000	0	0	8.497.000	(8,497,000)
1.3.2.5.2.4.4	25	A.C. Split	7 2019	0 0	6	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	(6,534,000)
1.3.2.5.2.4.4	26	A.C. Split	7 2019	0 0	6	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	(6,534,000)
1.3.2.5.2.4.4	27	A.C. Split	7 2019	0 0	6	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	(6,534,000)
1.3.2.5.2.4.4	28	A.C. Split	7 2019	0 0	6	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	(6,534,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.4.4	29	A.C. Split	7 2019	0 0	6	5.082.000	726.000	726.000	6.534.000	(6,534,000)	
1.3.2.5.2.4.4	30	A.C. Split	4 2020	0 1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	(5,465,625)	
1.3.2.5.2.4.4	31	A.C. Split	4 2020	0 1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	(5,465,625)	
1.3.2.5.2.4.4	32	A.C. Split	4 2020	0 1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	(5,465,625)	
1.3.2.5.2.4.4	33	A.C. Split	4 2020	0 1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	(5,465,625)	
1.3.2.5.2.4.4	34	A.C. Split	4 2020	0 1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	(5,465,625)	
1.3.2.5.2.4.4	35	A.C. Split	4 2020	0 1	3	4.008.125	728.750	728.750	5.465.625	(5,465,625)	
1.3.2.5.2.4.4	36	A.C. Split	2 2023	0 20	5	0	3.780.940	4.537.125	8.318.065	(8,318,065)	
1.3.2.5.2.6		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		0		179.917.250	1.970.000	1.970.000	183.857.250	(183,857,250)	
1.3.2.5.2.6.2	6	Televisi	7 2011	0 0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	(1,900,000)	
1.3.2.5.2.6.2	7	Televisi	7 2011	0 0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	(1,900,000)	
1.3.2.5.2.6.2	8	Televisi	7 2011	0 0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	(1,900,000)	
1.3.2.5.2.6.2	9	Televisi	7 2011	0 0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	(1,900,000)	
1.3.2.5.2.6.2	10	Televisi	5 2012	0 0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	(8,000,000)	
1.3.2.5.2.6.2	11	Televisi	6 2015	0 0	0	8.750.000	0	0	8.750.000	(8,750,000)	
1.3.2.5.2.6.8	1	Sound System	8 2013	0 0	0	59.715.000	0	0	59.715.000	(59,715,000)	
1.3.2.5.2.6.8	2	Sound System	9 2014	0 0	0	19.742.250	0	0	19.742.250	(19,742,250)	
1.3.2.5.2.6.8	3	Sound System	7 2019	0 0	6	13.790.000	1.970.000	1.970.000	17.730.000	(17,730,000)	
1.3.2.5.2.6.12	1	Wireless	12 2002	0 0	0	10.620.000	0	0	10.620.000	(10,620,000)	
1.3.2.5.2.6.22	1	Camera film	10 2014	0 0	0	22.450.000	0	0	22.450.000	(22,450,000)	
1.3.2.5.2.6.77	3	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7 2011	0 0	0	29.250.000	0	0	29.250.000	(29,250,000)	
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		0		241.309.500	0	0	241.309.500	(241,309,500)	
1.3.2.5.3.1		MEJA KERJA PEJABAT		0		165.149.500	0	0	165.149.500	(165,149,500)	
1.3.2.5.3.1.4	1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	11 2010	0 0	0	7.843.000	0	0	7.843.000	(7,843,000)	
1.3.2.5.3.1.5	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2009	0 0	0	6.875.000	0	0	6.875.000	(6,875,000)	
1.3.2.5.3.1.5	2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2009	0 0	0	6.875.000	0	0	6.875.000	(6,875,000)	
1.3.2.5.3.1.5	5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2010	0 0	0	6.363.500	0	0	6.363.500	(6,363,500)	
1.3.2.5.3.1.5	6	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12 2010	0 0	0	6.363.500	0	0	6.363.500	(6,363,500)	
1.3.2.5.3.1.6	3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2003	0 0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	(1,700,000)	
1.3.2.5.3.1.6	4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	(5,445,000)	



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3.1.6	5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	(5,445,000)
1.3.2.5.3.1.6	6	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	(5,445,000)
1.3.2.5.3.1.6	7	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	(5,445,000)
1.3.2.5.3.1.6	8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	5.445.000	0	0	5.445.000	(5,445,000)
1.3.2.5.3.1.6	12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	0 0	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	(5,390,000)
1.3.2.5.3.1.6	13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	0 0	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	(5,390,000)
1.3.2.5.3.1.6	14	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	0 0	0	0	5.390.000	0	0	5.390.000	(5,390,000)
1.3.2.5.3.1.6	15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 2013	0 0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	(4,000,000)
1.3.2.5.3.1.6	16	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2003	0 0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	(1,700,000)
1.3.2.5.3.1.6	17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12 2003	0 0	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	(1,700,000)
1.3.2.5.3.1.7	44	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	45	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	46	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	47	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	48	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	49	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	50	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	51	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	52	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	53	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	54	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	55	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	56	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	57	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	58	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	59	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	60	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	61	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	62	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	63	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	64	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3.1.7	65	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	66	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	67	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	68	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	69	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	70	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	71	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	72	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	73	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	74	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	75	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	76	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	77	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	78	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	79	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	80	Meja Kerja Pejabat Eselon V	12 2010	0 0	0	0	1.468.500	0	0	1.468.500	(1,468,500)
1.3.2.5.3.1.7	81	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	0 0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	(3,000,000)
1.3.2.5.3.1.7	82	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	0 0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	(3,000,000)
1.3.2.5.3.1.7	83	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	0 0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	(3,000,000)
1.3.2.5.3.1.8	1	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	0 0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	(3,000,000)
1.3.2.5.3.1.8	2	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	0 0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	(3,000,000)
1.3.2.5.3.1.8	3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	0 0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	(3,000,000)
1.3.2.5.3.1.8	4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	0 0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	(3,000,000)
1.3.2.5.3.1.8	5	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 2014	0 0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	(3,000,000)
1.3.2.5.3.3		KURSI KERJA PEJABAT		0			21.030.000	0	0	21.030.000	(21,030,000)
1.3.2.5.3.3.4	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	11 2010	0 0	0	0	1.850.000	0	0	1.850.000	(1,850,000)
1.3.2.5.3.3.5	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2009	0 0	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000	(1,320,000)
1.3.2.5.3.3.5	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2009	0 0	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000	(1,320,000)
1.3.2.5.3.3.5	5	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2010	0 0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.5.3.3.5	6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 2010	0 0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	(1,750,000)
1.3.2.5.3.3.6	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	(1,298,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.3.3.6	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	(1,298,000)
1.3.2.5.3.3.6	3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	(1,298,000)
1.3.2.5.3.3.6	4	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	(1,298,000)
1.3.2.5.3.3.6	5	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2009	0 0	0	0	1.298.000	0	0	1.298.000	(1,298,000)
1.3.2.5.3.3.6	9	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	0 0	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	(1,450,000)
1.3.2.5.3.3.6	10	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	0 0	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	(1,450,000)
1.3.2.5.3.3.6	11	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12 2010	0 0	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	(1,450,000)
1.3.2.5.3.3.6	12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 2013	0 0	0	0	700.000	0	0	700.000	(700,000)
1.3.2.5.3.3.7	81	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.3.3.7	82	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.3.3.7	83	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5 2013	0 0	0	0	500.000	0	0	500.000	(500,000)
1.3.2.5.3.6		KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT		0			45.180.000	0	0	45.180.000	(45,180,000)
1.3.2.5.3.6.4	1	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	11 2011	0 0	0	0	5.180.000	0	0	5.180.000	(5,180,000)
1.3.2.5.3.6.5	1	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	11 2011	0 0	0	0	4.475.000	0	0	4.475.000	(4,475,000)
1.3.2.5.3.6.5	2	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	11 2011	0 0	0	0	4.475.000	0	0	4.475.000	(4,475,000)
1.3.2.5.3.6.5	3	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	11 2011	0 0	0	0	4.475.000	0	0	4.475.000	(4,475,000)
1.3.2.5.3.6.5	4	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	11 2011	0 0	0	0	4.475.000	0	0	4.475.000	(4,475,000)
1.3.2.5.3.6.11	1	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6 2012	0 0	0	0	5.900.000	0	0	5.900.000	(5,900,000)
1.3.2.5.3.6.11	2	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6 2012	0 0	0	0	5.900.000	0	0	5.900.000	(5,900,000)
1.3.2.5.3.6.11	3	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6 2012	0 0	0	0	5.900.000	0	0	5.900.000	(5,900,000)
1.3.2.5.3.6.11	6	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	12 2012	0 0	0	0	4.400.000	0	0	4.400.000	(4,400,000)
1.3.2.5.3.7		LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		0			9.950.000	0	0	9.950.000	(9,950,000)
1.3.2.5.3.7.4	2	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	11 2012	0 0	0	0	4.975.000	0	0	4.975.000	(4,975,000)
1.3.2.5.3.7.4	3	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	11 2012	0 0	0	0	4.975.000	0	0	4.975.000	(4,975,000)
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		0			15.854.000	2.565.166	2.619.000	21.038.166	(21,038,166)
1.3.2.6.1.1		PERALATAN STUDIO AUDIO		0			2.834.000	436.000	436.000	3.706.000	(3,706,000)
1.3.2.6.1.1.36	1	Microphone/Wireless MIC	10 2019	0 0	9		2.834.000	436.000	436.000	3.706.000	(3,706,000)
1.3.2.6.1.2		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		0			13.020.000	2.129.166	2.183.000	17.332.166	(17,332,166)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN		SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
				Thn	Bulan	Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.1.2.105	3	Layar Film/Projector	7 2019	0	0	6		6.510.000	930.000	930.000	8.370.000	(8,370,000)
1.3.2.6.1.2.105	4	Layar Film/Projector	7 2019	0	0	6		6.510.000	930.000	930.000	8.370.000	(8,370,000)
1.3.2.6.1.2.163	1	Camera Conference	2 2023	0	8	2		0	269.166	323.000	592.166	(592,166)
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		0				249.389.365	1.680.000	1.680.000	252.749.365	(252,749,365)
1.3.2.6.2.1		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		0				201.695.365	1.680.000	1.680.000	205.055.365	(205,055,365)
1.3.2.6.2.1.1	1	Telephone (PABX)	12 2003	0	0	0		13.300.000	0	0	13.300.000	(13,300,000)
1.3.2.6.2.1.3	3	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	4	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	5	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	6	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	7	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	8	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	9	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	10	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	11	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	13	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	14	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.3	15	Pesawat Telephone	4 2011	0	0	0		1.100.000	0	0	1.100.000	(1,100,000)
1.3.2.6.2.1.6	98	Handy Talky (HT)	7 2015	0	0	0		5.450.000	0	0	5.450.000	(5,450,000)
1.3.2.6.2.1.6	99	Handy Talky (HT)	7 2015	0	0	0		5.450.000	0	0	5.450.000	(5,450,000)
1.3.2.6.2.1.6	100	Handy Talky (HT)	7 2015	0	0	0		5.450.000	0	0	5.450.000	(5,450,000)
1.3.2.6.2.1.6	103	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	104	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	105	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	106	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	107	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	108	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	109	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	110	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	111	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	112	Handy Talky (HT)	6 2017	0	0	0		6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.2.1.6	113	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	114	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	115	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	116	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	117	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	118	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	119	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	120	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	121	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	122	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	123	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	124	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	(6,118,557)
1.3.2.6.2.1.6	125	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.556	0	0	6.118.556	(6,118,556)
1.3.2.6.2.1.6	126	Handy Talky (HT)	6 2017	0 0	0	0	6.118.556	0	0	6.118.556	(6,118,556)
1.3.2.6.2.1.6	127	Handy Talky (HT)	9 2019	0 0	8	8	3.733.333	560.000	560.000	4.853.333	(4,853,333)
1.3.2.6.2.1.6	128	Handy Talky (HT)	9 2019	0 0	8	8	3.733.333	560.000	560.000	4.853.333	(4,853,333)
1.3.2.6.2.1.6	129	Handy Talky (HT)	9 2019	0 0	8	8	3.733.333	560.000	560.000	4.853.333	(4,853,333)
1.3.2.6.2.1.10	1	Facsimile	12 1990	0 0	0	0	800.000	0	0	800.000	(800,000)
1.3.2.6.2.5		ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF		0			47.694.000	0	0	47.694.000	(47,694,000)
1.3.2.6.2.5.1	1	Unit Tranceiver UHF Portable	12 2006	0 0	0	0	33.640.000	0	0	33.640.000	(33,640,000)
1.3.2.6.2.5.1	2	Unit Tranceiver UHF Portable	12 2012	0 0	0	0	14.054.000	0	0	14.054.000	(14,054,000)
1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR		0			361.795.000	0	0	361.795.000	(361,795,000)
1.3.2.6.3.1		PERALATAN PEMANCAR MF/MW		0			361.795.000	0	0	361.795.000	(361,795,000)
1.3.2.6.3.1.3	1	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	0 0	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	(72,039,000)
1.3.2.6.3.1.3	2	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	0 0	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	(72,039,000)
1.3.2.6.3.1.3	3	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	0 0	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	(72,039,000)
1.3.2.6.3.1.3	4	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	0 0	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	(72,039,000)
1.3.2.6.3.1.3	5	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2009	0 0	0	0	72.039.000	0	0	72.039.000	(72,039,000)
1.3.2.6.3.1.3	6	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2007	0 0	0	0	800.000	0	0	800.000	(800,000)
1.3.2.6.3.1.3	7	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2007	0 0	0	0	800.000	0	0	800.000	(800,000)
1.3.2.9		ALAT PERSENJATAAN									



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.9.1		SENJATA API		0			260.675.000	0	0	260.675.000	(260,675,000)
1.3.2.9.1.1		SENJATA GENGAM		0			248.850.000	0	0	248.850.000	(248,850,000)
1.3.2.9.1.1.1	1	Revolver	12 2002	0	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	(21,000,000)
1.3.2.9.1.1.1	2	Revolver	12 2002	0	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	(21,000,000)
1.3.2.9.1.1.1	3	Revolver	12 2002	0	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	(21,000,000)
1.3.2.9.1.1.1	4	Revolver	12 2002	0	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	(21,000,000)
1.3.2.9.1.1.1	5	Revolver	12 2002	0	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	(21,000,000)
1.3.2.9.1.1.2	1	Pistol	12 2003	0	0	0	42.000.000	0	0	42.000.000	(42,000,000)
1.3.2.9.1.1.2	2	Pistol	12 2004	0	0	0	44.250.000	0	0	44.250.000	(44,250,000)
1.3.2.9.1.1.2	3	Pistol	12 2005	0	0	0	57.600.000	0	0	57.600.000	(57,600,000)
1.3.2.9.1.3		SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG		0			8.700.000	0	0	8.700.000	(8,700,000)
1.3.2.9.1.3.2	1	Senapan Semi Otomatis	12 2002	0	0	0	700.000	0	0	700.000	(700,000)
1.3.2.9.1.3.6	1	Senapan Runduk	12 2002	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	(4,000,000)
1.3.2.9.1.3.6	2	Senapan Runduk	12 2002	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	(4,000,000)
1.3.2.9.1.10		SENJATA LAIN-LAIN		0			3.125.000	0	0	3.125.000	(3,125,000)
1.3.2.9.1.10.8	1	Senapan Gas	12 2003	0	0	0	3.125.000	0	0	3.125.000	(3,125,000)
1.3.2.9.2		PERSENJATAAN NON SENJATA API		0			180.375.000	0	0	180.375.000	(180,375,000)
1.3.2.9.2.1		ALAT KEAMANAN		0			173.550.000	0	0	173.550.000	(173,550,000)
1.3.2.9.2.1.11	5	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	10 2010	0	0	0	39.050.000	0	0	39.050.000	(39,050,000)
1.3.2.9.2.1.11	26	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	27	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	28	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	29	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	30	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	31	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	32	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.9.2.1.11	33	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0 0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	34	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0 0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	35	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2011	0 0	0	0	3.850.000	0	0	3.850.000	(3,850,000)
1.3.2.9.2.1.11	36	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	0 0	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	(19,200,000)
1.3.2.9.2.1.11	37	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	0 0	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	(19,200,000)
1.3.2.9.2.1.11	38	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	0 0	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	(19,200,000)
1.3.2.9.2.1.11	39	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	0 0	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	(19,200,000)
1.3.2.9.2.1.11	40	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	12 2002	0 0	0	0	19.200.000	0	0	19.200.000	(19,200,000)
1.3.2.9.2.2		NON SENJATA API		0			6.825.000	0	0	6.825.000	(6,825,000)
1.3.2.9.2.2.12	1	Pisau Lempar	12 2002	0 0	0	0	3.750.000	0	0	3.750.000	(3,750,000)
1.3.2.9.2.2.12	2	Pisau Lempar	12 2003	0 0	0	0	575.000	0	0	575.000	(575,000)
1.3.2.9.2.2.12	3	Pisau Lempar	12 2002	0 0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	(2,500,000)
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		0			296.792.992	20.320.887	16.223.051	333.336.930	(333,336,930)
1.3.2.10.1.2		PERSONAL KOMPUTER		0			296.792.992	20.320.887	16.223.051	333.336.930	(333,336,930)
1.3.2.10.1.2.1	8	P.C Unit	5 2011	0 0	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	(9,900,000)
1.3.2.10.1.2.1	9	P.C Unit	5 2011	0 0	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	(9,900,000)
1.3.2.10.1.2.1	12	P.C Unit	5 2011	0 0	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	(9,900,000)
1.3.2.10.1.2.1	14	P.C Unit	6 2012	0 0	0	0	9.950.000	0	0	9.950.000	(9,950,000)
1.3.2.10.1.2.1	15	P.C Unit	6 2012	0 0	0	0	9.950.000	0	0	9.950.000	(9,950,000)
1.3.2.10.1.2.1	16	P.C Unit	7 2013	0 0	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	(9,900,000)
1.3.2.10.1.2.1	17	P.C Unit	7 2013	0 0	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	(9,900,000)
1.3.2.10.1.2.1	18	P.C Unit	7 2013	0 0	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	(9,900,000)
1.3.2.10.1.2.1	20	P.C Unit	10 2014	0 0	0	0	9.975.000	0	0	9.975.000	(9,975,000)
1.3.2.10.1.2.1	21	P.C Unit	11 2016	0 0	0	0	9.999.998	0	0	9.999.998	(9,999,998)
1.3.2.10.1.2.1	23	P.C Unit	6 2017	0 0	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	(11,248,933)
1.3.2.10.1.2.1	24	P.C Unit	6 2017	0 0	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	(11,248,933)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.1.2.1	26	P.C Unit	6 2017	0 0	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	(11,248,933)
1.3.2.10.1.2.1	28	P.C Unit	10 2019	0 0	0	0	7.068.419	1.087.449	543.725	8.699.593	(8,699,593)
1.3.2.10.1.2.1	29	P.C Unit	10 2019	0 0	0	0	7.068.419	1.087.449	543.725	8.699.593	(8,699,593)
1.3.2.10.1.2.1	30	P.C Unit	10 2019	0 0	0	0	7.068.420	1.087.449	543.725	8.699.594	(8,699,594)
1.3.2.10.1.2.1	31	P.C Unit	2 2023	0 15	5	0	0	6.166.665	7.400.000	13.566.665	(13,566,665)
1.3.2.10.1.2.2	3	Lap Top	5 2014	0 0	0	0	14.850.000	0	0	14.850.000	(14,850,000)
1.3.2.10.1.2.2	4	Lap Top	6 2021	0 1	5	0	5.638.646	1.780.625	1.780.625	9.199.896	(9,199,896)
1.3.2.10.1.2.2	5	Lap Top	6 2021	0 1	5	0	5.638.646	1.780.625	1.780.625	9.199.896	(9,199,896)
1.3.2.10.1.2.2	6	Lap Top	6 2021	0 1	5	0	5.638.646	1.780.625	1.780.625	9.199.896	(9,199,896)
1.3.2.10.1.2.3	1	Note Book	10 2010	0 0	0	0	14.500.000	0	0	14.500.000	(14,500,000)
1.3.2.10.1.2.3	7	Note Book	6 2012	0 0	0	0	14.900.000	0	0	14.900.000	(14,900,000)
1.3.2.10.1.2.3	8	Note Book	8 2012	0 0	0	0	14.750.000	0	0	14.750.000	(14,750,000)
1.3.2.10.1.2.3	9	Note Book	5 2013	0 0	0	0	14.800.000	0	0	14.800.000	(14,800,000)
1.3.2.10.1.2.3	11	Note Book	5 2014	0 0	0	0	14.850.000	0	0	14.850.000	(14,850,000)
1.3.2.10.1.2.3	14	Note Book	9 2019	0 0	0	0	12.333.333	1.850.000	616.667	14.800.000	(14,800,000)
1.3.2.10.1.2.3	15	Note Book	9 2019	0 0	0	0	12.333.333	1.850.000	616.667	14.800.000	(14,800,000)
1.3.2.10.1.2.3	16	Note Book	9 2019	0 0	0	0	12.333.333	1.850.000	616.667	14.800.000	(14,800,000)
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		0			132.529.375	3.695.628	3.319.125	139.544.128	(139,544,128)
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		0			127.539.375	3.695.628	3.319.125	134.554.128	(134,554,128)
1.3.2.10.2.3.1	3	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	0 0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	(5,500,000)
1.3.2.10.2.3.1	4	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	0 0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	(5,500,000)
1.3.2.10.2.3.1	5	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	0 0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	(5,500,000)
1.3.2.10.2.3.1	6	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	0 0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	(5,500,000)
1.3.2.10.2.3.1	7	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	0 0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	(5,500,000)
1.3.2.10.2.3.1	11	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	0 0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	(6,000,000)
1.3.2.10.2.3.1	12	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	0 0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	(6,000,000)
1.3.2.10.2.3.1	13	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	0 0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	(6,000,000)
1.3.2.10.2.3.2	11	Monitor	10 2010	0 0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	(3,500,000)
1.3.2.10.2.3.2	12	Monitor	10 2010	0 0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	(3,500,000)
1.3.2.10.2.3.2	13	Monitor	10 2010	0 0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	(3,500,000)
1.3.2.10.2.3.2	14	Monitor	10 2010	0 0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	(3,500,000)



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	0 0	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	(4,950,000)
1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	0 0	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	(4,950,000)
1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	0 0	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	(4,950,000)
1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	0 0	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	(4,950,000)
1.3.2.10.2.3.3	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8 2011	0 0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	(4,000,000)
1.3.2.10.2.3.3	15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2012	0 0	0	0	4.785.000	0	0	4.785.000	(4,785,000)
1.3.2.10.2.3.3	16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2013	0 0	0	0	4.290.000	0	0	4.290.000	(4,290,000)
1.3.2.10.2.3.3	17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 2013	0 0	0	0	4.290.000	0	0	4.290.000	(4,290,000)
1.3.2.10.2.3.3	18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	0 0	0	0	4.750.000	0	0	4.750.000	(4,750,000)
1.3.2.10.2.3.3	21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9 2014	0 0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	(5,000,000)
1.3.2.10.2.3.3	22	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11 2016	0 0	0	0	4.995.000	0	0	4.995.000	(4,995,000)
1.3.2.10.2.3.3	29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2017	0 0	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	(5,770,000)
1.3.2.10.2.3.3	30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2019	0 0	0	0	6.459.375	993.750	496.875	7.950.000	(7,950,000)
1.3.2.10.2.3.3	31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2019	0 0	0	0	1.950.000	300.000	150.000	2.400.000	(2,400,000)
1.3.2.10.2.3.3	32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2019	0 0	0	0	1.950.000	300.000	150.000	2.400.000	(2,400,000)
1.3.2.10.2.3.3	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 2023	0 18	6	0	0	2.101.878	2.522.250	4.624.128	(4,624,128)
1.3.2.10.2.4		PERALATAN JARINGAN		0			4.990.000	0	0	4.990.000	(4,990,000)
1.3.2.10.2.4.33	1	Peralatan Jaringan lainnya	12 2010	0 0	0	0	4.990.000	0	0	4.990.000	(4,990,000)
1.3.2.17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI		0			3.850.000	1.155.000	1.155.000	6.160.000	(6,160,000)
1.3.2.17.1		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		0			3.850.000	1.155.000	1.155.000	6.160.000	(6,160,000)
1.3.2.17.1.19		TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID		0			3.850.000	1.155.000	1.155.000	6.160.000	(6,160,000)
1.3.2.17.1.19.4	1	Jet Pump	5 2021	0 2	4	0	1.925.000	577.500	577.500	3.080.000	(3,080,000)
1.3.2.17.1.19.4	2	Jet Pump	5 2021	0 2	4	0	1.925.000	577.500	577.500	3.080.000	(3,080,000)
3		GEDUNG DAN BANGUNAN		1,762,441,000			777,076,342	14,337,290	14,337,290	805,750,922	956,690,078
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG		1,762,441,000			777.076.342	14.337.290	14.337.290	805.750.922	956.690.078
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		1,642,141,000			751.198.342	13.134.290	13.134.290	777.466.922	864,674,078
1.3.3.1.1.1		BANGUNAN GEDUNG KANTOR		1,642,141,000			751.198.342	13.134.290	13.134.290	777.466.922	864,674,078
1.3.3.1.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12 1996	1,642,141,000	32	11	751.198.342	13.134.290	13.134.290	777.466.922	864,674,078
1.3.3.1.1.13		BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA		50,800,000			11.514.667	508.000	508.000	12.530.667	38,269,333



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.3.1.1.13.1	1	Gedung Pos Jaga Permanen	9 2011	50,800,000	37	8	11.514.667	508.000	508.000	12.530.667	38,269,333
1.3.3.1.1.30		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA		69,500,000			14.363.333	695.000	695.000	15.753.333	53,746,667
1.3.3.1.1.30.5	1	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	9 2012	69,500,000	38	8	14.363.333	695.000	695.000	15.753.333	53,746,667
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		34,380,000			11,555,500	573,000	573,000	12,701,500	21,678,500
1.3.4.3		INSTALASI									
1.3.4.3.7		INSTALASI PERTAHANAN		34,380,000			11.555.500	573.000	573.000	12.701.500	21,678,500
1.3.4.3.7.1		INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT		34,380,000			11.555.500	573.000	573.000	12.701.500	21,678,500
1.3.4.3.7.1.5	1	Instalasi Benteng	12 2012	34,380,000	18	11	11.555.500	573.000	573.000	12.701.500	21,678,500
5		ASET TETAP LAINNYA		25,320,000			25,320,000	0	0	25,320,000	0
1.3.5.2		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA									
1.3.5.2.2		ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		25,320,000			25.320.000	0	0	25.320.000	0
1.3.5.2.2.1		PAHATAN		17,820,000			17.820.000	0	0	17.820.000	0
1.3.5.2.2.1.2	1	Pahatan Kayu	12 2012	4,905,000	0	0	4.905.000	0	0	4.905.000	0
1.3.5.2.2.1.2	2	Pahatan Kayu	12 2012	4,905,000	0	0	4.905.000	0	0	4.905.000	0
1.3.5.2.2.1.2	3	Pahatan Kayu	12 2012	4,905,000	0	0	4.905.000	0	0	4.905.000	0
1.3.5.2.2.1.2	4	Pahatan Kayu	12 2012	3,105,000	0	0	3.105.000	0	0	3.105.000	0
1.3.5.2.2.2		MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH		7,500,000			7.500.000	0	0	7.500.000	0
1.3.5.2.2.2.15	1	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	10 2012	7,500,000	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0
Jumlah Aset Tetap				1,822,141,000			9.904.398.053	154.390.363	150.726.067	10.209.514.483	(8,387,373,483)
Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya				20,000,000							
2		PERALATAN DAN MESIN		20,000,000			20,000,000	0	0	20,000,000	0
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN									
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		20,000,000			20.000.000	0	0	20.000.000	0
1.3.2.2.1.4		KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		20,000,000			20.000.000	0	0	20.000.000	0
1.3.2.2.1.4.1	1	Sepeda Motor	12 2001	20,000,000	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
Jumlah Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya				20,000,000			20.000.000	0	0	20.000.000	0
Aset Tetap yang dihapuskan				781,673,615							
2		PERALATAN DAN MESIN		781,673,615			781,673,615	0	0	781,673,615	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA		102,547,000			102.547.000	0	0	102.547.000	0
1.3.2.5.2.1		MEUBELAIR		31,872,000			31.872.000	0	0	31.872.000	0
1.3.2.5.2.1.30	22	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	23	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	24	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	25	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	26	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	27	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	28	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	29	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	30	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	31	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	32	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	33	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	34	Kursi Rapat	5 2013	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	47	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	48	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	49	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	50	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	51	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	52	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	53	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	54	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	55	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	56	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	57	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	58	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	59	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	60	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	61	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	62	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	63	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	64	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	65	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	66	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	67	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	68	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	69	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	70	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	71	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	72	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	73	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	74	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	75	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	76	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	77	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	78	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	79	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	80	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	81	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	82	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	83	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	84	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	85	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	86	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0
1.3.2.5.2.1.30	87	Kursi Rapat	4 2014	500,000	0	0	500.000	0	0	500.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.5.2.1.30	110	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	111	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.30	112	Kursi Rapat	6 2015	710,000	0	0	710.000	0	0	710.000	0
1.3.2.5.2.1.32	1	Kursi Putar	12 2003	1,642,000	0	0	1.642.000	0	0	1.642.000	0
1.3.2.5.2.1.39	1	Meja Komputer	12 2009	550,000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
1.3.2.5.2.1.39	2	Meja Komputer	12 2009	550,000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
1.3.2.5.2.4		ALAT PENDINGIN		44,250,000			44.250.000	0	0	44.250.000	0
1.3.2.5.2.4.3	3	A.C. Window	12 2004	13,000,000	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000	0
1.3.2.5.2.4.4	11	A.C. Split	5 2011	5,430,000	0	0	5.430.000	0	0	5.430.000	0
1.3.2.5.2.4.4	12	A.C. Split	5 2011	5,430,000	0	0	5.430.000	0	0	5.430.000	0
1.3.2.5.2.4.4	13	A.C. Split	5 2011	5,430,000	0	0	5.430.000	0	0	5.430.000	0
1.3.2.5.2.4.4	16	A.C. Split	7 2013	7,480,000	0	0	7.480.000	0	0	7.480.000	0
1.3.2.5.2.4.4	17	A.C. Split	7 2013	7,480,000	0	0	7.480.000	0	0	7.480.000	0
1.3.2.5.2.6		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		26,425,000			26.425.000	0	0	26.425.000	0
1.3.2.5.2.6.2	2	Televisi	12 2003	4,500,000	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	0
1.3.2.5.2.6.2	3	Televisi	12 2002	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.5.2.6.2	4	Televisi	7 2011	7,850,000	0	0	7.850.000	0	0	7.850.000	0
1.3.2.5.2.6.2	5	Televisi	7 2011	2,625,000	0	0	2.625.000	0	0	2.625.000	0
1.3.2.5.2.6.77	2	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12 2004	5,000,000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
1.3.2.5.2.6.77	4	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9 2012	3,450,000	0	0	3.450.000	0	0	3.450.000	0
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR									
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		32,895,000			32.895.000	0	0	32.895.000	0
1.3.2.6.1.2		PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		32,895,000			32.895.000	0	0	32.895.000	0
1.3.2.6.1.2.3	1	Camera Electronic	10 2010	12,500,000	0	0	12.500.000	0	0	12.500.000	0
1.3.2.6.1.2.3	3	Camera Electronic	10 2010	8,295,000	0	0	8.295.000	0	0	8.295.000	0
1.3.2.6.1.2.3	5	Camera Electronic	4 2011	9,300,000	0	0	9.300.000	0	0	9.300.000	0
1.3.2.6.1.2.3	8	Camera Electronic	4 2012	2,800,000	0	0	2.800.000	0	0	2.800.000	0
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI		191,549,814			191.549.814	0	0	191.549.814	0
1.3.2.6.2.1		ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		191,549,814			191.549.814	0	0	191.549.814	0
1.3.2.6.2.1.3	1	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.3	2	Pesawat Telephone	4 2011	1,100,000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN		SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan	Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.2.1.3	12	Pesawat Telephone	4	2011	1,100,000	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0
1.3.2.6.2.1.6	10	Handy Talky (HT)	12	2009	5,973,000	0	0	0	5.973.000	0	0	5.973.000	0
1.3.2.6.2.1.6	14	Handy Talky (HT)	12	2009	5,973,000	0	0	0	5.973.000	0	0	5.973.000	0
1.3.2.6.2.1.6	18	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	19	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	20	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	21	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	22	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	23	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	24	Handy Talky (HT)	10	2010	5,075,000	0	0	0	5.075.000	0	0	5.075.000	0
1.3.2.6.2.1.6	49	Handy Talky (HT)	4	2011	6,300,000	0	0	0	6.300.000	0	0	6.300.000	0
1.3.2.6.2.1.6	50	Handy Talky (HT)	12	2010	3,329,700	0	0	0	3.329.700	0	0	3.329.700	0
1.3.2.6.2.1.6	65	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	66	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	67	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	68	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	69	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	70	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	71	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	72	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	73	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	74	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	75	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	76	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	77	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	78	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	79	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	80	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	81	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	82	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	83	Handy Talky (HT)	12	2012	3,716,000	0	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.6.2.1.6	84	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	85	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	86	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	87	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	88	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	89	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	90	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	91	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	92	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	93	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	94	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	95	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	96	Handy Talky (HT)	12 2012	3,716,000	0	0	3.716.000	0	0	3.716.000	0
1.3.2.6.2.1.6	101	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.2.1.6	102	Handy Talky (HT)	6 2017	6,118,557	0	0	6.118.557	0	0	6.118.557	0
1.3.2.6.3		PERALATAN PEMANCAR		220,105,000			220.105.000	0	0	220.105.000	0
1.3.2.6.3.1		PERALATAN PEMANCAR MF/MW		150,000,000			150.000.000	0	0	150.000.000	0
1.3.2.6.3.1.3	8	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2006	50,000,000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
1.3.2.6.3.1.3	9	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2006	50,000,000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
1.3.2.6.3.1.3	10	Unit Pemancar MF/MW Stationary	12 2006	50,000,000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
1.3.2.6.3.2		PERALATAN PEMANCAR HF/SW		70,105,000			70.105.000	0	0	70.105.000	0
1.3.2.6.3.2.3	1	Unit Pemancar HF/SW Stationary	12 2006	20,360,000	0	0	20.360.000	0	0	20.360.000	0
1.3.2.6.3.2.3	2	Unit Pemancar HF/SW Stationary	6 2008	49,745,000	0	0	49.745.000	0	0	49.745.000	0
1.3.2.10		KOMPUTER									
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT		92,521,801			92.521.801	0	0	92.521.801	0
1.3.2.10.1.2		PERSONAL KOMPUTER		92,521,801			92.521.801	0	0	92.521.801	0
1.3.2.10.1.2.1	10	P.C Unit	5 2011	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	11	P.C Unit	5 2011	9,900,000	0	0	9.900.000	0	0	9.900.000	0
1.3.2.10.1.2.1	19	P.C Unit	10 2014	9,975,000	0	0	9.975.000	0	0	9.975.000	0
1.3.2.10.1.2.1	22	P.C Unit	6 2017	11,248,933	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	0
1.3.2.10.1.2.1	25	P.C Unit	6 2017	11,248,933	0	0	11.248.933	0	0	11.248.933	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.10.1.2.1	27	P.C Unit	6 2017	11,248,935	0	0	11.248.935	0	0	11.248.935	0
1.3.2.10.1.2.3	2	Note Book	10 2010	14,500,000	0	0	14.500.000	0	0	14.500.000	0
1.3.2.10.1.2.3	3	Note Book	10 2010	14,500,000	0	0	14.500.000	0	0	14.500.000	0
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER		112,055,000			112.055.000	0	0	112.055.000	0
1.3.2.10.2.3		PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		112,055,000			112.055.000	0	0	112.055.000	0
1.3.2.10.2.3.1	2	CPU (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	5,500,000	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0
1.3.2.10.2.3.1	8	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.1	9	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.1	10	CPU (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	6,000,000	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	1	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	2	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	3	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	4	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	5	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	6	Monitor	12 2009	3,000,000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1.3.2.10.2.3.2	9	Monitor	10 2010	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
1.3.2.10.2.3.2	10	Monitor	10 2010	3,500,000	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
1.3.2.10.2.3.3	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.10.2.3.3	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2009	4,950,000	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	0
1.3.2.10.2.3.3	10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	4,750,000	0	0	4.750.000	0	0	4.750.000	0
1.3.2.10.2.3.3	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12 2010	4,750,000	0	0	4.750.000	0	0	4.750.000	0
1.3.2.10.2.3.3	14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2012	4,785,000	0	0	4.785.000	0	0	4.785.000	0
1.3.2.10.2.3.3	19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10 2010	4,750,000	0	0	4.750.000	0	0	4.750.000	0
1.3.2.10.2.3.3	23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0
1.3.2.10.2.3.3	24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0
1.3.2.10.2.3.3	25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0
1.3.2.10.2.3.3	26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0
1.3.2.10.2.3.3	27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0
1.3.2.10.2.3.3	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 2017	5,770,000	0	0	5.770.000	0	0	5.770.000	0
1.3.2.19		PERALATAN OLAH RAGA									
1.3.2.19.1		PERALATAN OLAH RAGA		30,000,000			30.000.000	0	0	30.000.000	0



PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesatuan Bangsa
Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
Sub Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKU
					Thn	Bulan		Semester I	Semester II		
1.3.2.19.1.3		PERALATAN SENAM		30,000,000			30.000.000	0	0	30.000.000	0
1.3.2.19.1.3.21	5	Peralatan Senam lainnya	12 2006	30,000,000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
Jumlah Aset Tetap yang dihapuskan				781,673,615			781.673.615	0	0	781.673.615	0
Jumlah				2,623,814,615			10.706.071.668	154.390.363	150.726.067	11.011.188.098	(8,387,373,483)



පරිපාලන ආයතනික පාලන කමිටු
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමුපකර්මාලයේ මහලයා

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

සමුපකර්මාලයේ මහලයා, පරිපාලන ආයතනික පාලන කමිටු, පරිපාලන ආයතනික පාලන කමිටු, පරිපාලන ආයතනික පාලන කමිටු
 Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon: (0361) 245396
 Website : www.satpolpp.baliprov.go.id

BERITA ACARA KOREKSI PENCATATAN SALDO AWAL
 Nomor : B.36.032 / 7226 / Set / SATPOL. PP

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami telah melakukan Koreksi Pencatatan Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) dengan nilai sebesar (-) Rp. 24.107.240,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah). Adapun daftar barang yang dilakukan koreksi sesuai daftar terlampir.

Berita Acara Koreksi Pencatatan Saldo Awal ini dibuat rangkap 2 (dua) dipergunakan untuk arsip atau dokumen pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, dan 1 (satu) rangkap dapat disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Bali sebagai laporan.

Demikian Berita Acara Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 12 September 2023
 Pengurus Barang
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

I Putu Ricard Yuanta Putra S.STP, MAP
 NIP. 19910913 201206 1 001

I Wayan Parna, S.Sos
 NIP. 19750822 200701 1 017

Mengetahui
 Kepala Satuan
 Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si
 NIP. 19721216 199803 1 006

LAMPIRAN BERITA ACARA KOREKSI PENCATATAN SALDO AWAL
 Nomor : B.36.032 / 7226 / Set / SATPOL PP

No	IDPEMDA	OPD	Nama UPS	Kode Barang	Jenis Barang	No Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Sisa Masa Manfaat Awal 2023	Saldo Awal Akum. Penyusutan 2023		Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan
										Sebelum Koreksi	Setelah Koreksi	
1	18020010013000001	SATPOL PP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.3.3.1.1.1.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	31-12-96	1,642,141,000.00	407	775,305,582.00	751,198,842.00	24,107,240.00

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



I Putu Ricard Yuanta Putra S.STP.,MAP
 NIP. 19910913 201206 1 001

Bali, 12 September 2023
 Pengurus Barang
 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



I Wayan Parna, S.Sos
 NIP. 19750822 200701 1 017

Mengetahui
 Kepala Satuan
 Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH. M.Si
 NIP. 19721216 199803 1 006